

Laporan Perekonomian

Provinsi Kepulauan Riau



NOVEMBER 2023



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

November 2023

Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kepulauan Riau

Tim Perumusan KEKDA Provinsi

Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

November 2023

Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kepulauan Riau dipublikasikan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Penerbitan laporan ini bertujuan sebagai: 1) Laporan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia mengenai kondisi perkembangan ekonomi dan keuangan di Provinsi Kepulauan Riau, dan 2) Informasi kepada *stakeholders* di daerah mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan terkini.

1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah,
2. Perkembangan Keuangan Daerah,
3. Perkembangan Inflasi,
4. Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM,
5. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah,
6. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan, serta
7. Prospek Perekonomian Daerah.

Tim Penulis

Tim Perumusan KEKDA Provinsi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Engku Putri No. 1, Kota Batam - Indonesia

Kata Pengantar

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau periode November 2023 dapat diselesaikan. Dalam laporan ini dijabarkan pelaksanaan tugas Bank Indonesia antara lain asesmen perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau secara umum serta prospeknya. Bank Indonesia menyadari bahwa peran perekonomian regional menjadi semakin penting dalam konteks pertumbuhan ekonomi nasional. Implementasi otonomi daerah serta potensi ekonomi regional yang besar telah terbukti ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau secara rutin melakukan asesmen perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Asesmen perekonomian mencakup perkembangan ekonomi makro regional, inflasi, sistem pembayaran. Asesmen perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dilakukan setiap triwulan dan laporan dimaksud dikenal dengan Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Penyusunan Laporan Perekonomian dimaksud sebagai upaya memenuhi kebutuhan *stakeholder* eksternal serta bagi Kantor Pusat Bank Indonesia.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau atas kerja sama dalam mendukung penyediaan data. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Perekonomian ini, harapan kami hubungan yang baik ini dapat ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Kami menyadari isi dari laporan yang kami susun ini masih mempunyai banyak kekurangan, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk lebih meningkatkan kualitas Laporan Perekonomian ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah senantiasa melimpahkan ridho-Nya dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam meningkatkan kinerja kita semua.

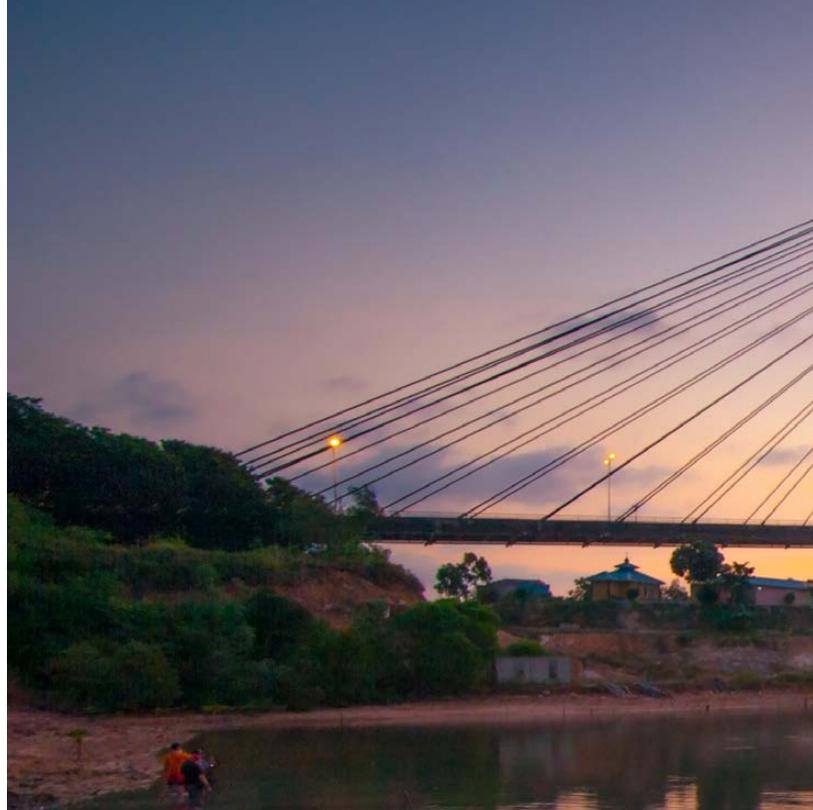
Batam, November 2023
Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kepulauan Riau

TTD

Suryono
Direktur

Daftar Isi

Tim Perumusan KEKDA Provinsi	II
Kata Pengantar	III
Daftar Isi	IV
Daftar Tabel	VI
Daftar Gambar	VII
Daftar Grafik	VIII
Ringkasan Eksekutif	X
Lampiran	63



Bab I	
Perkembangan Makro Ekonomi Daerah	1
1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELUARAN	3
1.1.1. Konsumsi Rumah Tangga	4
1.1.2. Konsumsi Pemerintah	4
1.1.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB	5
1.1.4. Kegiatan Ekspor-Impor	6
1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	7
1.2.1 Lapangan Usaha Industri Pengolahan	8
1.2.2 Lapangan Usaha Industri Pengolahan	8
1.2.3. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	8
1.2.4 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian	9
BOKS 1	
Laporan Liaison Triwulan III 2023	11
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau	

Bab II	
Perkembangan Keuangan Daerah	15
2.1 REALISASI PENDAPATAN	17
2.2 REALISASI BELANJA	18
2.3 ANGGARAN DAN REALISASI APBN DI WILAYAH KEPRI	19

Bab III	
Perkembangan Inflasi Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepulauan Riau	21
3.1 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA	23
3.2. PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KOTA	24
3.2.1. Inflasi Kota Batam	24
3.2.2. Inflasi Kota Tanjungpinang	24
3.3 ARAH PERKEMBANGAN INFLASI	25
3.4 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI	25

Bab IV	
Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	27
4.1 PERKEMBANGAN PERBANKAN PROVINSI KEPRI	29
4.1.1 Perkembangan Aset Perbankan	29
4.1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan	30
4.1.3 Perkembangan Kredit Perbankan	30
4.1.4 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan	31
4.2 ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM	32
4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi	32
4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga	32
4.2.3 Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	34
BOKS 2	35

Mengenalkan Produk Kepri Ke Mancanegara Melalui Gebyar Melayu Pesisir



Bab V			
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah		37	
5.1	TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI	39	
5.1.1	Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (<i>Inflow/Outflow</i>)	39	
5.1.2	Penyediaan Uang Kartal Layak Edar	39	
5.1.3	Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu (UPAL)	40	
5.2	TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI	40	
5.2.1	Transaksi Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS)	40	
5.2.2	Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	40	
5.2.3	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE)	40	
5.2.4	Perkembangan QRIS	41	
5.2.5	Intensifikasi Sistem Pembayaran Nontunai	42	
5.2.6	Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	42	
5.2.7	Bantuan Sosial Nontunai	43	
5.3	TRANSAKSI KUPVA BB DAN PJP LR	43	
5.3.1	Perkembangan Transaksi KUPVA Bukan Bank (KUPVA BB)	44	
5.3.2	Perkembangan Transaksi Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR)	44	
5.3.3	Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Provinsi Kepulauan Riau	44	
BOKS 3			
	PEKAN QRIS NASIONAL (PQN) 2023	45	
	Akselerasi Akseptasi QRIS di Kepulauan Riau		
Bab VI			
Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan		49	
6.1	KETENAGAKERJAAN	51	
6.2.1	Ketenagakerjaan	51	
6.2	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	52	
6.2.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	52	
6.2.2	Kemiskinan	53	
6.2.3	Gini Ratio (GR)	53	
6.2.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	53	
Bab VII			
Prospek Perekonomian Daerah		55	
7.1.	PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI	57	
7.2.	PROSPEK INFLASI	59	
7.3.	REKOMENDASI	60	

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera	3
Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Pengeluaran (%yoy)	4
Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha	7
Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan III 2023	17
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan III 2023	18
Tabel 2.3 Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN Wilayah Provinsi Kepri	19
Tabel 2.4 Anggaran Belanja Infrastruktur APBN Wilayah Provinsi Kepri	20
Tabel 3.1 Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam (% yoy)	23
Tabel 3.2 Penyumbang Inflasi Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri September 2023	23
Tabel 3.3 Penyumbang Deflasi Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri September 2023	23
Tabel 3.4 Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa (% , yoy)	24
Tabel 3.5 Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa di Kota Penghitungan IHK (% - yoy)	25
Tabel 4.1 Perkembangan Indikator Utama Perbankan Kepri	29
Tabel 4.2 Penyaluran Kredit (Spasial)	31
Tabel 4.3 Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga	33
Tabel 5.1 Penyaluran PKH Tahap 2 di Wilayah Provinsi Kepri	43
Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri	51
Tabel 6.3 Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri	51
Tabel 6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan	51
Tabel 6.4 Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri (%)	52
Tabel 6.5 Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri	52
Tabel 6.6 Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri	53
Tabel 6.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri Menurut Komponen	54
Tabel 6.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota	54
Tabel 7.1 Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2023	58
Tabel 7.2 Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2024	58
Tabel 7.3 Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2023	59

Daftar Gambar

Gambar B1.1	Peserta Acara Temu Responden 2023	13
Gambar B1.2	Penampilan <i>Guest Star</i> Acara Temu Responden	13
Gambar B2.1	<i>Opening Ceremony</i> Gebyar Melayu Pesisir	35
Gambar B2.2	Implementasi QRIS Cross Border oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto	36
Gambar B2.3	Demonstrasi Pembuatan Teh Tarik pada Pemecahan Rekor MURI Sajian Teh Tarik Terbanyak	36
Gambar B2.4	Seminar Internasional	36
Gambar B3.1	Pre-PQN : Rapat Koordinasi Bersama Dishub Kota Batam, <i>Training Of Trainers</i> Pemilihan Duta QRIS Kepri, <i>Launching</i> Bus Pajak Keliling SI BIJAK Dan QRIS PBB P2 Kota Batam, <i>Launching</i> Integrasi CMS Dan SP2D Online SI PANGKAS, <i>Launching</i> Pembelian Tiket Transportasi Kapal Ke Singapura Melalui Kanal Non Tunai, dan Sosialisasi QRIS Bagi Guru TK-SMA Di Kota Batam	45
Gambar B3.2	Kegiatan PQN: Sosialisasi Kepada Pelajar, Mahasiswa, dan Pengurus Rumah, <i>QRIS Goes To School, Showcasing, On Boarding</i> , dan <i>QRIS Experience</i> Di Kab. Natuna, Kolaborasi Bersama HIPMI Dan Brimo FSTVL	46
Gambar B3.3	<i>Opening Ceremony</i> CERNIVAL	46
Gambar B3.4	Pemilihan Duta QRIS Kepri	47
Gambar B3.5	Sosialisasi dan <i>Showcasing</i> QRIS	47
Gambar B3.6	<i>Opening Ceremony</i> CERNIVAL	47

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulanan)	3	Grafik B1.4	Kredit Modal Kerja, Investasi, & Konsumsi	12
Grafik 1.2	Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan)	3	Grafik 2.1	Komposisi Realisasi Pendapatan Triwulan III 2023	17
Grafik 1.3	Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran	4	Grafik 2.2	Perkembangan Realisasi Pendapatan Triwulan III 2023	17
Grafik 1.4	Indeks Keyakinan Konsumen	4	Grafik 2.3	Realisasi Pendapatan Pada Masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri	18
Grafik 1.5	Komponen Indeks Keyakinan Konsumen Saat ini	4	Grafik 2.4	Komposisi Realisasi Belanja Triwulan III 2023	19
Grafik 1.6	Realisasi Belanja APBD	5	Grafik 2.5	Perkembangan Realisasi Belanja Triwulan III 2023	19
Grafik 1.7	Perkembangan Realisasi APBD Wilayah Kepri	5	Grafik 2.6	Realisasi Belanja pada Masing-Masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri	19
Grafik 1.8	Simpanan Pemerintah Daerah pada Perbankan	5	Grafik 3.1	Inflasi Triwulan III 2023 Regional Sumatera (% yoy)	23
Grafik 1.9	Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)	5	Grafik 3.2	Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau, Nasional dan Sumatera Triwulan III 2023 (% yoy)	23
Grafik 1.10	Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	5	Grafik 3.3	Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau, Batam, dan Tanjungpinang (% yoy)	24
Grafik 1.11	Perkembangan Impor Barang Modal	5	Grafik 4.1	Perkembangan Aset Perbankan	29
Grafik 1.12	Perkembangan Ekspor Total Luar Negeri	6	Grafik 4.2	Pertumbuhan Aset Berdasarkan Kelompok Bank	29
Grafik 1.13	Perkembangan Ekspor Komoditas Nonmigas dan Migas	6	Grafik 4.3	Perkembangan DPK Perbankan	30
Grafik 1.14	Perkembangan Ekspor Produk Elektronik dan Olahan CPO	6	Grafik 4.4	DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan	30
Grafik 1.15	Index of Industrial Production (IIP) Singapura	6	Grafik 4.5	Perkembangan Kredit Perbankan	30
Grafik 1.16	Perkembangan Impor	7	Grafik 4.6	Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	30
Grafik 1.17	Perkembangan Impor Nonmigas - BEC	7	Grafik 4.7	Porsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	31
Grafik 1.18	Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)	7	Grafik 4.8	Perkembangan Suku Bunga Kredit	31
Grafik 1.19	Index of Industrial Production (IIP) Singapura untuk Machinery & Equipment	8	Grafik 4.9	Kredit Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	31
Grafik 1.20	Perkembangan Kredit Industri Pengolahan	8	Grafik 4.10	Kredit Sektor Industri Pengolahan	31
Grafik 1.21	Perkembangan Pengadaan/Penjualan Semen	8	Grafik 4.11	Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan Kepri	31
Grafik 1.22	Perkembangan Kredit Konstruksi	8	Grafik 4.12	Perkembangan Kredit Korporasi	32
Grafik 1.23	Kredit Perorangan Multiguna	9	Grafik 4.13	Pangsa Kredit Korporasi (5 LU Terbesar)	32
Grafik 1.24	Kredit Perdagangan Besar dan Eceran	9	Grafik 4.14	Survei Konsumen	32
Grafik 1.25	Perkembangan Harga Minyak Dunia	9	Grafik 4.15	Survei Konsumen	32
Grafik B1.1	LS Penjualan Domestik dan PDRB Industri Pengolahan	11	Grafik 4.16	Kredit Rumah Tangga	33
Grafik B1.2	LS Ekspor dan Proyeksi PDRB Ekspor	11	Grafik 4.17	Kredit Konsumsi	33
Grafik B1.3	Kredit Korporasi	12	Grafik 4.18	DPK Perseorangan	33
			Grafik 4.19	Pangsa DPK Perseorangan	33

Daftar Grafik

Grafik 4.20	Perkembangan Kredit UMKM	34
Grafik 5.1	Perkembangan Inflow dan Outflow Kepri	39
Grafik 5.2	Perkembangan Pertumbuhan Inflow dan Outflow	39
Grafik 5.3	Perkembangan Pemusnahan UTLE	39
Grafik 5.4	Perkembangan Temuan Uang Palsu	40
Grafik 5.5	Perkembangan RTGS di Provinsi Kepri	40
Grafik 5.6	Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Kepri	40
Grafik 5.7	Perkembangan Transaksi Kartu Debit	41
Grafik 5.8	Perkembangan Transaksi Kartu Kredit	41
Grafik 5.9	Perkembangan Transaksi UE di Provinsi Kepri	41
Grafik 5.10	Perkembangan QRIS berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepri	41
Grafik 5.11	Perkembangan Merchant QRIS berdasarkan Kelompok Usaha	41
Grafik 5.12	Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Provinsi Kepri	42
Grafik 5.13	Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kepri	42
Grafik 5.14	Perkembangan Transaksi KUPVA	43
Grafik 5.15	Pergerakan Transaksi KUPVA & Nilai Tukar Rupiah	43
Grafik 5.16	Perkembangan Transaksi Pada PJP LR	44
Grafik 6.1	Perkembangan NTP	52
Grafik 6.2	NTP Berdasarkan Subsektor	52
Grafik 6.3	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepri	53
Grafik 6.4	Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera	53
Grafik 6.5	Perkembangan IPM Provinsi Kepri	54
Grafik 7.1	Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang (% yoy)	57
Grafik 7.2	Perkembangan Inflasi Negara Mitra Dagang (% yoy)	57
Grafik 7.3	Likert Scale Perkiraan Penjualan Ekspor	57
Grafik 7.4	Likert Scale Perkiraan Investasi	58

Ringkasan Eksekutif

Perekonomian Kepri pada triwulan III 2023 tumbuh 4,88% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yakni 5,04% (yoy), namun tetap tumbuh kuat.

Dari sisi pengeluaran, perlambatan disebabkan komponen Konsumsi Rumah Tangga Pemerintah, dan Net Ekspor. Pengeluaran di depan kata Pemerintah, sehingga menjadi Pengeluaran Pemerintah

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), percepatan pertumbuhan pada 4 LU utama yakni Industri Pengolahan, Pertambangan & Penggalian, Perdagangan dan Konstruksi

Realisasi pendapatan dan daerah sampai triwulan III 2023 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu.

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan III 2023 tumbuh positif sebesar 4,88% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 5,04% (yoy). Pertumbuhan tersebut secara kumulatif merupakan yang tertinggi di wilayah Sumatera yaitu sebesar 5,47% (ctc) dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan wilayah Sumatera sebesar 4,72% (ctc), maupun nasional sebesar 5,05% (ctc).

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2023 didorong peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan pangsa sebesar 45,54% sejalan meningkatnya penanaman modal dalam negeri (PMDN). Sementara itu, Konsumsi Rumah Tangga mengalami perlambatan dipengaruhi oleh normalisasi permintaan masyarakat dan penurunan Indeks Penghasilan Konsumen. Selain itu, perlambatan net ekspor disebabkan oleh peningkatan jumlah impor karena meningkatnya impor barang konsumsi dan bahan baku.

Pertumbuhan ekonomi didukung oleh peningkatan pada empat LU utama yakni Industri Pengolahan, Pertambangan & Penggalian, Perdagangan dan Konstruksi. Pertumbuhan LU Industri Pengolahan mengalami perbaikan sejalan dengan permintaan global terhadap produk elektronik yang tercermin dari peningkatan *output forecast* dari Singapura untuk industri manufaktur. Peningkatan pertumbuhan LU Konstruksi didorong oleh pembangunan infrastruktur yang masif menjelang akhir tahun. Pertumbuhan LU Perdagangan Besar dan Eceran dipengaruhi oleh masih tingginya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Kepulauan Riau. Sementara itu, peningkatan kinerja pada LU Pertambangan dan Penggalian banyak didorong oleh peningkatan harga minyak global sebagai insentif bagi produsen untuk peningkatan produksi.

Realisasi pendapatan Pemda di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan III 2023 tercatat sebesar 67,33%, sementara realisasi belanja mencapai 57,92% dari total anggaran. Realisasi pendapatan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 66,70%. Peningkatan pendapatan terutama terjadi pada semua pos Pendapatan Asli Daerah, pos Pendapatan Transfer Antar Daerah, dan pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara itu, realisasi belanja mengalami peningkatan dari 57,62% di triwulan III 2022 menjadi sebesar 57,92% di triwulan III 2023. Hal tersebut dipengaruhi oleh kenaikan belanja operasi khususnya belanja subsidi dan belanja transfer.

Ringkasan Eksekutif

Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 2,05% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,64% (yoy). Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas pangan, transportasi dan makanan jadi. Penurunan harga komoditas pangan terjadi pada aneka cabai, minyak goreng, telur ayam ras, dan sayuran hijau dipengaruhi oleh perbaikan pasokan dari sentra. Selain itu, penurunan harga kelompok transportasi sejalan dengan penurunan tarif angkutan udara seiring dengan penurunan harga bahan bakar. Ke depan, inflasi IHK diperkirakan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi yaitu $3,0 \pm 1\%$ hingga akhir tahun 2023.

Kinerja Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Provinsi Kepri masih terjaga dan cenderung mengalami peningkatan pada triwulan III 2023. Perlambatan tersebut tercermin dari penurunan laju penyaluran kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK), namun tetap disertai dengan terjaganya kualitas kredit. Risiko kredit pada segmen korporasi, segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maupun segmen kredit sektor rumah tangga masih terjaga ($< 5\%$). Penyaluran kredit oleh bank berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Kepri tumbuh sebesar 11,10% (yoy), lebih tinggi dari triwulan II 2023 yang tumbuh sebesar 8,73% (yoy). Selain itu, DPK yang dihimpun oleh perbankan di Provinsi Kepri tumbuh sebesar 12,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,95% (yoy).

Aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah dan transaksi Uang Kertas Asing di Provinsi Kepri mengalami peningkatan pada triwulan III 2023. Selain itu, transaksi pembayaran nontunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital khususnya *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan III 2023 mencatatkan *net outflow* sebesar Rp1,12 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2023 yang tercatat sebesar Rp1,56 triliun. Perkembangan aliran uang tersebut sejalan dengan pola musiman kebutuhan uang tunai yang meningkat selama periode akhir tahun. Selain itu, aktivitas pembayaran nontunai secara tahunan meningkat. Hal ini tercermin dari peningkatan transaksi QRIS dan Uang Elektronik (UE) yang didukung oleh meningkatnya preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap penggunaan transaksi nontunai.

Inflasi Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 menurun disebabkan oleh penurunan harga komoditas pangan, transportasi dan makanan jadi.

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Kepri pada triwulan III 2023 masih terjaga dan cenderung mengalami peningkatan.

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas sistem pembayaran tunai menunjukkan adanya *net outflow* sesuai pola musiman. Selain itu, transaksi non tunai tercatat mengalami peningkatan

Ringkasan Eksekutif

Tingkat kesejahteraan masyarakat terus mengalami perbaikan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepri menunjukkan perbaikan tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Nilai Tukar Petani (NTP) serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut.

Perekonomian Kepri tahun 2023 tetap tumbuh tinggi dan meningkat pada tahun 2024 didukung oleh perbaikan pertumbuhan pada sejumlah sektor dan inflasi yang relatif terkendali.

Perekonomian global diperkirakan tumbuh melambat dan lebih rendah dari estimasi sebelumnya seiring dengan pelemahan perekonomian Tiongkok dan meningkatnya ketegangan geopolitik yang turut memperlambat perekonomian Uni Eropa. Isu geopolitik tersebut turut mempengaruhi peningkatan harga energi dan pangan sehingga mengakibatkan tetap tingginya inflasi global. Perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri secara keseluruhan tahun 2023 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya didukung oleh perbaikan pertumbuhan di beberapa sektor dan perkembangan inflasi di daerah yang relatif terkendali. Bahkan, perekonomian Kepri pada tahun 2024 diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan penyelenggaraan pemilihan pemilu.

Tekanan inflasi pada tahun 2023 dan 2024 terjaga yang didukung oleh perbaikan rantai pasokan, normalisasi harga komoditas dan sinergi TPID dan GNPIP.

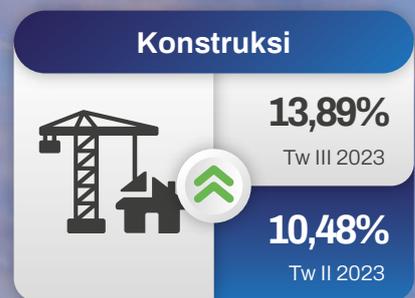
Tekanan inflasi domestik termasuk Provinsi Kepri pada tahun 2023 diperkirakan dapat dijaga di rentang sasaran inflasi nasional $3,0\pm 1\%$ (yoy) dan turun pada tahun 2024 dalam rentang sasaran inflasi nasional $2,5\pm 1\%$ (yoy). Hal tersebut didukung oleh perbaikan rantai pasokan, normalisasi harga pangan dan energi global, serta upaya pengendalian inflasi di daerah yang terus diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) khususnya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).



Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

Perkembangan Makro Ekonomi Daerah



Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan III 2023 tumbuh positif sebesar 4,88% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,04% (yoy). Pertumbuhan tersebut secara kumulatif merupakan yang tertinggi di wilayah Sumatera yaitu sebesar 5,47% (ctc) dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan wilayah Sumatera sebesar 4,72% (ctc), maupun nasional sebesar 5,05% (ctc).

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2023 didorong peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sejalan meningkatnya penanaman modal dalam negeri (PMDN). Di sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh peningkatan pada empat LU utama yakni Industri Pengolahan, Pertambangan & Penggalian, Perdagangan dan Konstruksi.



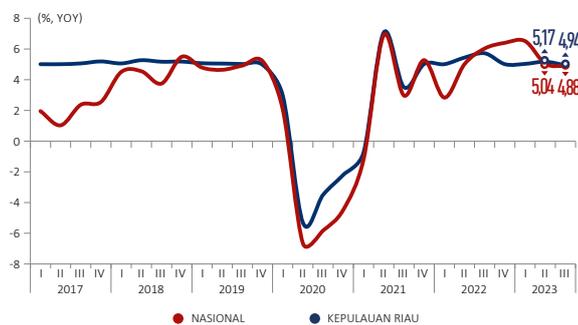
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 tercatat sebesar Rp49.368,82 miliar atau tumbuh 4,88% (yoy). Perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 mengalami perlambatan dari yang sebelumnya tumbuh sebesar 5,04% (yoy) menjadi sebesar 4,88% (yoy). Pencapaian ini didukung dengan tetap kuatnya pertumbuhan empat lapangan usaha utama di Kepri yaitu Industri Pengolahan, Konstruksi, Pertambangan & Penggalian serta Perdagangan. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan investasi khususnya penanaman modal dalam negeri.

Secara spasial di wilayah Sumatera, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri triwulan III 2023 secara kumulatif lebih tinggi dari wilayah Sumatera dan Nasional yang tumbuh masing-masing sebesar 4,72% (ctc) dan 5,05% (ctc). Pertumbuhan tertinggi selanjutnya di wilayah Sumatera dicapai oleh Sumatera Selatan dan Sumatera Utara masing-masing sebesar 5,14% (ctc) dan 5,00% (ctc). Adapun pangsa/distribusi PDRB Provinsi Kepri triwulan III 2023 terhadap wilayah Sumatera tercatat sebesar 7,17% dan merupakan terbesar ke-5 setelah Sumatera Utara (23,35%), Riau (22,34%), Sumatera Selatan (14,25%) dan Lampung (10,15%).

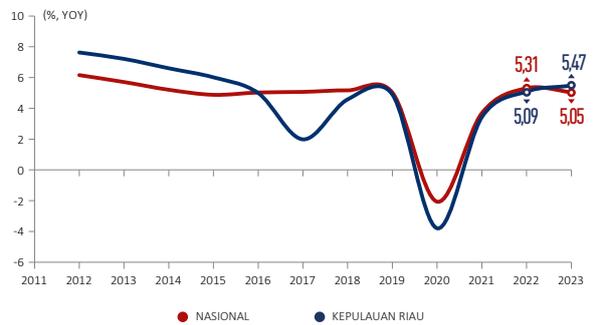
1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELUARAN

Distribusi perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 didominasi oleh PMTB/investasi dengan pangsa sebesar 45,54% diikuti Konsumsi Rumah Tangga sebesar 41,57% dari total PDRB. Pangsa komponen investasi yang cukup tinggi dipengaruhi oleh upaya pelaku usaha pada sektor industri dalam meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah barang modal maupun investasi aset pembangunan bangunan untuk ekspansi usaha. Selain itu, belanja modal pemerintah juga cukup besar terutama untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya konsumsi rumah tangga memiliki pangsa tertinggi kedua dan mengalami pertumbuhan yang masih tinggi seiring mobilitas masyarakat yang semakin baik.

Sementara itu komponen net ekspor yakni aktivitas perdagangan dengan luar negeri, memiliki pangsa terbesar ke tiga yaitu sebesar 8,13% dari total PDRB Provinsi Kepri, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan pangsa net ekspor tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah impor yang disebabkan oleh peningkatan impor barang konsumsi dan bahan baku.



Grafik 1.1 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulanan) Sumber: BPS (data diolah)



Grafik 1.2 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan) Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 1.1 Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera

No	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2023 (% , yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2023 (% , yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2023 (% , qtq)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2023 (% , qtq)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2023 (% , etc)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2023 (% , etc)	Kontribusi terhadap Pulau Sumatera (%)
1	Aceh	4,37	3,76	3,08	1,43	4,49	4,24	4,99
2	Sumatera Utara	5,19	4,94	2,88	2,00	5,03	5,00	23,35
3	Sumatera Barat	5,14	4,30	1,82	0,83	4,97	4,75	6,86
4	Riau	4,88	4,02	1,26	3,44	4,38	4,26	22,34
5	Jambi	4,86	4,90	4,81	2,59	4,93	4,92	6,53
6	Sumatera Selatan	5,24	5,08	4,57	2,39	5,17	5,14	14,25
7	Bengkulu	4,18	3,96	6,73	-2,44	4,14	4,07	2,08
8	Lampung	4,00	3,93	8,15	0,74	4,45	4,27	10,15
9	Kep. Bangka Belitung	5,13	4,01	6,06	0,04	4,77	4,51	2,28
10	Kepulauan Riau	5,04	4,88	0,72	0,42	5,77	5,47	7,17
	SUMATERA	4,90	4,50	3,34	1,89	4,84	4,72	100,00

▲ Menguat dibandingkan triwulan sebelumnya
▼ Melambat dibandingkan triwulan sebelumnya

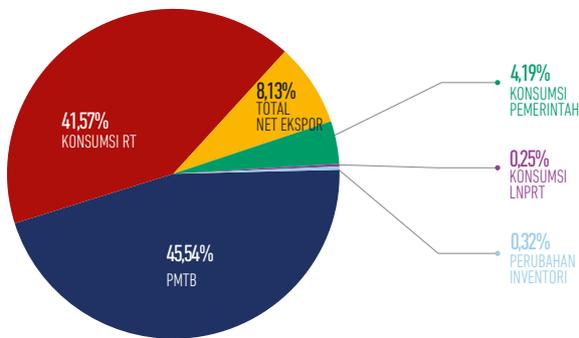
Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Pengeluaran (%yoy)

Pdrb Sisi Pengeluaran	2020					2021					2022					2023			Arah TW
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	
1. Konsumsi RT	4,57	-1,71	0,01	-1,19	0,39	-0,98	4,10	-1,05	0,19	0,54	1,15	3,66	7,44	6,43	4,65	5,52	3,46	2,77	▼
2. Konsumsi LNPRT	-7,23	-11,79	-6,70	0,78	-6,33	1,87	5,90	4,73	0,31	3,14	3,09	4,20	5,93	-2,11	2,75	0,65	5,77	5,85	▲
3. Konsumsi Pemerintah	7,59	-13,73	2,35	-16,12	-8,42	-4,91	10,20	-9,28	0,75	-0,60	-1,53	-1,77	-1,29	0,67	-0,67	5,29	10,35	1,18	▼
4. PMTB (Investasi)	4,39	-8,64	-5,42	-9,33	-4,98	0,09	6,98	4,32	1,81	3,22	1,18	1,89	4,96	7,46	3,89	7,71	7,81	10,12	▲
5. Perubahan Inventori	-139,12	-66,18	109,27	-182,42	-94,46	-323,44	-198,31	1,14	-68,81	285,74	-47,94	-39,53	35,05	-1.316,70	430,88	269,72	607,31	-52,23	▼
6. Total Net Ekspor	-5,38	-9,92	-25,40	21,33	-6,89	-7,91	20,04	16,97	30,82	13,30	13,64	18,59	6,33	-5,04	7,83	2,91	7,56	-0,36	▼
a. Total Ekspor	9,17	-3,47	-9,32	-4,64	-2,44	0,67	12,85	10,19	10,94	8,56	9,90	12,88	13,34	3,45	9,80	3,15	-6,14	-1,96	▲
b. Total Impor	11,27	-2,83	-7,58	-6,53	-1,97	1,72	12,19	9,60	9,05	8,09	9,48	12,32	13,99	4,41	10,01	3,17	-7,57	-2,10	▲
PERTUMBUHAN PDRB	2,02	-6,81	-5,81	-4,46	-3,80	-1,19	6,90	2,97	5,27	3,43	2,83	5,01	6,03	6,40	5,09	6,51	5,04	4,88	▼

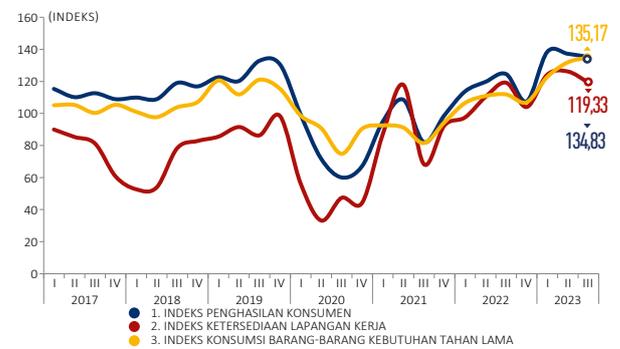
▲ Menguat
▼ Melambat

Sumber: BPS (data diolah)



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 1.3 Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran

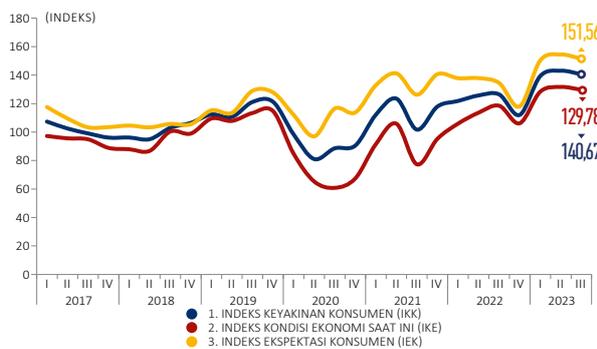


Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.5 Komponen Indeks Keyakinan Konsumen Saat ini

1.1.1. Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 2,77% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (3,46% yoy). Penurunan konsumsi RT tangga ini sejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen¹ (IKK) triwulan III 2023 sebesar 140,67 yang menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 143,11. Penurunan IKK tersebut didorong oleh peningkatan dua komponen pembentuknya yaitu Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Namun indeks tersebut berada di atas 100 yang mengindikasikan bahwa konsumen memiliki persepsi yang positif dan optimis terkait kondisi ekonomi saat ini dan ke depan.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.4 Indeks Keyakinan Konsumen

Secara rinci, IKE yang menurun dibandingkan triwulan sebelumnya terjadi pada komponen pembentuknya yaitu Indeks Penghasilan Konsumen dan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja. Sementara itu, Indeks Konsumsi Barang-Barang Kebutuhan Tahan Lama cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan optimisme masyarakat untuk membeli tahan lama.

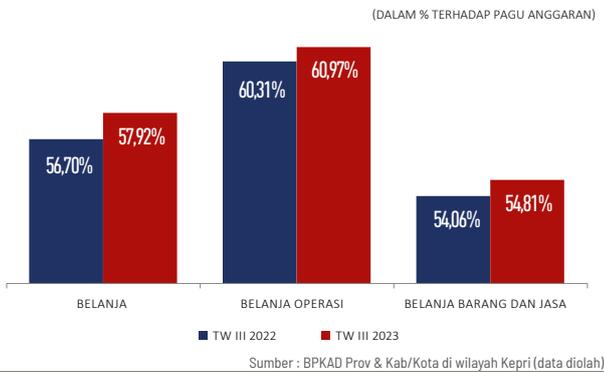
1.1.2. Konsumsi Pemerintah

Komponen konsumsi pemerintah pada triwulan III 2023 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2023, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 1,18% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,35% (yoy). **Sementara itu, penurunan konsumsi pemerintah lebih lanjut tertahan oleh kenaikan realisasi belanja pemerintah daerah.** Perbaikan tingkat realisasi belanja pemerintah pada APBD meningkat terutama pada pos belanja operasi serta belanja barang dan jasa. Pos belanja pada APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 terealisasi sebesar 57,92% dari pagu anggaran, lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 56,70%. Secara khusus, realisasi belanja operasi sedikit meningkat dari 60,31% di triwulan III tahun sebelumnya menjadi 60,97% pada triwulan III 2023. Tingkat realisasi belanja barang dan jasa tercapai sebesar 54,81%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 54,06%.

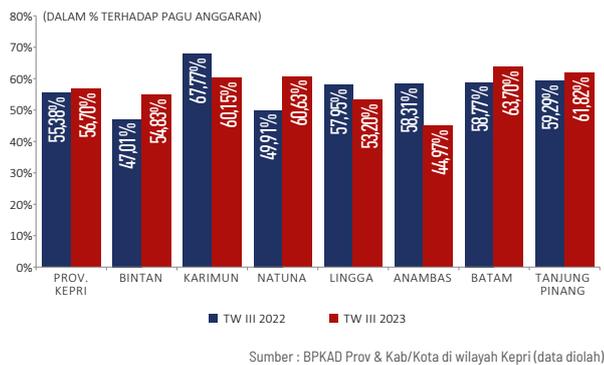
¹ Indeks Keyakinan Konsumen/IKK diperoleh dari Survei Konsumen Bank Indonesia yang dibentuk dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini dan Indeks Ekspektasi Konsumen.

Secara spasial, provinsi Kepri dan empat kabupaten/kota mengalami peningkatan realisasi belanja pada periode triwulan III 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengalami penurunan realisasi belanja pada periode triwulan III 2023 dibandingkan triwulan III 2022. Peningkatan konsumsi pemerintah juga tercermin pada penurunan jumlah simpanan pemerintah di perbankan pada triwulan III 2023 yang tercatat tumbuh 2,26% (yoy), menurun dari periode sebelumnya yang sebesar 12,79% (yoy).

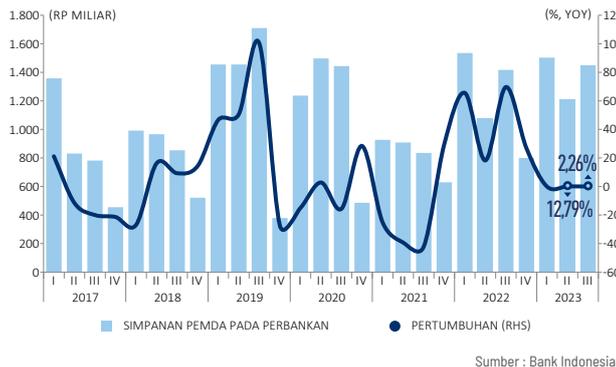
Berdasarkan struktur PDRB Provinsi Kepri pada triwulan III 2023, konsumsi pemerintah memiliki pangsa sebesar 4,19%. Belanja pemerintah terutama belanja modal dan belanja bantuan sosial mempunyai dampak lanjutan pada pertumbuhan lapangan usaha lainnya sehingga realisasi belanja lebih awal akan menjadi pendorong bagi sektor lainnya untuk berkembang.



Grafik 1.6 Realisasi Belanja APBD



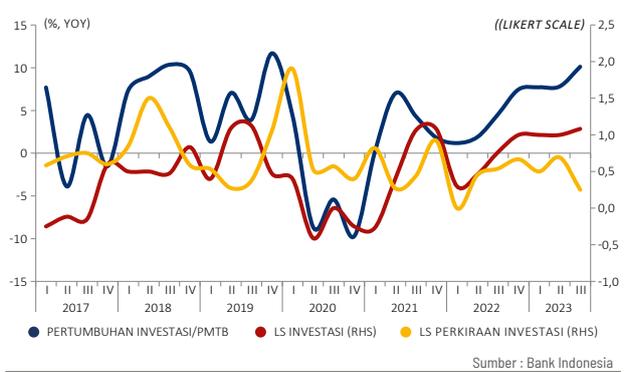
Grafik 1.7 Perkembangan Realisasi APBD Wilayah Kepri



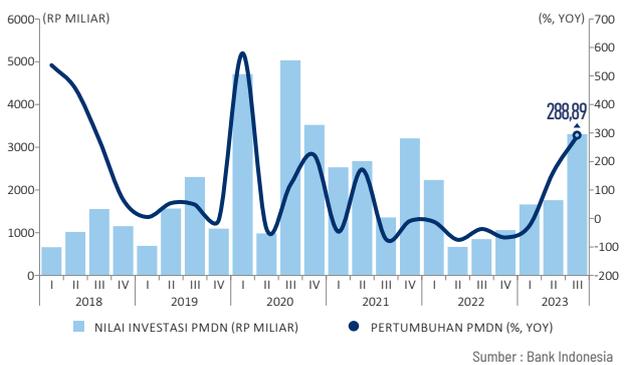
Grafik 1.8 Simpanan Pemerintah Daerah pada Perbankan

1.1.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB

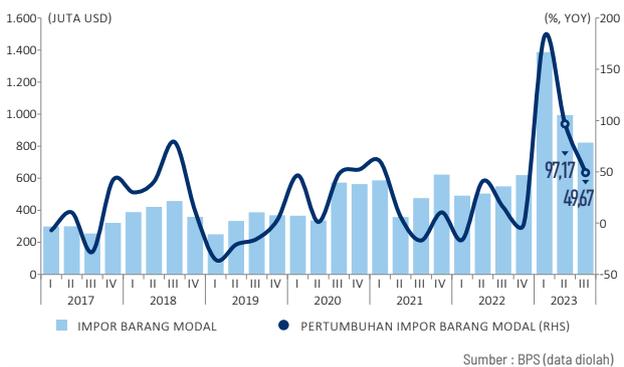
PMTB atau investasi di Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 tumbuh tinggi sebesar 10,12% (yoy) dan menguat dibandingkan triwulan sebelumnya 7,81% (yoy). Peningkatan tersebut terkonfirmasi dari perkiraan *likert scale* investasi hasil liaison terhadap sejumlah perusahaan di Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 yang bertahan di level positif, sementara *likert scale* investasi hasil liaison cenderung stabil. Selain itu, akselerasi PMTB disebabkan oleh peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari sebelumnya terkontrak sebesar 25,68% (yoy) menjadi tumbuh sebesar 288,89% (yoy) pada triwulan III 2023. Meskipun demikian, peningkatan investasi tertahan oleh pertumbuhan impor barang modal sebesar 49,67% (yoy) yang lebih rendah dibandingkan pada triwulan II 2023 sebesar 97,17% (yoy). Peningkatan PMTB tersebut didorong oleh realisasi belanja modal pemerintah untuk khususnya pembangunan infrastruktur.



Grafik 1.9 Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)



Grafik 1.10 Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)



Grafik 1.11 Perkembangan Impor Barang Modal

1.1.4. Kegiatan Ekspor-Impor

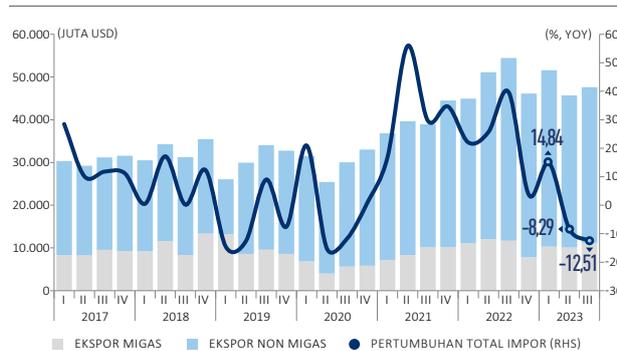
PDRB net ekspor Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 berkontraksi sebesar 0,36% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,56% (yoy). Hal tersebut didorong oleh peningkatan impor yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor. Pertumbuhan total ekspor mengalami peningkatan dari sebelum berkontraksi sebesar 6,14% (yoy) menjadi berkontraksi sebesar 1,96% (yoy). Nilai total ekspor luar negeri dari Provinsi Kepri (migas dan nonmigas) pada triwulan III 2023 berkontraksi sebesar 12,51% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 8,29% (yoy). Penurunan ekspor utamanya disebabkan oleh ekspor non migas yang masih mengalami kontraksi dari sebesar 8,94% (yoy) pada triwulan sebelumnya dan berkontraksi lebih dalam menjadi 14,64% (yoy) pada triwulan III 2023 sebagai dampak perlambatan permintaan. Sementara itu, perbaikan ekspor terutama bersumber dari migas yang berkontraksi dari sebesar 15,88% (yoy) pada triwulan II 2023 menjadi berkontraksi sebesar 4,73% (yoy) pada triwulan III 2023 sebagai dampak dari penurunan produksi migas di Kabupaten Kepulauan Anambas dan penurunan produksi granit di Kabupaten Karimun. Adapun pangsa nonmigas masih mendominasi ekspor Provinsi Kepri dengan pangsa sebesar 78,45%, sedangkan ekspor migas memiliki pangsa sebesar 24,11%.

Penurunan kinerja ekspor nonmigas Provinsi Kepri terutama disebabkan oleh penurunan ekspor produk elektronik dan produk olahan CPO. Nominal ekspor produk elektronik pada triwulan III 2023 tercatat berkontraksi sebesar 12,09% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,40% (yoy). Salah satu penyebab penurunan tersebut adalah berkurangnya permintaan industri

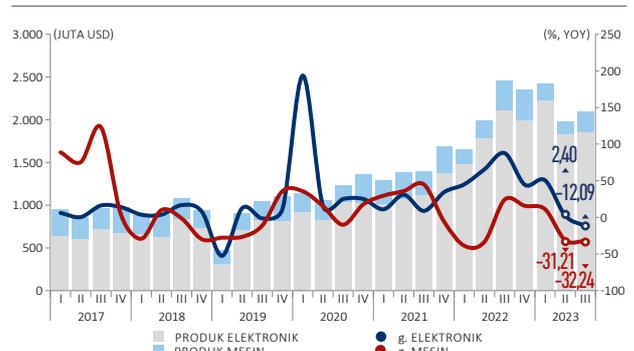
elektronik dari negara tujuan utama ekspor yakni Singapura dan Amerika Serikat. Kondisi tersebut sejalan dengan *Index of Industrial Production (IIP)* Singapura untuk peralatan elektronik yang pada triwulan III 2023 berada pada level yang lebih rendah yakni sebesar 99,99 dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 122,19.

Sejalan dengan ekspor luar negeri, pertumbuhan nominal impor dari luar negeri ke Provinsi Kepri juga tercatat mengalami perlambatan namun tidak sedalam penurunan ekspor. Total impor Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 berkontraksi 2,10% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 7,57% (yoy). Kenaikan impor tersebut berasal dari kenaikan impor dari wilayah Indonesia lainnya di luar Kepri. Sementara itu, total nilai impor luar negeri tumbuh sebesar 3,94% (yoy) pada triwulan III, lebih rendah dari sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,55% (yoy). Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan impor komoditas nonmigas yang memiliki pangsa 82,55% dari total impor luar negeri. Nilai impor nonmigas dari luar negeri pada triwulan III 2023 berkontraksi sebesar 2,36% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,11% (yoy).

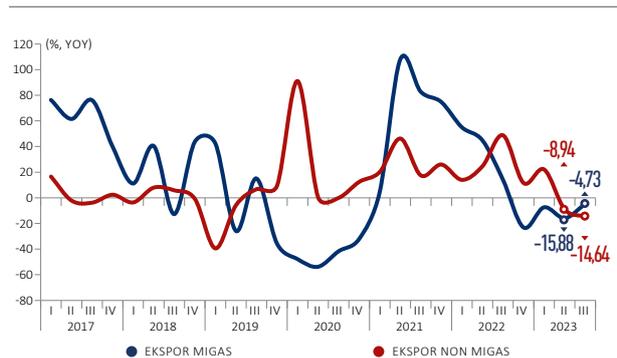
Menurut penggunaannya, pada triwulan III 2023, impor nonmigas dari luar negeri tersebut terdiri bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi dengan pangsa masing-masing 69,52%, 23,55%, dan 6,93%. Impor bahan baku mengalami pertumbuhan dari sebelumnya berkontraksi sebesar 34,22% (yoy) menjadi berkontraksi sebesar 19,71% (yoy) pada triwulan III 2023 sejalan dengan pola aktivitas industri yang meningkatkan inventori untuk kebutuhan produksi selama beberapa bulan mendatang. Demikian halnya impor barang konsumsi tumbuh sebesar 44,71% (yoy), ditengarai oleh peningkatan pembelian barang



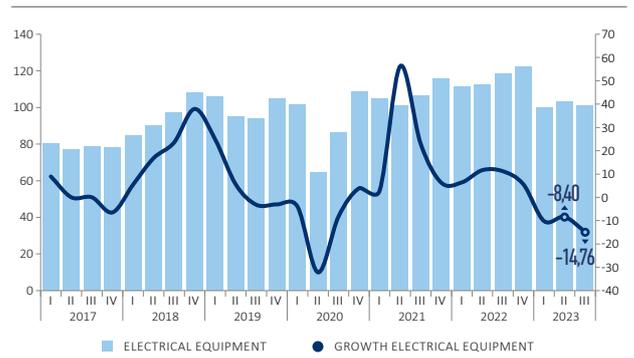
Grafik 1.12 Perkembangan Ekspor Total Luar Negeri



Grafik 1.14 Perkembangan Ekspor Produk Elektronik dan Olahan CPO

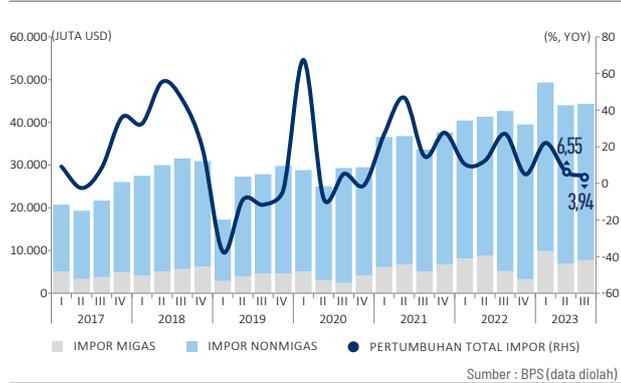


Grafik 1.13 Perkembangan Ekspor Komoditas Nonmigas dan Migas

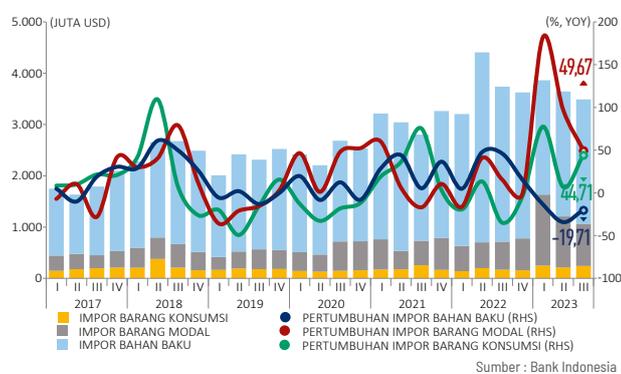


Grafik 1.15 Index of Industrial Production (IIP) Singapura

konsumsi oleh masyarakat. Sementara itu, impor barang modal tumbuh melambat dari sebesar 97,17% (yoy) menjadi tumbuh sebesar 49,67% (yoy) disebabkan oleh sebagian industri yang masih menunda penambahan investasi dalam rangka optimalisasi kapasitas.



Grafik 1.16 Perkembangan Impor



Grafik 1.17 Perkembangan Impor Nonmigas - BEC

1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN LAPANGAN USAHA

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pembangunan masif terus yang berlanjut pada triwulan III 2023 mampu mendorong kinerja sektor terkait. Meskipun demikian, kinerja positif ekonomi Kepri pada triwulan III 2023 didorong oleh peningkatan kinerja pada empat LU Utama yaitu Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, Industri Pengolahan dan Konstruksi. Sementara itu, pertumbuhan tertahan oleh kinerja LU Transportasi dan Pergudangan, Penyedia Akmamin, dan Infokom yang tumbuh melambat sejalan dengan perlambatan permintaan.

Secara struktur, perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 masih didominasi oleh LU Industri Pengolahan dengan pangsa 39,44%. Pangsa terbesar kedua yakni LU Konstruksi sebesar 20,83%, diikuti LU Pertambangan dan Penggalian, serta LU



Grafik 1.18 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)

Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha

PDRB SISI LAPANGAN USAHA	2020					2021					2022					2023			ARAH TW
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,62	-6,16	-6,60	-6,61	-4,39	-15,45	0,79	2,78	2,82	-2,65	3,00	3,53	2,41	5,19	3,55	4,67	-2,44	-6,20	▼
Pertambangan dan Penggalian	-0,96	-3,95	-1,75	-9,60	-4,17	-6,98	3,41	-2,20	3,80	-0,74	-7,05	8,37	-4,06	-22,89	-7,00	-14,87	-0,51	3,69	▲
Industri Pengolahan	4,29	1,34	0,93	6,50	3,25	7,33	7,61	3,79	7,13	6,45	4,16	2,28	4,87	6,73	4,55	7,77	-0,27	0,62	▲
Pengadaan Listrik, Gas	1,92	-5,01	-7,41	-6,62	-4,38	0,61	1,76	6,31	8,61	4,32	10,93	18,53	17,62	18,35	16,38	12,08	11,03	7,05	▼
Pengadaan Air	0,15	-11,07	-5,75	7,72	-2,78	0,68	5,09	-7,00	1,69	0,01	-0,71	3,27	24,05	9,31	8,82	11,53	-3,28	0,07	▲
Konstruksi	4,70	-11,41	-8,59	-9,24	-6,40	0,05	9,42	8,75	1,40	4,74	0,69	-0,01	2,89	17,95	5,45	7,53	10,48	13,89	▲
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,81	-11,03	-21,10	-18,89	-12,72	-17,16	-1,96	11,88	15,60	1,07	19,19	21,77	7,38	6,97	13,59	5,11	2,19	10,03	▼
Transportasi dan Pergudangan	-7,21	-62,78	-45,88	-40,84	-40,23	-30,67	56,21	-16,19	14,69	-1,70	19,06	32,43	81,05	31,11	38,37	33,07	21,77	9,94	▼
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-19,59	-57,37	-43,74	-40,26	-41,01	-18,27	21,64	-27,51	5,92	-6,69	5,02	45,32	98,36	60,29	49,71	82,70	44,71	13,28	▼
Informasi dan Komunikasi	5,58	17,17	19,47	23,85	16,55	19,46	7,02	7,00	6,21	9,59	6,04	-12,43	16,53	23,58	8,66	24,53	51,60	13,91	▼
Jasa Keuangan	-1,22	-4,86	-5,07	-1,17	-3,10	-0,21	4,37	1,64	-2,74	0,73	4,96	-3,68	5,13	10,49	4,17	4,94	12,83	7,99	▼
Real Estate	2,59	-9,65	-11,22	-14,88	-8,33	-14,66	-0,62	0,88	1,95	-3,56	1,01	2,55	5,67	9,25	4,64	11,35	7,51	2,63	▼
Jasa Perusahaan	-31,07	-52,56	-51,56	-33,68	-41,88	-11,60	41,22	36,52	7,83	14,14	0,73	3,86	18,47	18,73	10,65	34,00	27,36	9,84	▼
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,95	3,06	11,07	11,80	7,97	-9,24	3,89	-22,10	-6,61	-8,42	-9,65	13,54	8,62	-1,06	3,36	8,03	3,39	-3,21	▼
Jasa Pendidikan	2,20	-11,85	-11,06	-11,90	-8,20	-11,43	3,77	-3,85	-0,72	-3,38	-1,00	2,44	6,01	5,85	3,32	8,82	7,44	-0,54	▼
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,28	-8,94	3,18	-3,16	-2,05	12,45	31,04	5,04	4,51	12,30	0,39	-11,55	4,94	6,15	-0,02	6,21	-7,37	-23,87	▼
Jasa lainnya	-30,69	-96,12	-79,17	-66,95	-68,83	-45,07	637,66	16,27	-8,83	-3,40	6,73	140,12	94,80	58,95	69,97	37,38	8,79	27,56	▲
PERTUMBUHAN PDRB	2,02	-6,81	-5,81	-4,46	-3,80	-1,19	6,90	2,97	5,27	3,43	2,83	5,01	6,03	6,40	5,09	6,51	5,04	4,88	▼

▲ Menguat
▼ Melambat

Sumber: BPS (data diolah)



Perdagangan Besar dan Eceran masing-masing sebesar 11,64% dan 9,32%. Pertumbuhan LU Industri Pengolahan mengalami perbaikan sejalan dengan permintaan global terhadap produk elektronik yang tercermin dari peningkatan *output forecast* dari Singapura untuk industri manufaktur. Peningkatan pertumbuhan LU Konstruksi didorong oleh pembangunan infrastruktur yang masif menjelang akhir tahun. Pertumbuhan LU Perdagangan Besar dan Eceran dipengaruhi oleh masih tingginya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Kepulauan Riau. Sementara itu, peningkatan kinerja pada LU Pertambangan dan Penggalian banyak didorong oleh peningkatan harga minyak global sebagai insentif bagi produsen untuk meningkatkan produksinya.

1.2.1 Lapangan Usaha Industri Pengolahan

LU Industri Pengolahan pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 0,62% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 0,27% (yoy) dan memberikan andil 0,26% terhadap pertumbuhan Provinsi Kepri. Peningkatan pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan tersebut terkonfirmasi dari PDRB total ekspor yang mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan IIP Total Singapura yang meningkat. Selain itu, peningkatan kinerja industri pengolahan juga tercermin dari data kredit pada sektor industri pengolahan yang mengalami pertumbuhan sebesar 23,56% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan II 2023 sebesar 7,31% (yoy). Meskipun demikian, ekspor non migas serta kinerja industri pengolahan tergolong masih relatif rendah yang disebabkan perlambatan permintaan barang dari mitra dagang utama sejalan dengan ketidakpastian global yang meningkat.



Sumber: www.singstat.gov.sg (data diolah)
Grafik 1.19 Index of Industrial Production (IIP) Singapura untuk Machinery & Equipment

1.2.2 Lapangan Usaha Industri Pengolahan

LU Konstruksi pada triwulan III 2023 tetap tumbuh dan mencatatkan andil pertumbuhan tertinggi terhadap PDRB Provinsi Kepri. LU Konstruksi pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 13,89% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,48% (yoy). Pertumbuhan kinerja LU Konstruksi terkonfirmasi dari pengadaan/penjualan semen yang terakselerasi dari triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 23,30% (yoy) menjadi sebesar 25,72% (yoy) pada triwulan III 2023. Selain itu, kredit perbankan untuk LU Konstruksi di Provinsi Kepri membaik sejalan dengan pertumbuhan kredit dari yang terkontraksi sebesar 5,07% (yoy) menjadi terkontraksi sebesar 4,45% (yoy). Pertumbuhan LU Konstruksi tersebut memberikan andil tertinggi sebesar 2,56% terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri. Hal tersebut sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur yang cukup masif dan masih tingginya aktivitas investasi perusahaan di Provinsi Kepri.

1.2.3. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor

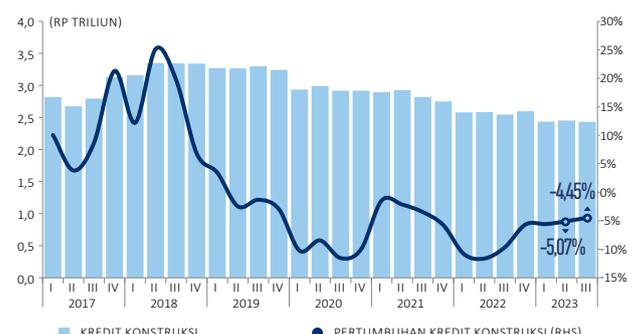
Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan III 2023 tumbuh terakselerasi sebesar 10,03% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,19% (yoy). Peningkatan tersebut seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Akselerasi pertumbuhan pada LU Perdagangan juga tercermin dari pertumbuhan kredit perseorangan terutama kredit multiguna yang tumbuh sebesar 1,33% (yoy), lebih baik dari sebelumnya sebesar 0,89% (yoy). Selain itu, peningkatan tersebut juga terkonfirmasi dari



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (data diolah)
Grafik 1.21 Perkembangan Pengadaan/Penjualan Semen



Sumber: Bank Indonesia
Grafik 1.20 Perkembangan Kredit Industri Pengolahan



Sumber: Bank Indonesia
Grafik 1.22 Perkembangan Kredit Konstruksi

Survei Penjualan Eceran yang mengalami pertumbuhan sebesar 102,15% (yoy), lebih baik dari sebelumnya yang tumbuh sebesar 25,77% (yoy). Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat dan pelaku usaha cukup optimis melihat kondisi ekonomi ke depan namun masih waspada dalam konsumsi.



Grafik 1.23 Kredit Perorangan Multiguna



Grafik 1.24 Kredit Perdagangan Besar dan Eceran

1.2.4 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Pada triwulan III 2023 kinerja LU Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 3,69% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 0,51% (yoy). Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian terus tumbuh membaik dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan pengoperasian sumur produksi baru migas di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas. Selain itu, kinerja LU Pertambangan dan Penggalian juga didorong oleh sisi harga minyak yang terus mengalami peningkatan sehingga menjadi insentif bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S). Harga minyak dunia berlanjut meningkat dari sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 32,12% (yoy) menjadi terkontraksi sebesar 9,29% (yoy) pada triwulan III 2023.



Grafik 1.25 Perkembangan Harga Minyak Dunia





BOKS 1

LAPORAN LIAISON TRIWULAN III 2023 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau melakukan liaison kepada sejumlah responden dari berbagai sektor ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk mendapatkan gambaran perkembangan perekonomian Provinsi Kepri. Sektor ekonomi yang menjadi fokus pada triwulan III 2023 terdiri dari Industri Pengolahan (58,3%), Konstruksi (8,3%), Perdagangan Besar dan Eceran (16,7%), serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (16,7%). Ruang lingkup analisa laporan liaison mencakup permintaan domestik dan ekspor, kapasitas utilitas, persediaan, investasi, biaya, harga jual dan margin, tenaga kerja, pembiayaan serta prakiraan kondisi di masa yang akan datang.

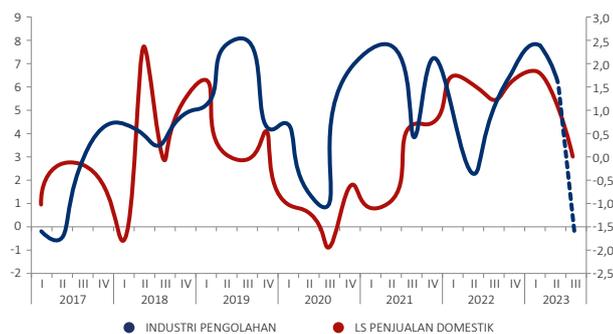
Dari sisi **permintaan domestik** di wilayah Provinsi Kepri, produksi dan penjualan domestik mengalami penurunan tercermin dari nilai *likert* sebesar 0,00, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2023 sebesar 1,00 (Grafik B1.1). Secara umum, kinerja penjualan/produksi domestik di wilayah Kepri mengalami perlambatan terutama pada sektor industri pengolahan. Perlambatan pada sektor industri pengolahan disebabkan oleh penurunan permintaan dari konsumen. Penurunan signifikan terjadi pada industri manufaktur karena perusahaan hanya mengerjakan proyek dengan nilai relatif kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, penurunan yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan penjualan domestik sektor perdagangan besar dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai dampak peningkatan kunjungan wisatawan pada libur sekolah dan permintaan dari instansi/lembaga pemerintahan untuk kegiatan *meeting*.

Sementara itu, kinerja **penjualan ekspor** dan prakiraan penjualan mengalami peningkatan tercermin dari nilai *likert scale* sebesar 0,20, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar -0,30 (Grafik B1.2). Peningkatan ini terutama terjadi di sektor industri pengolahan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Peningkatan

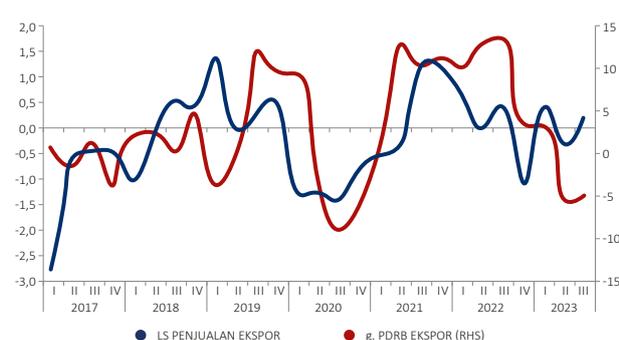
penjualan sektor industri pengolahan didorong oleh *carry over* proyek yang tertunda pada masa Covid dan meningkatnya aktivitas eksplorasi gas alam dan minyak di dunia. Kinerja sektor konstruksi juga mengalami peningkatan didorong permintaan dari *tenant* kawasan industri. Selain itu, kinerja sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum mengalami peningkatan seiring meningkatnya kunjungan wisatawan pada libur sekolah dan kunjungan grup ibadah yang sempat tertunda selama pandemi Covid.

Rata-rata tingkat **kapasitas utilisasi** dari perusahaan yang menjadi kontak pada periode laporan tercatat sebesar 80,23%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 79,23%. Peningkatan ini juga tercermin dari peningkatan *likert scale* sebesar 0,08, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,00. Peningkatan terutama terjadi pada sektor industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta perdagangan besar dan eceran. Peningkatan pada sektor industri pengolahan didorong oleh peningkatan permintaan. Kapasitas utilisasi pada sektor konstruksi meningkat seiring dengan pengembangan luas area untuk fase pembangunan. Pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, peningkatan didorong oleh peningkatan kapasitas kamar dibandingkan periode sebelumnya. Sektor perdagangan besar dan eceran menginformasikan kapasitas utilitas perusahaan sudah mencapai 100%.

Di sisi lain, **persediaan** mengalami peningkatan tercermin dari *likert scale* sebesar 0,42, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -0,08. Peningkatan persediaan terutama terjadi pada sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Pada sektor industri pengolahan, persediaan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan permintaan sehingga perusahaan menyesuaikan persediaan sesuai



Grafik B1.1 LS Penjualan Domestik dan PDRB Industri Pengolahan

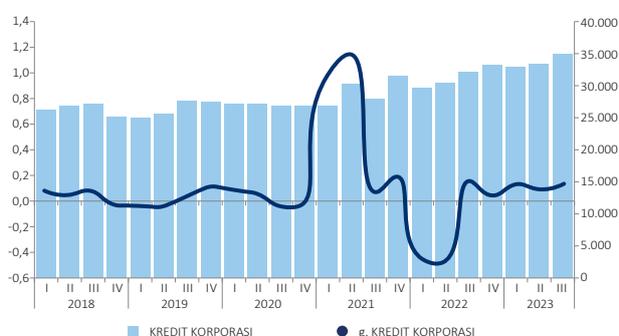


Grafik B1.2 LS Ekspor dan Proyeksi PDRB Ekspor

dengan kebutuhan proyek yang dikerjakan. Selanjutnya, tingkat persediaan pada sektor perdagangan besar dan eceran mengalami peningkatan seiring meningkatnya permintaan. Pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, peningkatan persediaan sejalan dengan meningkatnya permintaan sehingga perusahaan melakukan pembelian *amenities* dengan *level inventory* selama 2 bulan untuk efisiensi biaya pengiriman.

Secara umum, **investasi** pada periode laporan meningkat yang tercermin dari *likert scale* sebesar 1,08, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,00. Investasi perusahaan mengalami peningkatan pada sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta penyediaan akomodasi, makan dan minum. Investasi perusahaan pada sektor industri pengolahan mengalami peningkatan seiring pembelian mesin untuk *line* produksi baru, peningkatan efisiensi kinerja perusahaan dengan *upgrade* mesin, serta pembelian peralatan testing untuk meningkatkan kualitas produksi. Sementara itu, investasi pada sektor konstruksi berupa penambahan *power plant* untuk meningkatkan fasilitas daya listrik kawasan. Peningkatan investasi sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum serta perdagangan besar dan eceran berupa renovasi gedung dan *re-launching* didorong oleh mobilitas masyarakat yang terus meningkat sejalan dengan jumlah wisatawan yang semakin meningkat.

Secara umum, **variabel biaya** mengalami peningkatan terutama pada komponen biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Komponen biaya bahan baku mengalami peningkatan didorong oleh kenaikan harga komoditas internasional dan beberapa harga komoditas pangan untuk sektor perdagangan besar dan eceran serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Peningkatan biaya bahan baku tercermin pada peningkatan harga komoditas timah dan cocoa sebagai bahan baku industri elektronik dan coklat. Biaya tenaga kerja mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan UMK di tahun 2023. Namun demikian, komponen biaya energi cenderung menurun sejalan dengan kebutuhan listrik yang menurun.

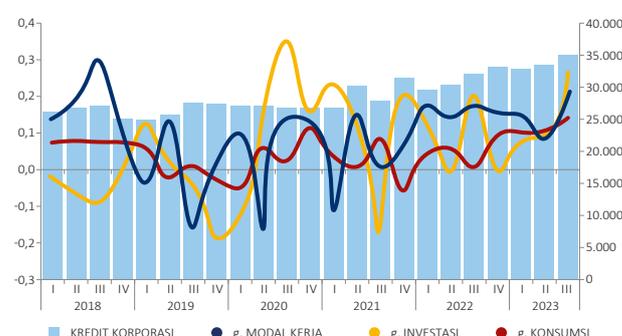


Grafik B1.3 Kredit Korporasi

Secara umum, **harga jual** pada triwulan III 2023 meningkat dibandingkan tahun lalu terutama pada sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta penyediaan akomodasi dan makan minum yang dipengaruhi oleh adanya kenaikan biaya produksi yang direspon perusahaan dengan menyesuaikan harga jual untuk menahan penurunan margin. Pada sektor industri pengolahan, penetapan harga jual pada umumnya dilakukan dengan menerapkan *cost plus margin*. Peningkatan harga jual pada sektor konstruksi disesuaikan dengan luasan *tenant* dan kontrak dari perusahaan serta dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi ekonomi. Pada sektor perdagangan besar dan eceran, harga jual mengalami peningkatan didorong kenaikan harga transportasi. Sementara itu, pada sektor penyediaan akomodasi makan dan minum, peningkatan harga jual disebabkan meningkatnya harga dari *headquarter*.

Jumlah **tenaga kerja** mengalami penurunan sejalan dengan efisiensi yang dilakukan perusahaan seiring dengan meningkatnya biaya tenaga kerja setiap tahun. Penurunan tenaga kerja terjadi terutama pada sektor industri pengolahan yang disebabkan oleh efisiensi dan penambahan mesin produksi.

Secara umum pembiayaan pada perusahaan multinasional menggunakan dana internal atau dari *headquarter*. Sedangkan, kontak yang merupakan perusahaan domestik, menggunakan dua alternatif pembiayaan, yaitu dari internal perusahaan atau pinjaman dari perbankan. Sebagian besar perusahaan *liaison* pada triwulan III 2023 menginformasikan pembiayaan diperoleh dari pembiayaan internal. Jumlah penyaluran pembiayaan/kredit perbankan di Kepri khususnya pada segmen korporasi mengalami peningkatan sebesar 0,12% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,09% (yoy) (Grafik B1.3). Hal ini juga tercermin dari peningkatan kredit korporasi terutama kredit modal kerja dan kredit investasi (Grafik B1.4).



Grafik B1.4 Kredit Modal Kerja, Investasi, & Konsumsi

TEMU RESPONDEN BANK INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023: SINERGI PENINGKATAN ENGAGEMENT BANK INDONESIA DENGAN RESPONDEN SURVEI DAN LIAISON

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan Temu Responden Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 dengan tema “*Optimizing the Potential of Economic Growth using Data, Survey, and Inclusive Digital Ecosystem*” pada tanggal 20 Oktober 2023 di Kota Batam. Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau sebagai representasi Bank Indonesia di daerah secara rutin melaksanakan survei dan liaison atau wawancara untuk memperoleh data dan informasi terkini mengenai dinamika aktual di tingkat pelaku usaha.

Data dan informasi yang diperoleh dari responden dan pelaku usaha akan diolah dan dianalisis untuk mendukung perumusan kebijakan di Kantor Pusat Bank Indonesia maupun sebagai masukan dalam

perumusan kebijakan di daerah, baik terkait pengendalian inflasi maupun pengembangan ekonomi dan keuangan di daerah. Perumusan kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung tujuan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, yang ditopang oleh 3 tugas pokok Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan.

Acara Temu Responden merupakan kegiatan rutin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau yang bertujuan untuk meningkatkan *engagement* dan silaturahmi antara Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau dengan seluruh responden survei sekaligus sebagai wujud terima kasih kepada responden atas dukungan, partisipasi dan kerjasama dalam pelaksanaan survei selama tahun 2023.



Gambar B1.1 Peserta Acara Temu Responden 2023



Gambar B1.2 Penampilan Guest Star Acara Temu Responden



BAB II

Perkembangan Keuangan Daerah

Realisasi Pendapatan Pemda Wilayah Kepri



Tw III
2023

67,33%
Rp 9,27T

Tw III
2022

66,70%
Rp 8,55T



Realisasi Belanja Pemda Wilayah Kepri



Tw III
2023

57,92%
Rp 8,38T

Tw III
2022

55,94%
Rp 6,40T



Realisasi Belanja APBN



Tw III
2023

56,82%
Rp 5,15T

Tw III
2022

55,57%
Rp 3,69T



Realisasi Belanja Infrastruktur APBN



Tw III
2023

36,51%
Rp 955,05M

Tw III
2022

30,47%
Rp 361,61M



Realisasi pendapatan Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga triwulan III 2023 tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu disebabkan oleh realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Sementara itu, realisasi belanja pemerintah tercatat meningkat yaitu pada pos belanja operasi dan belanja transfer



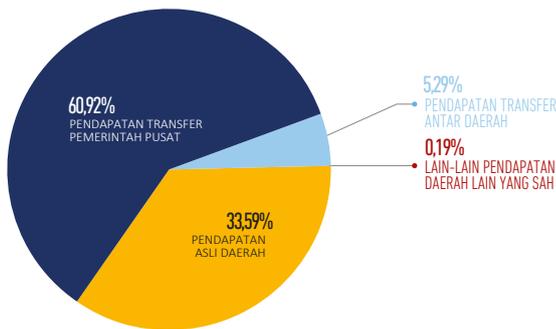
Realisasi pendapatan Pemda di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan III 2023 tercatat sebesar 67,33%, sementara realisasi belanja mencapai 57,92% dari total anggaran. Realisasi pendapatan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 66,70%. Peningkatan pendapatan terutama terjadi pada semua pos Pendapatan Asli Daerah, pos Pendapatan Transfer Antar Daerah, dan pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara itu, realisasi belanja mengalami peningkatan dari 55,94% di triwulan III 2022 menjadi sebesar 57,92% di triwulan III 2023 sedikit lebih tinggi, disebabkan kenaikan belanja operasi khususnya belanja subsidi dan belanja transfer berupa belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

2.1 REALISASI PENDAPATAN

Realisasi pendapatan seluruh Pemda di wilayah Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 mencapai 67,33% dari total anggaran atau sebesar Rp9,27 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yang mencapai 66,70% dari total anggaran atau

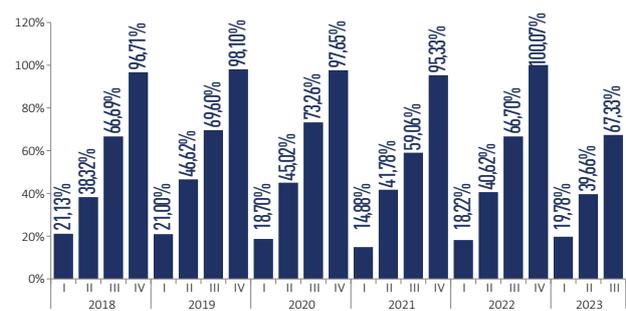
Rp8,55 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatkannya realisasi dari pos Pendapatan Asli Daerah dari sebesar 66,27% pada triwulan III 2022 menjadi 72,65%, serta meningkatnya realisasi dari pos Pendapatan Transfer Antar Daerah dari sebesar 66,97% pada triwulan III 2022 menjadi 70,94% pada triwulan III 2023, dan pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari sebesar 48,59% pada triwulan III 2022 menjadi 57,03% pada triwulan III 2023.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada seluruh Pemda di Provinsi Kepri hingga triwulan III 2023 tercatat sebesar Rp5,65 triliun atau 64,48% dari pagu anggaran, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp5,43 triliun atau 66,98% dari pagu anggaran. Penurunan tersebut berasal dari seluruh pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat seperti Dana Perimbangan yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik/Non Fisik, serta Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tersebut disebabkan oleh penyiapan syarat penyaluran DAU spesifik tahap dua



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Triwulan III 2023



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Triwulan III 2023

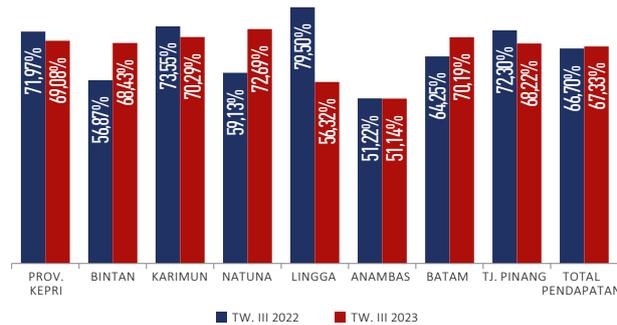
Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan III 2023

JENIS ANGGARAN	ANGGARAN		REALISASI		Porsi (%)
	Rp	Struktur (%)	Rp	Realisasi (%)	
Pendapatan Asli Daerah	4.289,46	31,14%	3.116,46	72,65%	33,59%
Pajak Daerah	3.421,50	24,84%	2.599,50	75,98%	
Retribusi Daerah	233,26	1,69%	124,33	53,30%	
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	61,77	0,45%	35,86	58,06%	
Lain-lain PAD yang Sah	572,92	4,16%	356,77	62,27%	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.763,95	63,61%	5.651,32	64,48%	60,92%
Dana Perimbangan	8.483,03	61,57%	5.461,58	64,38%	
Dana Insentif Daerah (DID)	63,13	0,46%	52,75	83,55%	
Dana Desa	217,79	1,58%	137,00	62,90%	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	691,92	5,02%	490,85	70,94%	5,29%
Pendapatan Bagi Hasil	685,72	4,98%	489,85	71,44%	
Bantuan Keuangan	6,20	0,05%	1,00	16,13%	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	31,49	0,23%	17,96	57,03%	0,19%
Hibah	7,12	0,05%	0,64	8,98%	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	24,37	0,18%	17,32	71,07%	
TOTAL PENDAPATAN	13.776,81	100,00%	9.276,59	67,33%	

Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (diolah)

oleh pemerintah daerah dan juga adanya proses verifikasi sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun sebelumnya untuk satuan pendidikan penerima dana yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) daerah.

Berdasarkan wilayah kewenangan, persentase realisasi pendapatan tertinggi dicapai Pemerintah Kabupaten Natuna dengan persentase sebesar 72,69% dari total anggaran. Pencapaian persentase realisasi



Sumber: BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Pada Masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri

tertinggi berikutnya yakni Kabupaten Karimun dan Kota Batam masing-masing sebesar 70,29% dan 70,19% dari pagu anggaran tahun ini. Namun secara nominal jumlah pendapatan tertinggi dicapai oleh Kota Batam dengan nominal Rp2,2 Triliun.

2.2 REALISASI BELANJA

Realisasi belanja Pemda di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan III 2023 tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas pembangunan dan perekonomian di Kepri yang dipengaruhi oleh semakin membaiknya mobilitas masyarakat seiring dengan kasus Covid-19 yang semakin terkendali. Realisasi belanja Pemda hingga triwulan III 2023 telah mencapai 57,92% dari pagu anggaran atau sebesar Rp8,38 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang hanya mencapai 55,94% atau sebesar Rp6,40 triliun. Peningkatan realisasi belanja terjadi pada pos belanja operasi khususnya belanja subsidi dan belanja transfer berupa belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan III 2023

JENIS ANGGARAN	ANGGARAN		REALISASI		Porsi (%)
	Rp	Struktur (%)	Rp	Realisasi (%)	
Belanja Operasi	10.740,90	77,00%	6.548,94	60,97%	78,18%
Belanja Pegawai	5.043,48	36,16%	3.436,62	68,14%	
Belanja Barang dan Jasa	4.946,57	35,46%	2.711,18	54,81%	
Belanja Bunga	13,14	0,09%	6,75	51,39%	
Belanja Subsidi	2,10	0,02%	1,81	86,22%	
Belanja Hibah	721,71	5,17%	387,94	53,75%	
Belanja Bantuan Sosial	13,90	0,10%	4,62	33,27%	
Belanja Modal	2.455,59	17,60%	969,63	39,49%	11,58%
Belanja Modal Tanah	12,76	0,09%	2,86	22,44%	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	498,32	3,57%	196,39	39,41%	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	706,03	5,06%	228,37	32,35%	
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.201,17	8,61%	519,83	43,28%	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35,06	0,25%	21,37	60,95%	
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2,25	0,02%	0,80	35,60%	
Belanja Tidak Terduga	51,71	0,37%	8,33	16,12%	0,10%
Belanja Transfer	1.212,66	8,69%	849,36	70,04%	10,14%
Belanja Bagi Hasil	679,43	4,87%	523,64	77,07%	
Belanja Bantuan Keuangan	533,23	3,82%	325,72	61,08%	
TOTAL BELANJA	14.460,87	103,67%	8.376,26	57,92%	
SURPLUS/DEFISIT	-684,06		900,33		
Pembiayaan Neto	683,80		502,79		
Penerimaan Pembiayaan Daerah	770,77		548,38		
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	86,97		45,59		
SILPA TAHUN BERKENAAN	-0,25		1.403,12		

Sumber: BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (diolah)

Realisasi belanja operasi tercapai sebesar 60,97% dari pagu anggaran atau tercatat sebesar Rp6,55 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 59,77% dari pagu anggaran atau sebesar Rp5,96 triliun.

Jika dirinci lebih lanjut, belanja pegawai sampai dengan triwulan III 2023 tercapai 68,14% atau sebesar Rp3,44 triliun, lebih tinggi dibanding triwulan yang sama tahun lalu yakni sebesar 67,70%. Selain itu, belanja barang dan jasa mengalami kenaikan realisasi menjadi 54,81% dari sebesar 53,66% pada triwulan III 2022. Demikian pula dengan, belanja hibah terealisasi 53,75% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 47,90%.

Realisasi belanja juga didorong oleh kenaikan realisasi belanja transfer bagi hasil retribusi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa serta belanja bantuan keuangan kepada Desa. Realisasi belanja transfer tercapai 70,04% dari pagu anggaran atau sebesar Rp849,36 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercapai 70,19% atau sebesar Rp716,33 miliar. Peningkatan ini didorong oleh bertambahnya penerimaan pada pos pajak dan retribusi daerah yang di dalamnya terdapat komponen bagi hasil daerah seperti pajak kendaraan bermotor, dan pajak BBM.

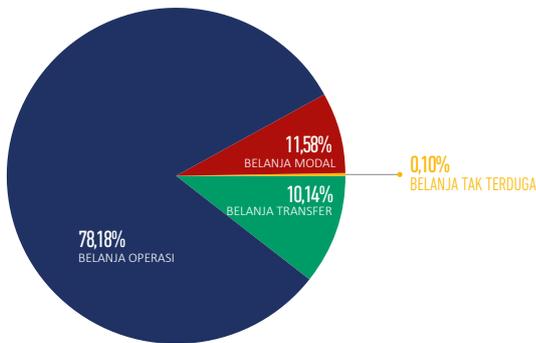
Di sisi lain, penyerapan pos belanja modal pada triwulan III 2023 mencapai 39,49% atau sebesar Rp969,63 triliun dari pagu anggaran, lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 36,98% dari pagu anggaran atau Rp862,32 miliar. Hal ini disebabkan karena kegiatan pembangunan gedung, bangunan,

jalan, irigasi serta jaringan yang hampir selesai, sehingga terjadi peningkatan realisasi di triwulan III 2023.

Berdasarkan wilayah administrasi, Pemda dengan tingkat pencapaian persentase realisasi belanja tertinggi sampai dengan triwulan III 2023 yakni Kota Batam yang mencapai 63,70% dari total anggaran atau sebesar Rp2,10 triliun. Selanjutnya, tingkat capaian persentase realisasi belanja diikuti Kota Tanjungpinang yang mencapai 61,82% atau sebesar Rp650,44 miliar dan Kabupaten Natuna yang mencapai 60,63% atau sebesar Rp665,58 miliar. Adapun secara komposisi keseluruhan, persentase realisasi belanja tertinggi pada triwulan III 2023 berasal dari Belanja Operasi yang mencapai 78,18% dari keseluruhan realisasi belanja daerah.

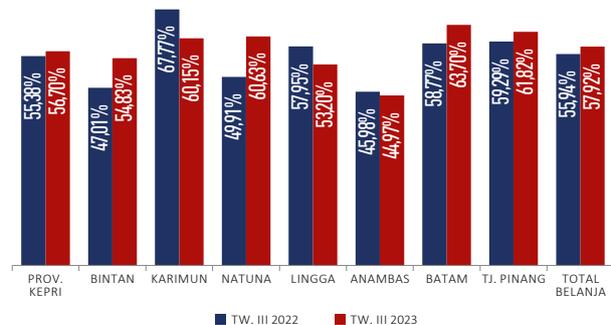
2.3 ANGGARAN DAN REALISASI APBN DI WILAYAH KEPRI

Secara keseluruhan, pagu pendapatan APBN Provinsi Kepri pada tahun 2023 tercatat mengalami penurunan menjadi Rp11,47 triliun dari Rp12,04 triliun pada tahun 2022, terutama dari penurunan pagu penerimaan perpajakan. Sementara, pagu belanja APBN di Provinsi Kepri pada 2023 tercatat mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar Rp15,71 triliun pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp17,85 triliun pada tahun 2023 atau naik 13,62%. Peningkatan pagu anggaran terjadi pada hampir semua pos belanja seperti pos belanja pegawai, barang, modal, dan bansos. Pagu anggaran pendapatan dan belanja tahun 2023 meningkat, hal ini sejalan dengan optimisme peningkatan kinerja ekonomi Kepri.



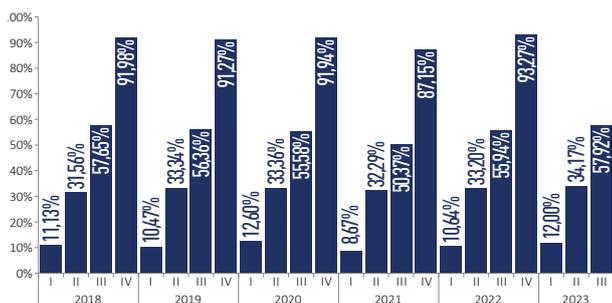
Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.4 Komposisi Realisasi Belanja Triwulan III 2023



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.6 Realisasi Belanja pada Masing-Masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Triwulan III 2023

Tabel 2.3 Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN Wilayah Provinsi Kepri

NO	Jenis Belanja	Triwulan III 2022			Triwulan III 2023		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Pegawai	1.768,13	1.386,09	78,39%	2.129,77	1.534,93	72,07%
2	Barang	3.182,33	1.708,11	53,67%	3.974,86	2.505,26	63,03%
3	Modal	1.437,46	478,32	33,28%	2.706,65	988,22	36,51%
4	Bansos	2,55	1,89	74,09%	4,60	2,93	63,75%
5	Lain-Lain	248,64	114,83	46,18%	246,44	117,89	47,84%
TOTAL		6.639,12	3.689,24	55,57%	9.062,32	5.149,23	56,82%

Sumber: Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2023, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri

Realisasi belanja APBN di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan III 2023 mencapai Rp5,15 triliun atau sebesar 56,82% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2022 yang mencapai Rp3,69 triliun atau 55,57% dari pagu. Peningkatan realisasi terjadi pada pos belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain yang masing-masing mencapai Rp2,51 triliun, Rp988,22 miliar dan Rp117,89 miliar pada triwulan III 2023, meningkatkan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar Rp1,71 triliun, Rp478,32 miliar, dan Rp114,83 miliar.

Sejumlah langkah strategis telah dilakukan untuk percepatan realisasi APBN di Provinsi Kepri pada triwulan III 2023. Kinerja realisasi APBN didorong oleh realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang terus meningkat dan telah mencapai 86,49% terhadap total dan penyaluran dana desa yang telah mencapai tahap ketiga. Realisasi belanja K/L baru 52,07% dengan capaian yang belum optimal yang disebabkan penyerapan yang masih rendah.

Di sisi lain, realisasi anggaran belanja infrastruktur APBN di Kepri baru terserap 36,51% atau 955,05 miliar. Belanja untuk proyek pengembangan konektivitas udara terealisasi 64,01% dari total anggaran atau sebesar Rp99,98 miliar, antara lain untuk pekerjaan lanjutan pembangunan terminal kargo di Kota Batam. Selain itu,

realisasi untuk proyek peningkatan konektivitas darat mencapai 33,97% atau Rp637,97 miliar untuk lanjutan kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan, pemeliharaan Jalan Toapaya Km. 46, Kab. Bintan, pembangunan dan reservasi jalan dan jembatan pada kawasan Bintan serta penanganan jalan dan jembatan Sp. Sekunyam – Desa Cemaga di Kab. Natuna. Sementara itu, belanja proyek untuk pengembangan konektivitas laut mencapai 42,70% atau Rp172,42 miliar, salah satunya untuk peningkatan Jalan Pelabuhan Parit I di Kab. Karimun. Belanja proyek untuk pembuatan dan pemeliharaan bendungan dan SDA telah terealisasi sebesar Rp44,68 miliar atau 25,08% dari total anggaran.

Tabel 2.4 Anggaran Belanja Infrastruktur APBN Wilayah Provinsi Kepri

No	Jenis Proyek	Triwulan III 2022			Triwulan III 2023		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Konektivitas Udara	103,76	67,34	64,90%	156,19	99,98	64,01%
2	Konektivitas Laut	415,17	99,09	23,87%	403,78	172,42	42,70%
3	Konektivitas Darat	377,72	98,58	26,10%	1.877,98	637,97	33,97%
4	Program Ketahanan Sumber Daya Air	290,31	96,60	33,27%	178,14	44,68	25,08%
Total		1.186,96	361,61	30,47%	2.616,09	955,05	36,51%

Sumber: Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2023, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Prov. Kepri

BAB III

Perkembangan Inflasi Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepulauan Riau

GABUNGAN 2 KOTA IHK (yoy)



Tw III
2023

2,05%



Tw II
2023

2,64%

Kota Tanjungpinang (yoy)



Tw III
2023

1,53%



Tw II
2023

1,78%

Kota Batam (yoy)



Tw III
2023

2,12%



Tw II
2023

2,75%



Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan III 2023 menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 2,05% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,64% (yoy). Tekanan inflasi terutama bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Sementara itu, tekanan Kelompok Transportasi menurun sejalan dengan penurunan tarif angkutan udara. Ke depan, inflasi IHK diperkirakan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi yaitu $3,0 \pm 1\%$ hingga akhir tahun 2023.



Inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri tercatat 2,05% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,64% (yoy). Inflasi yang tercatat lebih rendah tersebut disebabkan oleh penurunan harga pada: (1) Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; (2) Kelompok Transportasi; dan (3) Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Secara spasial, inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri mengalami penurunan. Inflasi di Kota Batam mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya dari 2,75% (yoy) menjadi 2,12% (yoy) pada triwulan III 2023. Kondisi yang sama juga terjadi di Kota Tanjungpinang yang mengalami penurunan inflasi dari 1,78% (yoy) menjadi 1,53% (yoy). Pada saat yang sama, inflasi Nasional juga menurun dari 3,52% (yoy) menjadi sebesar 2,28% (yoy) pada triwulan III 2023.

Pada bulan September 2023, inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri tercatat mengalami inflasi sebesar 0,16% (mtm), lebih rendah dibandingkan pada triwulan II 2023 yang mengalami inflasi sebesar 0,49% (mtm). Inflasi pada September 2023 terutama dipengaruhi oleh beras seiring terbatasnya pasokan dan kenaikan harga acuan, serta biaya akademi/ perguruan tinggi seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru. Sementara itu, inflasi tertahan terutama oleh penurunan harga beberapa komoditas pangan seperti bayam, kangkung, dan telur ayam ras sejalan dengan tersedianya jumlah pasokan dalam jumlah yang cukup serta angkutan udara seiring dengan normalisasi harga pasca liburan sekolah pada Juli - Agustus.

3.1 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA

Inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 tercatat 2,05% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,64% (yoy). Inflasi gabungan

Tabel 3.1 Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam (% yoy)

Kelompok	2020				2021				2022				2023		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Inflasi Nasional	2,96	1,96	1,42	1,68	1,37	1,33	1,60	1,87	2,64	4,35	5,95	5,51	4,97	3,52	2,28
Inflasi Kepri	1,09	0,24	0,10	1,18	1,56	1,52	2,07	2,26	3,24	5,89	6,79	5,83	4,77	2,64	2,05
Inflasi Tanjungpinang	1,40	-0,32	-0,03	1,66	1,44	1,22	1,31	0,86	2,15	5,27	6,12	4,96	4,28	1,78	1,53
Inflasi Batam	1,06	0,33	0,12	1,12	1,57	1,55	2,17	2,45	3,39	5,98	6,87	5,95	4,83	2,75	2,12

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 3.2 Penyumbang Inflasi Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri September 2023

No	Komoditas	Kelompok	Andil Deflasi (% mtm)
1	Beras	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,104
2	Akademi/Perguruan Tinggi	Pendidikan	0,090
3	Bensin	Transportasi	0,052
4	Sewa Rumah	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,019
5	Rokok Kretek Filter	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,019
6	Tomat	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,016
7	Emas Perhiasan	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,014
8	Wortel	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,011
9	Ikan Tongkol/Ikan Ambu-ambu	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,009
10	Pulsa	Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	0,008

Sumber: BPS (data diolah)

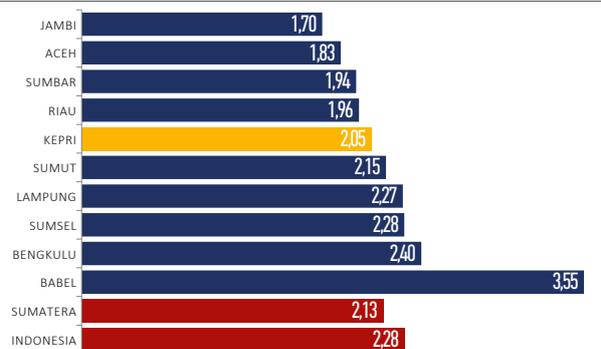
Tabel 3.3 Penyumbang Deflasi Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri September 2023

No	Komoditas	Kelompok	Andil Inflasi (% mtm)
1	Bayam	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,057
2	Telur Ayam Ras	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,050
3	Kangkung	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,046
4	Angkutan Udara	Transportasi	-0,042
5	Sawi Hijau	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,022
6	Kacang Panjang	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,011
7	Ketimun	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,011
8	Sotong	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,010
9	Brokoli	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,005
10	Apel	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,004

Sumber: BPS (data diolah)

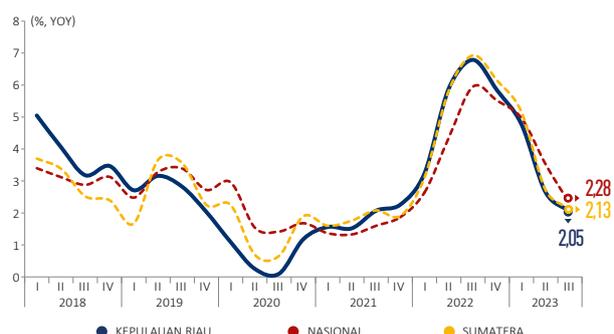
2 Kota IHK di Provinsi Kepri tersebut juga lebih rendah dibandingkan inflasi gabungan Kota IHK di wilayah Sumatera yang tercatat sebesar 2,14% (yoy) dan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 2,28% (yoy). Inflasi gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri yang sempat memuncak pada triwulan III 2022, telah berangsur mengalami penurunan sejalan dengan normalisasi harga barang/jasa pasca penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Inflasi gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri tetap terkendali dan mencatatkan terendah se-Sumatera secara tahun kalender dengan inflasi sebesar 1,21% (ytd).

Berdasarkan perkembangan inflasi kelompok barang dan jasa, penurunan tekanan inflasi 2 Kota IHK di Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 bersumber dari penurunan harga Kelompok Transportasi sebesar -0,18% (yoy) dengan andil -0,02. Sementara itu, kelompok yang menyumbang andil inflasi tahunan terbesar terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perumahan,



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 3.1 Inflasi Triwulan III 2023 Regional Sumatera (% yoy)



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau, Nasional dan Sumatera Triwulan III 2023 (% yoy)



Tabel 3.4 Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa (% yoy)

No	Kelompok	2021								2022								2023					
		I		II		III		IV		I		II		III		IV		I		II		III	
		Andil	Inflasi																				
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	0,78	2,72	0,84	2,98	1,47	5,23	1,23	4,26	1,45	5,02	3,54	12,31	2,88	9,95	2,17	7,39	1,91	6,49	0,37	1,20	0,93	3,12
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,01	0,19	0,05	0,91	0,08	1,41	0,11	1,98	0,16	2,88	0,13	2,44	0,08	1,36	0,08	1,43	0,12	2,18	0,14	2,70	0,21	3,92
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,03	0,19	0,06	0,32	0,07	0,38	0,08	0,43	0,17	0,93	0,20	1,10	0,27	1,52	0,36	2,04	0,41	2,37	0,38	2,26	0,35	2,08
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,04	0,82	0,08	1,54	0,06	1,25	0,07	1,38	0,23	4,70	0,25	5,05	0,27	5,36	0,24	4,94	0,13	2,64	0,09	1,75	0,04	0,77
5	Kesehatan	0,03	1,59	0,03	1,54	0,03	1,42	0,04	2,24	0,02	1,03	0,02	0,77	0,01	0,56	0,01	0,31	0,00	0,25	0,01	0,54	0,01	0,45
6	Transportasi	0,13	1,12	-0,18	-1,43	0,08	0,70	0,15	1,20	0,41	3,42	0,87	7,24	2,33	19,69	2,05	16,93	1,47	12,24	1,16	9,49	-0,02	-0,18
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,09	-1,49	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	-0,05	-0,22	-0,33	-0,02	-0,25	-0,02	-0,39	-0,02	-0,30	0,01	0,13	0,00	0,03	0,01	0,22
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,02	0,91	0,03	1,51	0,02	1,06	0,03	1,39	0,02	1,03	0,04	1,90	0,05	2,15	0,05	2,21	0,05	2,28	0,01	0,61	0,02	0,75
9	Pendidikan	0,19	3,14	0,19	3,14	0,11	1,80	0,11	1,80	0,11	1,80	0,11	1,80	0,17	2,77	0,17	2,76	0,17	2,82	0,16	2,82	0,16	2,80
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	0,26	3,30	0,24	3,00	0,24	3,03	0,37	4,71	0,31	3,76	0,42	5,20	0,44	5,40	0,31	3,81	0,17	2,03	0,04	0,43	0,05	0,63
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,15	2,36	0,17	2,56	-0,10	-1,42	0,08	1,23	0,39	5,95	0,33	4,94	0,32	4,88	0,41	6,32	0,33	4,89	0,28	4,24	0,30	4,63
	Umum		1,56		1,52		2,07		0,00		3,24		5,89		6,79		5,83		4,77		2,64		2,05

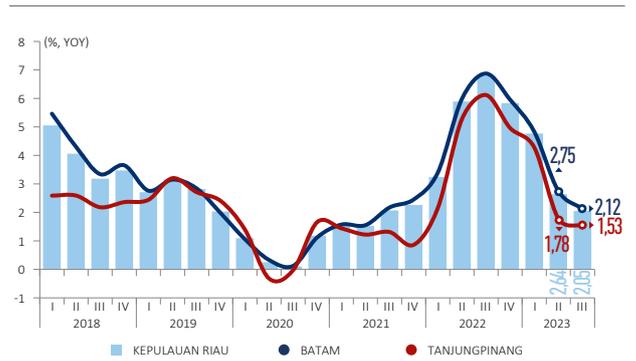
Sumber: BPS (data diolah)

Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil masing-masing sebesar 0,93%, 0,35% dan 0,30%. Inflasi ketiga kelompok tersebut pada triwulan III 2023 masing-masing sebesar 3,12% (yoy), 2,08% (yoy) dan 4,63% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 1,20% (yoy), 2,26% (yoy) dan 4,24% (yoy).

Tekanan inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau meningkat disebabkan oleh peningkatan harga beras dan rokok kretek filter. Tekanan inflasi juga cukup tinggi pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga seiring meningkatnya harga sewa rumah. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya juga mengalami tekanan inflasi yang cukup tinggi akibat kenaikan harga emas perhiasan seiring dengan masih meningkatnya harga emas global. Sementara, tekanan inflasi pada Kelompok Transportasi menurun disebabkan oleh penurunan tarif angkutan udara sejalan dengan normalisasi permintaan yang melonjak pada periode liburan sekolah di bulan Juli - Agustus.

3.2. PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KOTA

Secara spasial, 2 Kota IHK di Provinsi Kepri yakni Kota Batam dan Kota Tanjungpinang pada triwulan III 2023 mencatatkan inflasi namun dengan tren yang menurun. Inflasi Kota Batam tercatat sebesar 2,12% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,75% (yoy). Sementara itu, inflasi Kota Tanjungpinang juga mengalami penurunan menjadi sebesar 1,53% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 1,78% (yoy). Dengan demikian, inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri menunjukkan inflasi sebesar 2,05% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 2,64% (yoy).



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau, Batam, dan Tanjungpinang (% yoy)

3.2.1. Inflasi Kota Batam

Kota Batam pada triwulan III 2023 mengalami inflasi sebesar 2,12% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,75% (yoy). Inflasi di Kota Batam pada triwulan III 2023 yang lebih rendah tersebut disebabkan oleh andil inflasi Kelompok Transportasi yang tercatat sebesar -0,06% seiring penurunan tarif angkutan udara. Sementara itu, tekanan inflasi meningkat pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 0,98%, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil 0,37% dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya naik dengan andil 0,32%. Naiknya tekanan inflasi ketiga kelompok tersebut seiring meningkatnya harga beras, sewa rumah dan emas perhiasan.

3.2.2. Inflasi Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang pada triwulan III 2023 mengalami inflasi sebesar 1,53% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,78% (yoy). Penurunan inflasi tersebut terutama karena menurunnya tekanan inflasi pada Kelompok Pakaian dan Alas Kaki, Kelompok

Tabel 3.5 Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa di Kota Penghitungan IHK (% - yoy)

Periode	I-2022		II-2022		III-2022		IV-2022		I-2023		II-2023		III-2023	
	Batam	Tj. Pinang												
Makanan, Minuman dan Tembakau	1,57	0,58	3,60	3,10	2,92	2,58	2,24	1,65	1,93	1,72	0,44	-0,15	0,53	1,84
Pakaian dan Alas Kaki	0,17	0,05	0,15	0,03	0,08	0,04	0,08	0,04	0,13	0,02	0,16	0,01	-0,03	-0,46
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan bakar	0,15	0,31	0,18	0,34	0,23	0,53	0,32	0,59	0,42	0,37	0,39	0,37	0,18	0,99
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,23	0,23	0,25	0,28	0,27	0,25	0,25	0,18	0,15	0,04	0,10	0,02	0,04	0,77
Kesehatan	0,01	0,09	0,01	0,09	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,02	0,01	0,02	0,01	0,35
Transportasi	0,43	0,26	0,90	0,69	2,40	1,85	2,11	1,65	1,46	1,52	1,16	1,12	0,27	2,16
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,02	0,00	-0,02	-0,01	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03	0,01	-0,02	0,01	-0,02	-0,02	-0,28
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,02	0,02	0,04	0,05	0,04	0,06	0,04	0,06	0,05	0,05	0,01	0,02	-0,01	-0,40
Pendidikan	0,11	0,11	0,11	0,11	0,17	0,13	0,17	0,13	0,17	0,15	0,17	0,15	0,15	3,72
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,33	0,11	0,45	0,22	0,46	0,29	0,31	0,31	0,16	0,24	0,02	0,13	0,24	2,27
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,39	0,37	0,32	0,37	0,32	0,35	0,43	0,32	0,35	0,16	0,30	0,13	0,16	2,70
Umum	3,39	2,15	5,98	5,27	6,87	6,12	5,95	4,96	4,83	4,28	2,75	1,78	2,12	1,53

Sumber: BPS (data diolah)

Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan, serta Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya dengan andil masing-masing sebesar -0,03%, -0,02%, dan -0,01% seiring normalisasi harga. Sementara itu, penurunan tertahan oleh sumbangan inflasi terutama dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 0,53%, Kelompok Transportasi sebesar 0,27%, dan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran dengan andil sebesar 0,24%.

3.3 ARAH PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2023 diperkirakan berada di bias atas rentang target sasaran inflasi 2023 yakni 3,0±1%, mempertimbangkan perkembangan sejumlah indikator harga yang menunjukkan peningkatan harga pada sejumlah komoditas dan moderasi dampak dari kenaikan BBM di tahun sebelumnya. Tekanan inflasi diperkirakan meningkat dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau seiring dengan meningkatnya risiko gangguan cuaca memasuki triwulan IV 2023. Selain itu, tekanan inflasi pada Kelompok Transportasi juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan meningkatkan tarif angkutan udara yang sejalan dengan peningkatan permintaan menjelang HBKN Nataru.

Tekanan inflasi pada keseluruhan tahun diperkirakan mengalami tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya serta lebih rendah dibandingkan dengan prakiraan sebelumnya. Prakiraan tersebut sejalan dengan berkurangnya tekanan Inflasi dari komoditas global dan juga membaiknya rantai pasok dunia. Hal tersebut juga disebabkan oleh dampak *high based effect* dari penyesuaian BBM pada tahun 2022 yang berdampak pada lebih rendahnya inflasi tahunan pada tahun 2023. Prakiraan tersebut juga didukung oleh informasi hasil *liaison* yang menyatakan bahwa rata-rata produsen sudah melakukan *price in* kenaikan harga pada awal tahun dan tidak akan menaikkan harga jual sampai akhir tahun. Selain itu, pengetatan kebijakan moneter di

negara maju maupun negara berkembang, kondisi permintaan yang belum sepenuhnya pulih serta masifnya program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) turut menahan tekanan inflasi.

Di sisi lain, sejumlah risiko inflasi hingga akhir tahun 2023 masih membayangi yang dapat meningkatkan tekanan inflasi antara lain: (1) fenomena El Nino yang banyak mempengaruhi wilayah di bawah ekuator dan menyebabkan kekeringan yang berdampak pada menurunnya produktivitas pangan; (2) potensi peningkatan permintaan menjelang musim liburan dan HBKN; (3) peningkatan mobilitas; (4) risiko inflasi global yang masih tinggi akibat ketegangan geopolitik; dan (5) potensi peningkatan harga minyak dunia mengikuti harga internasional.

3.4 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI

Sinergi antar instansi dan lembaga dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus ditingkatkan dan diperkuat sebagai upaya pengendalian inflasi di tengah peningkatan tekanan inflasi global dan dinamika pasokan domestik. Berbagai upaya dilakukan dalam kerangka 4K yaitu, memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif. Upaya pengendalian yang telah dilakukan pada triwulan III 2023 antara lain:

- Melaksanakan sinergi program melalui *High Level Meeting (HLM)* TPID sebanyak 6 kali pada triwulan III 2023 baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan kegiatan pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh kabupaten dan kota se-Kepri.
- Mengintensifkan pemantauan distribusi, ketersediaan stok dan harga bahan pangan pada level distributor, sub, dan pasar bersama Satgas Pangan, termasuk melakukan sidak pasar untuk memastikan ketersediaan stok, kewajaran harga dan masa kadaluwarsa bahan pokok penting.

- d. Perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) melalui penandatanganan 17 MoU KAD yang mencakup MoU antara Provinsi Kepri dengan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung (G2G) serta intra provinsi antara Koperasi di Batam dan Karimun (B2B).
 - e. Bersinergi dengan Dinas Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), dan Balai Karantina dalam memastikan kelancaran distribusi barang yang menggunakan moda transportasi laut melalui dukungan perizinan bongkar muat kapal pengangkut komoditas pangan dan penjaminan sertifikasi komoditas pangan yang masuk ke wilayah Kepri.
 - f. Menyelenggarakan rangkaian kegiatan kampanye konsumsi cabai kering sebagai bagian dari upaya diversifikasi pangan melalui:
 - 1) menyelenggarakan lomba memasak tanpa menggunakan cabai segar,
 - 2) *talkshow* dan demo masak dengan Chef William Wongso untuk optimalisasi penggunaan cabai kering dalam masakan,
 - 3) pemecahan Rekor MURI Sajian Sambal Bilis Terbanyak Menggunakan Cabai Kering.
 - 4) Pelaksanaan Lomba antar-Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk menguji dan meningkatkan pemahaman terhadap budidaya tanaman pangan di pekarangan.
 - g. *Kick Off event Hack4ID* berkolaborasi dengan Gerakan Nasional 1000 *Start-Up Digital* Kemkominfo dalam rangka mendorong inovasi yang berkaitan dengan GNPIP, yang menghasilkan inovasi berupa pemanfaatan IoT pada budidaya hidroponik, integrasi data pertanian untuk memperkuat analisis & penyusunan strategi, dan kelas digital kepada petani untuk memperluas edukasi budidaya tanaman pangan.
 - h. Pelaksanaan pelatihan budidaya cabai metode Proliga (Produksi Lipat Ganda).
 - i. Program peningkatan pemanfaatan alsintan dan sarana prasarana produksi.
- Dalam jangka panjang, TPID akan terus mendorong upaya peningkatan produktivitas petani/peternak/nelayan melalui program penguatan kelembagaan, perluasan lahan pertanian, pengembangan sentra produksi pangan, menerapkan teknik budidaya yang teruji antara lain Proliga, menerapkan metode pertanian organik, menerapkan *integrated farming* yang menghubungkan peternakan dan pertanian, akselerasi *urban farming*/program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), penerapan *digital farming*, dan pembentukan kelompok *subsistence* bidang pertanian/perikanan. Selain itu, TPID juga terus mendorong diversifikasi penggunaan pupuk organik, serta memfasilitasi *business matching* antara produsen/petani/peternak/nelayan dengan agregator/pembeli dan lembaga pembiayaan. TPID Provinsi Kepri juga terus mendorong efisiensi arus barang dan bongkar muat khusus komoditas bahan pangan di pelabuhan/ bandara. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, TPID senantiasa mendorong diversifikasi pangan dan konsumsi produk olahan untuk mengurangi tekanan pasokan komoditas segar misalnya aneka cabai.

BAB IV

Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan Dan UMKM

Asset* (yoy)



Tw III 2023	15,44% Rp 90,40T
Tw II 2023	11,12% Rp 85,97T



Kredit* (yoy)



Tw III 2023	10,49% Rp 47,49T
Tw II 2023	10,92% Rp 46,06T



Kredit** (yoy)



Tw III 2023	11,10% Rp 70,13T
Tw II 2023	8,73% Rp 67,33T



Dana* (yoy)



Tw III 2023	12,57% Rp 76,92T
Tw II 2023	10,95% Rp 72,97T



LDR*



Tw III 2023	61,74%
Tw II 2023	63,12%



NPL*



Tw III 2023	4,33%
Tw II 2023	2,29%



UMKM



Tw III 2023	10,93% Rp 12,49T
Tw II 2023	8,89% Rp 12,05T



* dari bank yang berlokasi di Kepri,
** kepada proyek yang berlokasi di Kepri

Intermediasi perbankan pada triwulan III 2023 menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya dengan risiko kredit terjaga yang terkonfirmasi pada peningkatan kinerja penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) di Provinsi Kepulauan Riau. Risiko kredit pada segmen korporasi, segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maupun segmen kredit sektor rumah tangga masih terjaga (<5%).



Kinerja perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 mengalami peningkatan tercermin dari penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek dan jumlah DPK yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit perbankan untuk proyek yang berlokasi di Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 11,10% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2023 sebesar 8,73% (yoy). Selain itu, DPK yang dihimpun oleh perbankan di Provinsi Kepri tumbuh sebesar 12,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,95% (yoy). Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepri yang tercermin dari rasio LDR pada triwulan III 2023 mengalami penurunan menjadi 61,74%, setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 63,12%. Penyaluran kredit yang terjaga turut didukung oleh kualitas kredit yang tetap terjaga sebagaimana rasio NPL gross yang tercatat stabil sebesar 4,33%.

Kinerja penyaluran kredit UMKM mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya dengan risiko kredit yang tetap terjaga. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan III 2023 tumbuh positif sebesar 10,93% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,89% (yoy). Di sisi lain, risiko kredit mengalami penurunan, tercermin dari penurunan rasio NPL kredit UMKM sebesar 3,63% menjadi 3,55%. Peningkatan kinerja penyaluran kredit pada sektor UMKM bersumber dari Lapangan Usaha (LU) Perdagangan Besar dan Eceran dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

4.1 PERKEMBANGAN PERBANKAN PROVINSI KEPRI

Penyaluran kredit perbankan untuk proyek yang berlokasi di Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 11,10% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2023 sebesar 8,73% (yoy). Peningkatan kredit lokasi proyek terutama disebabkan oleh penurunan penyaluran kredit pada LU Industri Pengolahan, LU Pertambangan dan Penggalian, LU Listrik, Gas, dan Air, LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Akomodasi dan Makan Minum, serta LU Trans, Gudang, dan Komunikasi. Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan kredit didorong oleh kredit investasi dan kredit konsumsi.

Di sisi lain, aset perbankan tumbuh sebesar 15,44% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 11,12% (yoy). Sejalan dengan pertumbuhan kredit dan aset, jumlah DPK tumbuh sebesar 12,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,95% (yoy). Peningkatan tersebut bersumber dari jenis giro dan tabungan. Pada triwulan III 2023, kemampuan pelaku usaha dalam membayar angsuran kredit relatif stabil tercermin dari tingkat kredit bermasalah (rasio NPL gross) yang masih terjaga sebesar 4,33%.

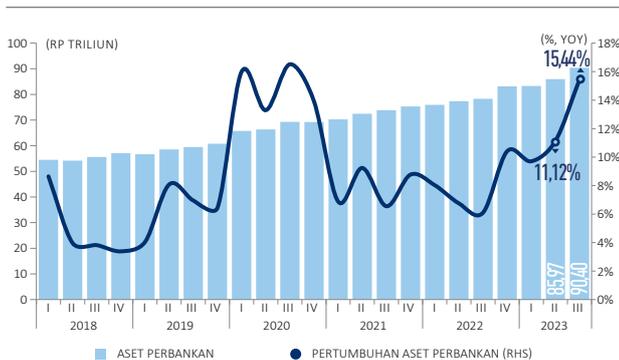
4.1.1 Perkembangan Aset Perbankan

Aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 berjumlah Rp90,40 triliun atau tumbuh 15,44% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 11,12% (yoy). Peningkatan aset bersumber dari kelompok Bank Persero dan Bank Swasta yang tumbuh

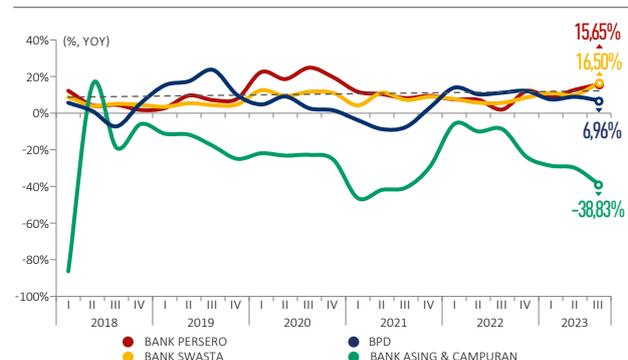
Tabel 4.1 Perkembangan Indikator Utama Perbankan Kepri

	2021 (Rp Triliun)				2022 (Rp Triliun)				2023 (Rp Triliun)			Pertumbuhan (%, YoY)	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	Tw II 2023	Tw III 2023
Total Aset*	70,28	72,47	73,82	75,31	75,92	77,37	78,31	83,14	83,29	85,97	90,40	11,12%	15,44%
Total Dana*	61,88	63,16	64,03	66,21	64,53	65,77	68,33	72,87	71,84	72,97	76,92	10,95%	12,57%
Total Kredit*	37,63	37,97	38,44	40,15	39,94	41,52	42,98	44,88	45,16	46,06	47,49	10,92%	10,48%
Total Kredit**	53,33	58,01	56,44	59,69	59,35	61,92	63,13	64,86	65,81	67,33	70,13	8,73%	11,10%
NPL*	4,16%	3,71%	3,63%	2,98%	2,97%	2,90%	3,41%	1,91%	2,14%	2,29%	4,33%	-	-
LDR*	60,81%	60,11%	60,03%	60,63%	61,89%	63,13%	62,91%	61,58%	62,86%	63,12%	61,74%	-	-

Sumber: Bank Indonesia
*) dari bank yang berlokasi di Kepri,
**) kepada proyek yang berlokasi di Kepri



Grafik 4.1 Perkembangan Aset Perbankan

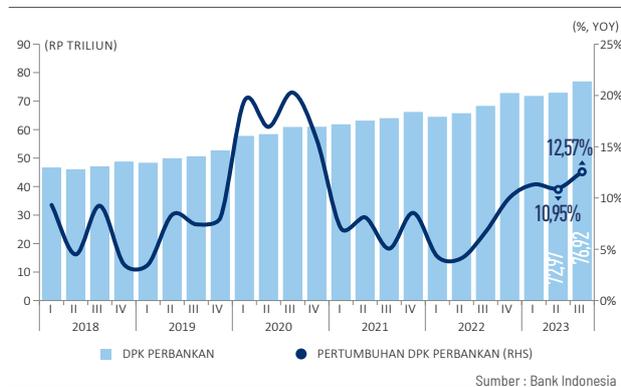


Grafik 4.2 Pertumbuhan Aset Berdasarkan Kelompok Bank

masing-masing sebesar 15,65% (yoy) dan 16,50% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 12,73% (yoy) dan 9,90% (yoy). Sementara itu, aset perbankan dari kelompok Bank BPD mengalami penurunan sebesar 6,96% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,94% (yoy). Kelompok Bank Asing dan Campuran juga mengalami kontraksi sebesar -38,83% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -29,92% (yoy). Secara keseluruhan, struktur aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 tercatat didominasi oleh kelompok Bank Swasta Nasional yakni sebesar 47,21%, diikuti oleh Bank Persero (46,49%), BPD (6,28%) serta Bank Asing dan Campuran (0,02%).

4.1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan

Pada triwulan III 2023, total DPK di Kepri berjumlah Rp76,92 triliun atau tumbuh 12,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,95% (yoy). Peningkatan tersebut bersumber dari jenis DPK giro dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 18,85% (yoy) dan 9,39% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2023 sebesar 15,35% (yoy) dan 7,95% (yoy). Struktur DPK pada triwulan III 2023 masih didominasi tabungan dengan pangsa 43,30%, diikuti giro 36,31% dan deposito 20,39%. Penempatan dana yang tinggi pada instrumen simpanan jangka pendek (giro dan tabungan) mengindikasikan masih rendahnya preferensi masyarakat untuk menjadikan simpanan bank sebagai instrumen investasi.

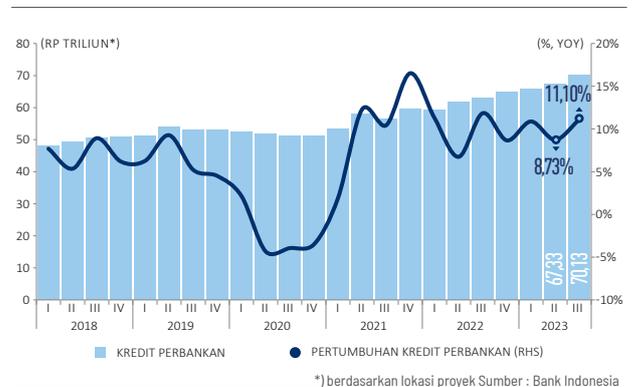


Grafik 4.3 Perkembangan DPK Perbankan

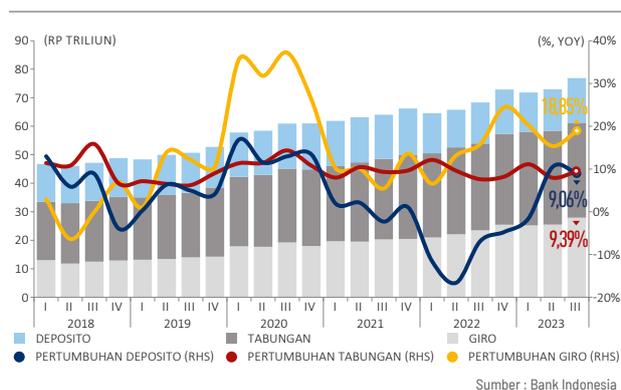
4.1.3 Perkembangan Kredit Perbankan

Jumlah penyaluran kredit (berdasarkan lokasi proyek) di wilayah Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 sebesar Rp70,13 triliun atau tumbuh 11,10% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,73% (yoy). Peningkatan terutama bersumber dari kredit investasi dan kredit konsumsi yang meningkat dari 11,65% (yoy) dan 9,68% (yoy) pada triwulan II 2023 menjadi 20,32% (yoy) dan 9,77% (yoy) pada triwulan III 2023. Sementara itu, kredit modal kerja tumbuh sebesar 4,31% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,28% (yoy). Secara keseluruhan, struktur kredit pada triwulan III 2023 masih didominasi oleh kredit modal kerja dengan pangsa sebesar 34,03%, diikuti oleh kredit investasi sebesar 33,93%, dan kredit konsumsi 32,05%.

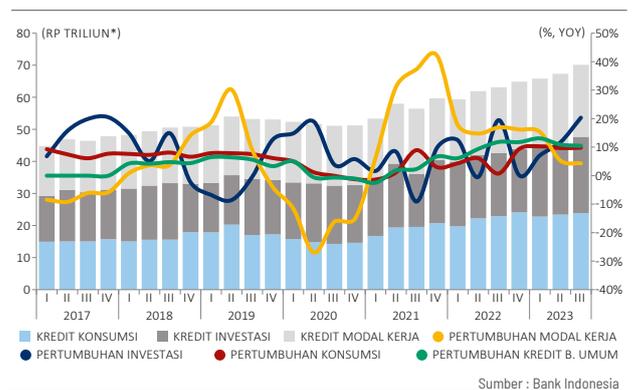
Pada triwulan III 2023, rata-rata tingkat suku bunga kredit perbankan di Provinsi Kepri tercatat 8,83%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,90%. Penurunan tersebut sejalan dengan stance kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia yang memandang bahwa likuiditas perbankan masih sangat memadai. Penurunan suku bunga terjadi pada kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi masing-masing tercatat sebesar 8,46%, 8,60%, dan 9,48%. Namun demikian, suku bunga simpanan (DPK) mengalami peningkatan pada tabungan, giro, dan deposito. Rata-rata suku bunga tabungan, giro, dan deposito pada triwulan berjalan masing-masing tercatat sebesar 1,91%, 0,55%, dan 3,91%, naik dari triwulan sebelumnya sebesar 1,74%, 0,50%, dan 3,68%.



Grafik 4.5 Perkembangan Kredit Perbankan

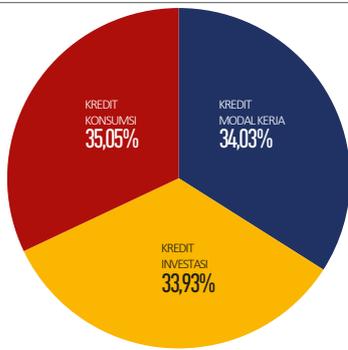


Grafik 4.4 DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan



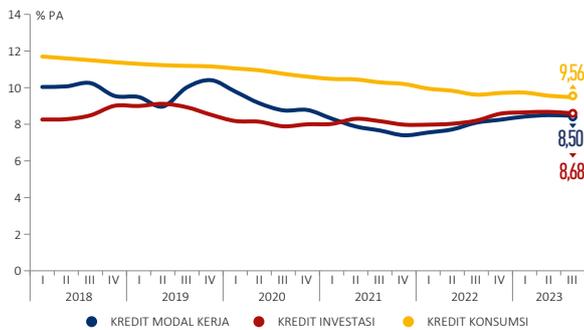
Grafik 4.6 Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

Secara sektoral, peningkatan penyaluran kredit bersumber dari LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Industri Pengolahan, LU Pertambangan dan Penggalian, LU Listrik, Gas, dan Air, LU Akomodasi dan Makan Minum, serta LU Transportasi, Gudang, dan Komunikasi. Pertumbuhan kredit pada LU Perdagangan Besar dan Eceran dan LU Industri Pengolahan sejalan pertumbuhan PDRB LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan Besar dan Eceran Kredit masing-masing tercatat sebesar 10,03% dan 0,62% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,19% dan -0,27% (yoy). Sedangkan pertumbuhan kredit untuk sektor ekonomi lainnya mendorong peningkatan kredit secara keseluruhan sejalan dengan mobilitas masyarakat yang sudah berangsur normal sehingga mendorong kinerja penjualan dari pelaku usaha.



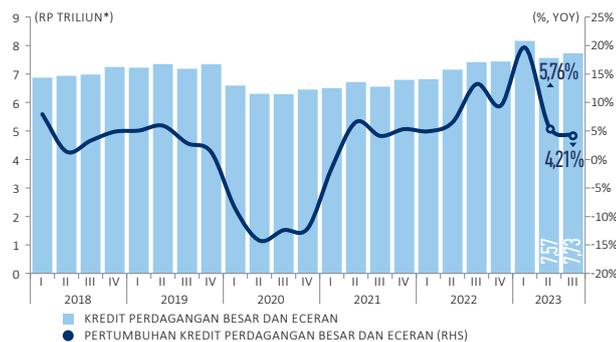
*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.7 Porsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.8 Perkembangan Suku Bunga Kredit



*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.9 Kredit Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

Secara spasial, penyaluran kredit di wilayah Provinsi Kepri masih terkonsentrasi di Kota Batam dengan jumlah kredit pada triwulan III 2023 sebesar Rp53,91 triliun atau 74,54% dari total kredit di Provinsi Kepri. Kondisi tersebut sejalan dengan peran Kota Batam sebagai pusat ekonomi di Provinsi Kepri yang memiliki pangsa > 60% dalam PDRB Kepri. Penyaluran kredit terbesar kedua berlokasi di Kota Tanjungpinang dengan pangsa 8,92% dari total kredit atau sebesar Rp6,45 triliun, diikuti Kabupaten Karimun dengan pangsa 4,66% dari total kredit atau sebesar Rp3,37 triliun.

4.1.4 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan

Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepri yang tercermin dari rasio LDR pada triwulan III 2023 mengalami penurunan menjadi 61,74%, setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 63,12%.



*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.10 Kredit Sektor Industri Pengolahan

Tabel 4.2 Penyaluran Kredit (Spasial)

KABUPATEN/KOTA	Triwulan II 2023	
	Kredit (Rp Triliun*)	Porsi (%)
Batam	53,91	74,54%
Tanjungpinang	6,45	8,92%
Karimun	3,37	4,66%
Lingga	0,61	0,85%
Natuna	4,94	6,83%
Bintan	2,73	3,77%
Kep. Anambas	0,31	0,43%
Kepulauan Riau	72,32	100,00%

Sumber : Bank Indonesia

*)Berdasarkan lokasi proyek



*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.11 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan Kepri

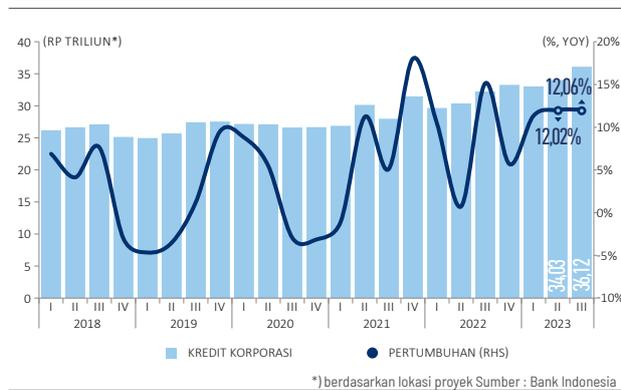
Penurunan rasio tersebut didukung oleh penyaluran kredit yang masih terjaga di tengah kondisi perekonomian yang membaik. Penyaluran kredit yang terjaga turut didukung oleh kualitas kredit yang tetap terjaga sebagaimana rasio *NPL gross* yang tercatat stabil sebesar 4,33%.

4.2 ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

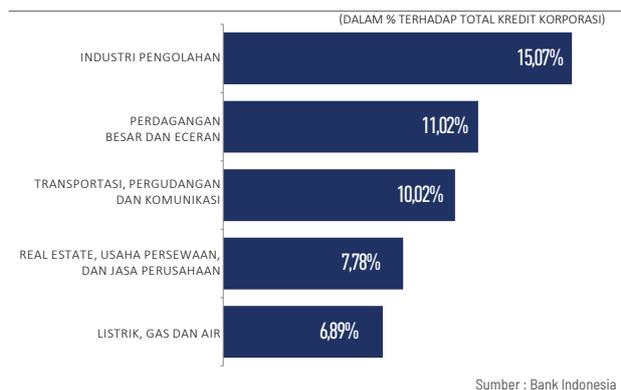
Pembiayaan pada sektor korporasi dan rumah tangga juga tetap terjaga sejalan dengan pemulihan ekonomi di daerah yang terus berlangsung. Momentum tersebut juga didukung oleh kebijakan keterbukaan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang mendorong penurunan suku bunga kredit. Peningkatan kinerja sektor korporasi tersebut kemudian berpengaruh terhadap ketahanan sektor rumah tangga khususnya rumah tangga pekerja pada sektor industri. Di sisi lain, penyaluran kredit UMKM mengalami perbaikan disertai dengan risiko kredit yang tetap terjaga sejalan dengan peningkatan kemampuan bayar pelaku usaha.

4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi

Kinerja penyaluran kredit ke sektor korporasi mengalami percepatan sejalan dengan perekonomian yang terus pulih. Pada triwulan III 2023, penyaluran kredit korporasi (lokasi proyek) berjumlah Rp36,12 triliun atau tumbuh 12,06% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berjumlah Rp34,03 triliun atau tumbuh 12,02% (yoy).



Grafik 4.12 Perkembangan Kredit Korporasi



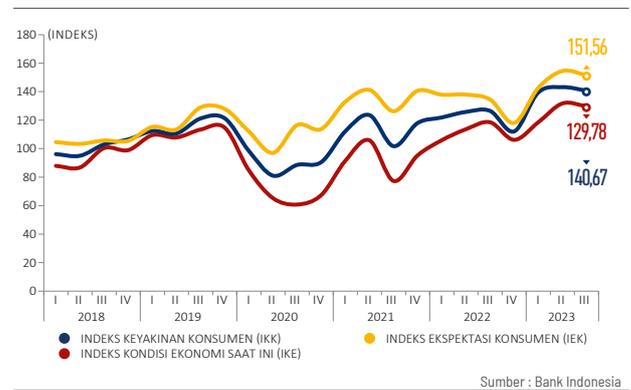
Grafik 4.13 Pangsa Kredit Korporasi (5 LU Terbesar)

Pangsa penyaluran kredit ke sektor korporasi didominasi oleh LU Industri Pengolahan dengan pangsa sebesar 15,07% dari total kredit yang disalurkan kepada korporasi berdasarkan lapangan usaha. Pangsa penyaluran kredit selanjutnya diikuti oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran (11,02%), LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi (10,02%), serta LU Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan (7,78%). Sementara, pangsa LU lainnya pada triwulan III 2023 masih < 8%.

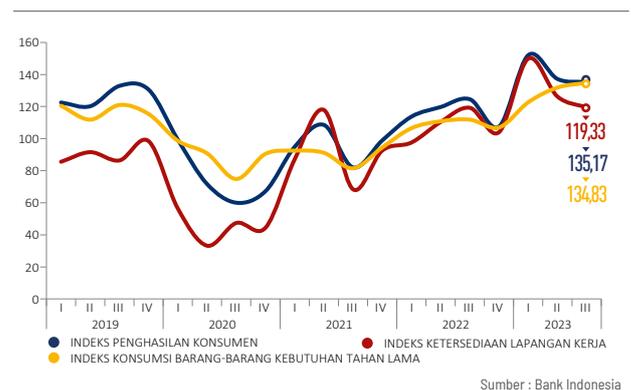
Kualitas penyaluran kredit korporasi masih terjaga, tercermin dari rasio *Non Performing Loan (NPL)* yang masih berada di bawah 5% yakni sebesar 4,33%, menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 2,29%. Peningkatan NPL kredit korporasi terutama bersumber dari LU Industri Pengolahan serta LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi yang memiliki NPL masing-masing sebesar 10,41% dan 0,59%. Meskipun demikian, peningkatan tertahan oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran serta LU Real Estate yang masing-masing tercatat menurun menjadi sebesar 2,25% dan 0,98%.

4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga

Ketahanan sektor rumah tangga mengalami perlambatan seiring dengan perlambatan penyaluran kredit konsumsi dan tingkat penghasilan rumah tangga. Hal ini tercermin dari Indeks Penghasilan Konsumen yang mengalami penurunan pada triwulan III 2023 sebesar 135,17 dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 137,17. Perlambatan juga terjadi pada Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja yang menunjukkan penurunan pada triwulan III 2023 yang tercatat sebesar 119,33, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 129,78.



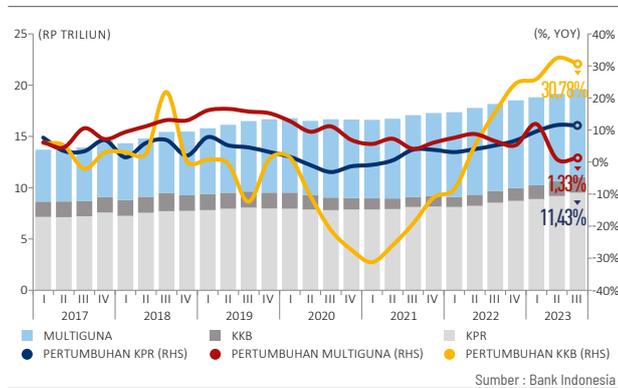
Grafik 4.14 Survei Konsumen



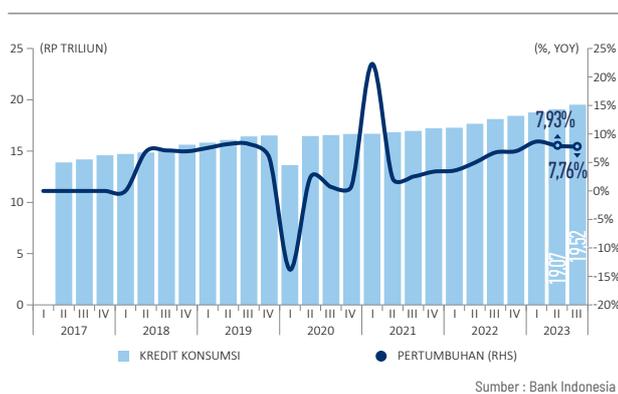
Grafik 4.15 Survei Konsumen

126,17. Namun demikian, hasil Survei Konsumen Bank Indonesia juga menunjukkan tingkat keyakinan konsumen yang masih terjaga optimis sebesar 140,67 (>100) meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Sejalan dengan perlambatan Indeks Penghasilan Konsumen, penyaluran kredit rumah tangga juga mengalami penurunan. Kredit rumah tangga tumbuh sebesar 9,77% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,98% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ini terjadi pada kredit KPR dan KKB yang pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 11,43% dan 30,78% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 11,54% dan 32,44% (yoy). Perlambatan kredit rumah tangga juga turut disebabkan oleh perlambatan kredit konsumsi yang tercatat sebesar 7,76% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,93% (yoy).



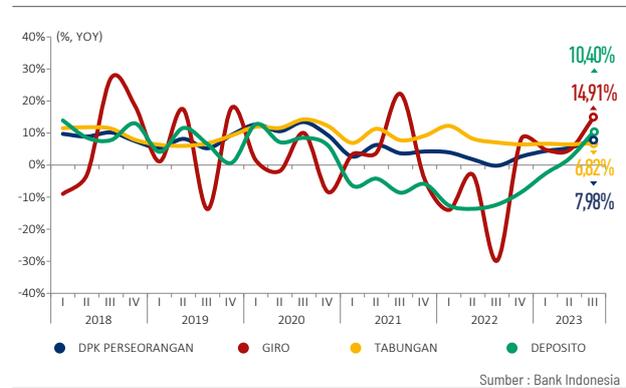
Grafik 4.16 Kredit Rumah Tangga



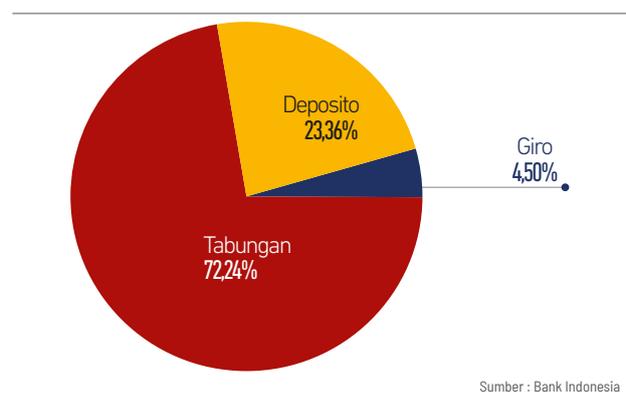
Grafik 4.17 Kredit Konsumsi

Jumlah DPK milik perseorangan pada triwulan III 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 7,98% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,37% (yoy). Akselerasi pertumbuhan DPK perseorangan terutama pada giro, tabungan, dan deposito yang tumbuh masing-masing sebesar 14,91%, 6,82%, dan 10,40% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 4,74% (yoy), 6,46%, dan 2,06% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, struktur DPK perseorangan masih didominasi jenis tabungan dengan pangsa 72,24%, diikuti deposito 23,26% dan giro 4,50%. Tingginya pangsa tabungan terhadap total DPK perseorangan menunjukkan kecenderungan preferensi masyarakat untuk menyimpan dana pada instrumen yang lebih likuid.

Dari sisi risiko kredit, NPL kredit rumah tangga pada triwulan III 2023 mencatat penurunan dan berada dibawah threshold 5%. NPL



Grafik 4.18 DPK Perseorangan



Grafik 4.19 Pangsa DPK Perseorangan

Tabel 4.3 Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga

KATEGORI	2021				2022				2023		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Kredit Rumah Tangga	2,03%	2,02%	2,03%	1,84%	2,10%	1,98%	1,87%	1,61%	1,78%	2,00%	1,95%
Kredit Pemilikan Rumah	3,07%	3,00%	2,92%	2,63%	2,85%	2,83%	2,57%	2,28%	2,43%	2,71%	2,52%
Kredit Kendaraan Bermotor	1,42%	1,91%	1,68%	1,03%	0,88%	0,61%	0,55%	0,45%	0,42%	0,48%	0,63%
Kredit Peralatan Rumah Tangga	2,56%	2,54%	2,06%	2,21%	2,89%	1,93%	1,12%	0,79%	0,90%	0,80%	0,88%
Kredit Multiguna	1,08%	1,09%	1,19%	1,17%	1,39%	1,40%	1,42%	1,26%	1,40%	1,66%	1,61%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	1,78%	1,79%	1,91%	1,80%	3,39%	1,60%	1,67%	1,22%	1,73%	1,70%	2,69%

Sumber: Bank Indonesia
(*) berdasarkan lokasi proyek

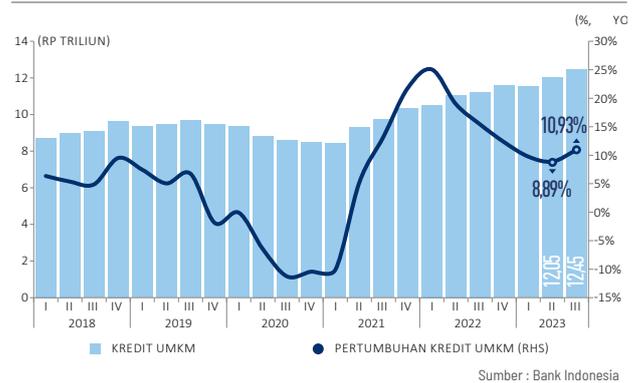
kredit rumah tangga tersebut menurun menjadi 1,95% dari sebelumnya sebesar 2,00% pada triwulan II 2023. Penurunan NPL terjadi pada Kredit Pemilikan Rumah dari 2,71% menjadi 2,52% dan Kredit Multiguna dari 1,66% menjadi 1,61%.

4.2.3 Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Penyaluran kredit UMKM (lokasi proyek) pada triwulan III 2023 mengalami peningkatan dengan risiko kredit tetap terjaga. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan III 2023 tumbuh positif sebesar 10,93% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,89% (yoy). Di sisi lain, risiko kredit mengalami penurunan, tercermin dari penurunan rasio NPL kredit UMKM sebesar 3,63% menjadi 3,55%. Namun demikian, rasio NPL kredit UMKM masih terjaga di bawah 5%.

Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar 17,75%, menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 17,90%. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit di Provinsi Kepri tersebut semakin mendekati 20% sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan Lapangan Usaha, penyaluran kredit UMKM masih terkonsentrasi pada LU Perdagangan Besar & Eceran yakni sebesar 45,00%, diikuti LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi sebesar 9,70% dan LU Industri Pengolahan yang memiliki pangsa sebesar 8,62%. Adapun pangsa penyaluran kredit UMKM pada LU lainnya masing-masing masih < 8%.

Peningkatan kredit UMKM pada triwulan III 2023 bersumber dari LU Perdagangan Besar dan Eceran yang meningkat sebesar 3,99% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,93% (yoy). Selain itu, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga tercatat meningkat sebesar 14,56% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,62%. Dalam rangka mendukung penguatan UMKM di Provinsi Kepri, Pemerintah berperan dalam penyaluran pembiayaan mikro dan ultra mikro oleh perbankan, melalui subsidi bunga pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Bank Indonesia turut berperan antara lain dengan mendorong pengembangan UMKM melalui kebijakan kewajiban bank untuk memenuhi secara bertahap Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Pembiayaan inklusif merupakan penyediaan dana yang diberikan bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) dalam Rupiah dan valuta asing. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau juga terus mendorong UMKM agar dapat terus bertumbuh dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital antara lain melalui dukungan dalam penyelenggaraan pameran, kurasi produk, pelatihan, dan *business matching* terhadap para pelaku usaha UMKM yang dilakukan secara berkelanjutan.



Grafik 4.20 Perkembangan Kredit UMKM

BOKS 2

Mengenalkan Produk Kepri Ke Mancanegara Melalui Gebyar Melayu Pesisir



Gambar B2.1 Opening Ceremony Gebyar Melayu Pesisir

Bank Indonesia turut serta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui program-program pengembangan UMKM. Berbagai program dijalankan dengan tujuan meningkatkan kapasitas, kualitas, dan daya saing usaha. Sepanjang tahun 2023, program pengembangan UMKM dijalankan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (BI Kepri) dalam rangkaian Gebyar Melayu Pesisir (GMP) yang diselenggarakan sejak awal tahun secara *roadshow* di seluruh Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau. Kegiatan GMP meliputi kurasi, pameran produk UMKM, layanan perizinan dan sertifikasi halal, edukasi keuangan inklusif, *onboarding* QRIS, serta festival budaya.

Road-to GMP telah dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota dari Bulan Mei s.d. Agustus 2023. *Road to* GMP mencatatkan penjualan produk-produk UMKM baik dalam pameran maupun secara *online* sebesar Rp4,9 miliar. Dalam rangkaian *Road to* GMP juga dilakukan kurasi untuk menemukan produk-produk UMKM unggulan setempat yang diikuti oleh 417 UMKM. Selain bersinergi dengan event daerah, *Road to* GMP juga disinergikan dengan berbagai event nasional seperti Penguatan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah oleh Wakil Presiden di

Kabupaten Bintan dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) *Summit* 2023 yang dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang di Kabupaten Karimun.

Setelah berhasil dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota, puncak GMP dilaksanakan bersinergi dengan Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT) pada 26 September s.d. 1 Oktober 2023. Rangkaian puncak GMP dibuka dengan *opening ceremony* yang dihadiri secara virtual oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta secara langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, para delegasi IMT-GT dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand, serta Forkompimda Provinsi Kepulauan Riau. Pada malam harinya, diselenggarakan *fashion show* yang menampilkan 7 desainer unggulan binaan KPwBI Kepulauan Riau dan 4 besar finalis *High School Design Competition*.

Di dalam puncak GMP juga diselenggarakan seminar nasional "UMKM Ekspor Hub dalam Perluasan Akses Pasar Produk UMKM hingga Mancanegara" yang membahas tentang peluang pasar ekspor produk



Gambar B2.2 Implementasi QRIS Cross Border oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto

UMKM Kepri serta seminar internasional “Cross Border QR Payment to Support Tourism” yang membahas tentang implementasi pembayaran lintas negara melalui QR payment. Berbagai tokoh menjadi narasumber, antara lain Deputy Director Payments and Fintech Department Bank of Thailand, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Deputy Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala BI Singapura, serta Senior Manager Bank Central Asia.

Puncak GMP disertai dengan pameran produk UMKM unggulan dari Kepri, Malaysia, dan Thailand, serta bazar kuliner lokal khas Kepri. Di sepanjang pelaksanaan pameran tercatat penjualan produk UMKM sebesar Rp984 juta serta penjualan secara *online* sebesar Rp3,8 miliar. Untuk meningkatkan transaksi digital, pameran GMP melayani

penjualan dengan pembayaran melalui QRIS. Selain itu, pembelian produk Malaysia dan Thailand juga dapat dilakukan dengan QRIS *cross border* yang juga telah dicoba langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Ekonomi Malaysia, dan Deputy Menteri Keuangan Thailand dalam kunjungannya.

Rangkaian puncak GMP diakhiri dengan jalan sehat dan pemecahan rekor MURI sajian teh tarik terbanyak sebanyak 2.409 gelas. Pada malam harinya, kegiatan ditutup dengan penampilan band Gigi yang terbuka bagi masyarakat Batam dan sekitarnya. Seluruh rangkaian GMP yang berjalan selama beberapa bulan telah memberikan dampak yang positif bagi pengembangan UMKM di Kepulauan Riau dan akan dilanjutkan kembali sebagai kegiatan rutin tahunan.



Gambar B2.3 Demonstrasi Pembuatan Teh Tarik pada Pemecahan Rekor MURI Sajian Teh Tarik Terbanyak



Gambar B2.4 Seminar Internasional

BAB V

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Inflow Uang Kartal



Tw III
2023

Rp 1,08T



Tw II
2023

Rp 1,56T

Outflow Uang Kartal



Tw III
2023

Rp 2,20T



Tw II
2023

Rp 3,12T

Net Flow Uang Kartal



Tw III
2023

Rp 1,12T
Net Outflow



Tw II
2023

Rp 1,56T
Net Outflow

Transaksi RTGS



Tw III
2023

Rp 45,86T
4,51% (yoy)



Tw II
2023

Rp 37,47T
5,90% (yoy)

Transaksi SKNBI



Tw III
2023

Rp 2,78T
1,49% (yoy)



Tw II
2023

Rp 2,54T
2,26% (yoy)

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah dan transaksi Uang Kertas Asing di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalami peningkatan pada triwulan III 2023. Selain itu, transaksi pembayaran nontunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital khususnya *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

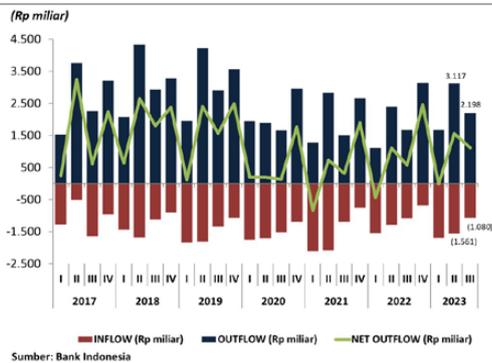


Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan III 2023 mencatatkan *net outflow* sebesar Rp1,12 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2023 yang tercatat *net outflow* sebesar Rp1,56 triliun. Perkembangan aliran uang tersebut sejalan kinerja ekonomi yang tumbuh positif dan kembali pada pola musiman kebutuhan uang tunai yang mengalami normalisasi setelah meningkat pada triwulan sebelumnya selama periode HBKN Idul Fitri. Selain itu, aktivitas pembayaran nontunai secara tahunan meningkat. Hal ini tercermin dari peningkatan transaksi QRIS dan Uang Elektronik (UE) yang didukung oleh meningkatnya preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap penggunaan transaksi nontunai.

5.1 TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI

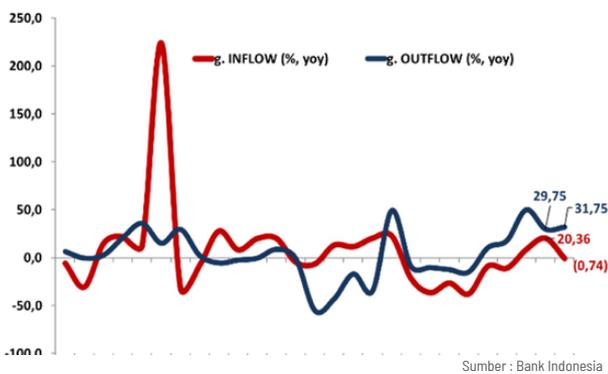
5.1.1 Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (*Inflow*^{1/} *Outflow*²)

Pada triwulan III 2023, pergerakan aliran uang tunai tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp1,12 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai *net outflow* sebesar Rp1,56 triliun. Hal ini sejalan dengan kinerja ekonomi yang tumbuh positif.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.1 Perkembangan Inflow dan Outflow Keprri



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.2 Perkembangan Pertumbuhan Inflow dan Outflow

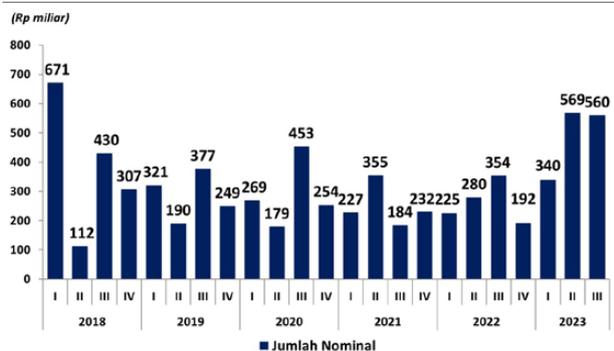
Jumlah aliran uang kartal yang keluar (*outflow*) pada triwulan III 2023 berjumlah Rp2,20 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2023 sebesar Rp3,12 triliun. Pada saat yang sama, aliran uang kartal yang masuk (*inflow*) tercatat sebesar Rp1,08 triliun, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp1,56 triliun. Kondisi *net outflow* pada periode laporan mengindikasikan perekonomian yang semakin kuat sejalan dengan konsumsi rumah tangga, pemerintah, dan LNPR di Kepri yang tumbuh positif diiringi mobilitas masyarakat yang semakin meningkat.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan uang tunai di Provinsi Kepri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau terus menyelenggarakan kegiatan kas titipan³ yang tersebar di tiga tempat yakni Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Karimun. Selama periode Januari – September 2023, kas titipan telah melakukan pengiriman sebanyak sepuluh kali. Selain itu, telah dilaksanakan kegiatan kas keliling dalam kota dan kas keliling luar kota untuk daerah 3T (terdepan, terluar dan terpencil) untuk menjamin tersedianya Rupiah yang layak edar bagi seluruh masyarakat Kepri.

5.1.2 Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Bank Indonesia berperan dalam penyediaan uang kartal layak edar yang melibatkan beberapa aspek penting, mulai dari penerbitan uang yang berkualitas, pengaturan jumlah uang beredar, edukasi masyarakat, hingga pemeliharaan kualitas uang layak edar. Dalam rangka memelihara kualitas uang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia menjalankan *Clean Money Policy* dengan melakukan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE).

Uang kartal tidak layak edar yang dimusnahkan pada triwulan III 2023 tercatat sebanyak Rp560 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berjumlah Rp569 miliar. Penurunan jumlah pemusnahan UTLE tersebut mengindikasikan terkendalinya jumlah UTLE sejalan dengan program edukasi dan sosialisasi CBP



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.3 Perkembangan Pemusnahan UTLE

1 *Inflow* : aliran uang masuk ke Bank Indonesia melalui setoran bank,
2 *Outflow* : aliran uang keluar dari Bank Indonesia melalui penarikan bank

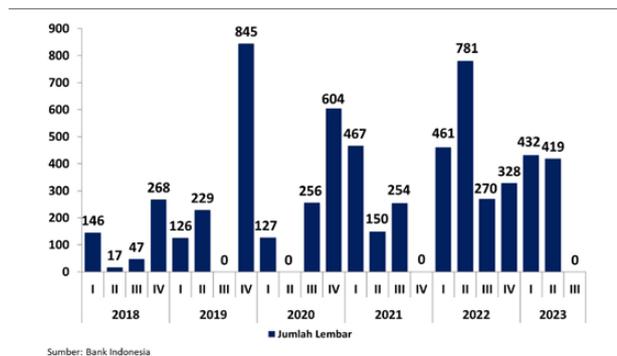
3 Kas Titipan merupakan salah satu upaya mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia terkait pagedaran uang sekaligus memfasilitasi perbankan dalam hal penyetoran dan penarikan uang tunai dikarenakan keterbatasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah. Pelaksana Kas Titipan yaitu Bank Mandiri Tanjungpinang, Bank Riau Kepri Natuna dan BNI Tanjung Balai Karimun.

Rupiah. Pemusnahan uang kartal tidak layak edar ini meliputi uang yang mengalami kerusakan berat maupun telah mencapai masa edarnya.

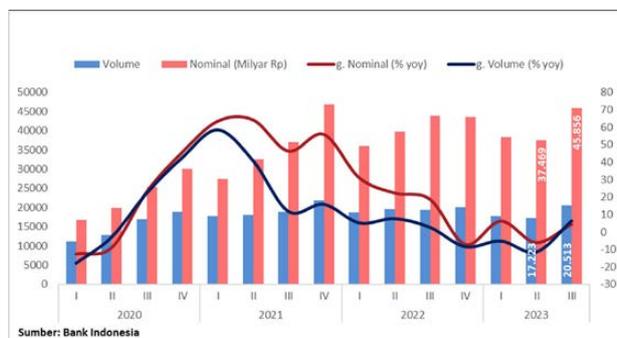
5.1.3 Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu (UPAL)

Dalam rangka meningkatkan kecintaan, pemahaman, dan kebanggaan terhadap Rupiah maka sejumlah kegiatan edukasi Cinta, Bangga dan Paham (CBP) Rupiah terus dilakukan ke masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan ciri keaslian uang Rupiah, menumbuhkan kecintaan pada Rupiah dan membangkitkan kebanggaan menggunakan Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara. Selama triwulan III 2023, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan 13 kali edukasi CBP Rupiah.

Melalui edukasi CBP Rupiah tersebut diharapkan pemahaman masyarakat dalam mengenali ciri keaslian uang Rupiah semakin meningkat dan dapat menekan peredaran uang palsu. Selama triwulan III 2023 terdapat 0 lembar temuan uang palsu di wilayah Kepri, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebanyak 419 lembar uang palsu.



Grafik 5.4 Perkembangan Temuan Uang Palsu



Grafik 5.5 Perkembangan RTGS di Provinsi Kepri

5.2 TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI

5.2.1 Transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS)

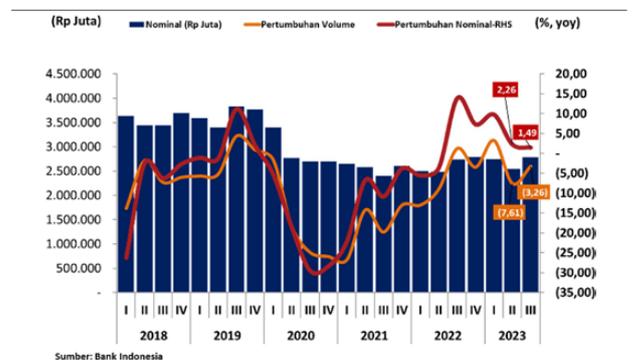
Nominal transaksi sistem Real-Time Gross Settlement (RTGS) triwulan III 2023 meningkat dibandingkan triwulan II 2023. Transaksi BI-RTGS di Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 tercatat mencapai Rp45,85 triliun atau tumbuh sebesar 4,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 5,90% (yoy). Sejalan dengan peningkatan nominal transaksi tersebut, volume transaksi juga mengalami peningkatan. Tren peningkatan transaksi RTGS mengindikasikan layanan ini masih cukup diminati pelaku usaha dengan mempertimbangkan kecepatan layanan transfer dana.

5.2.2 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Pada saat yang sama, pertumbuhan jumlah transaksi kliring selama triwulan III 2023 mengalami penurunan dari 2,26% (yoy) menjadi 1,49% (yoy). Sementara itu, jumlah warkat debit SKNBI yang dipertukarkan meningkat dari 60.104 lembar menjadi 66.593 lembar. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah kliring warkat kredit juga mengalami peningkatan. Secara nominal meningkat dari Rp3,22 triliun menjadi Rp3,61 triliun pada triwulan III 2023 dan secara volume meningkat dari 66.535 lembar menjadi 67.249 lembar. Layanan jasa transfer kini semakin beragam. Selain BI RTGS dan SKNBI, ada BI FAST yang menyediakan layanan transfer 24/7.

5.2.3 Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE)

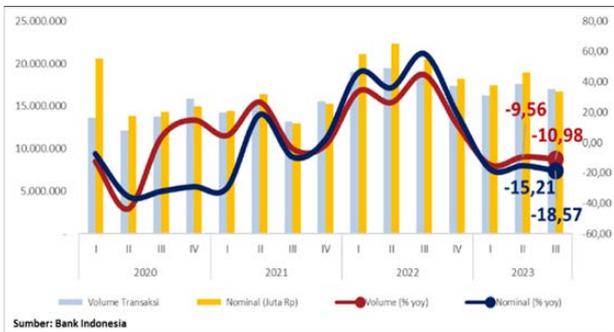
Transaksi menggunakan kartu debit pada triwulan III 2023 mengalami deselerasi dari sisi nilai transaksi maupun sisi volume transaksi seiring dengan preferensi masyarakat dalam menggunakan QRIS untuk pembayaran transaksi nominal kecil. Nilai transaksi kartu debit terkontraksi sebesar 18,57% (yoy) lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 15,21%. Sementara itu, volume transaksi terkontraksi sebesar 10,98% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 9,56% (yoy).



Grafik 5.6 Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Kepri

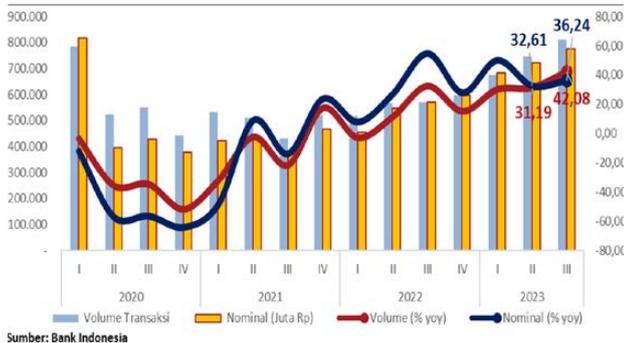
Di sisi lain, volume menggunakan kartu kredit pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 42,08% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2023 yang tumbuh sebesar 31,19% (yoy). Selain itu, nominal transaksi tumbuh dari 32,61% (yoy) menjadi 36,24% (yoy). Peningkatan nilai transaksi kartu kredit didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat. Selain itu, hal tersebut mengindikasikan terjadinya pelonggaran standar penyaluran kredit/pembiayaan perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kepri yang tumbuh positif.

Jumlah transaksi menggunakan UE di wilayah Kepri pada triwulan III 2023 tercatat Rp792,09 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2023 sebesar Rp712,17 miliar. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan kinerja perekonomian Kepri yang tumbuh positif. Sebagai upaya untuk meningkatkan transaksi menggunakan UE, Bank Indonesia terus mendorong penggunaan transaksi nontunai khususnya QRIS.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.7 Perkembangan Transaksi Kartu Debit



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.8 Perkembangan Transaksi Kartu Kredit



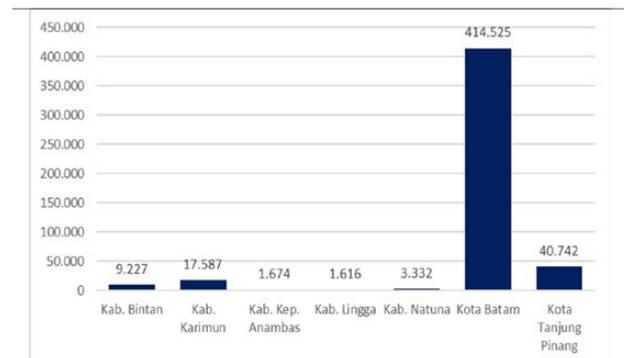
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.9 Perkembangan Transaksi UE di Provinsi Kepri

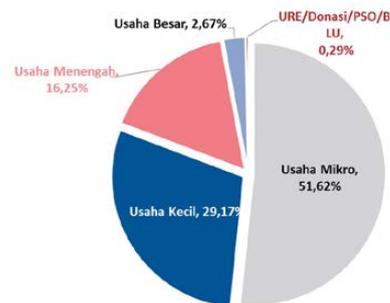
5.2.4 Perkembangan QRIS

Pada tahun 2023, implementasi QRIS di wilayah Kepri tumbuh secara signifikan dan diharapkan dapat mendukung sistem pembayaran yang aman, lancar dan handal serta turut mendorong inklusi keuangan khususnya pada UMKM. Dari sisi user/pengguna, pada Triwulan III 2023 mencapai 384.114 pengguna baru, meningkat sebesar 39.441 pengguna atau tumbuh sebesar 11,44% (qtq) dibandingkan dengan Triwulan II 2023. Selain itu, dari sisi transaksi, pada Triwulan III 2023 terdapat penambahan total transaksi sebesar 4.648.039 transaksi atau tumbuh sebesar 29,67% dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya. Adapun nominal transaksi QRIS di Kepri pada Triwulan III 2023 adalah sebesar Rp.647,32 Juta atau tumbuh sebesar 8,12% dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

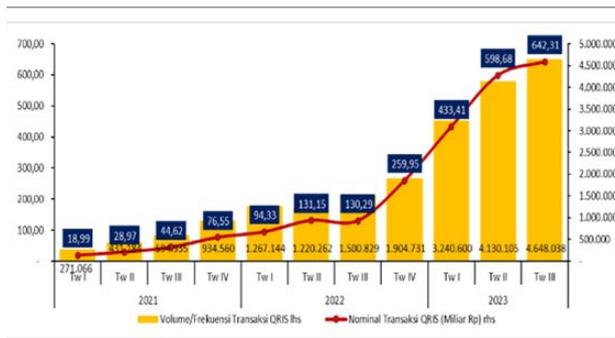
Sampai dengan akhir triwulan III 2023, jumlah merchant QRIS di Provinsi Kepri telah mencapai 488.703 merchant, meningkat sebesar 24.356 atau tumbuh sebesar 5,25% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Mayoritas merchant berlokasi di Kota Batam (84,82%), diikuti oleh Kota Kota Tanjungpinang (8,34%) dan Kab. Karimun (3,60%). Merchant QRIS di wilayah Kepri didominasi oleh kategori Mikro dengan pangsa sebesar 51,62%, diikuti kategori Usaha Kecil (29,17%), dan Usaha Menengah (16,25%). Berdasarkan hal tersebut, 82% transaksi dilakukan oleh UMKM dengan rata-rata nominal transaksi sebesar Rp.127.694.



Grafik 5.10 Perkembangan QRIS berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepri

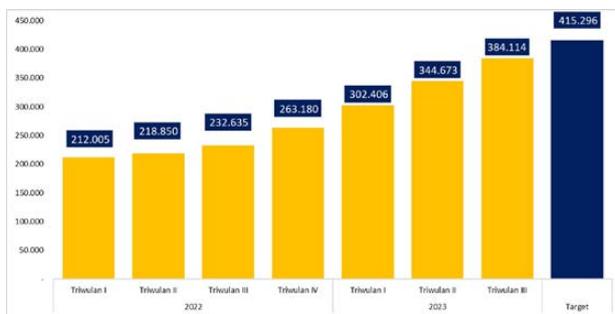


Grafik 5.11 Perkembangan Merchant QRIS berdasarkan Kelompok Usaha



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.12 Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Provinsi Kepri



Sumber : Bank Indonesia (data diolah)

Grafik 5.13 Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kepri

5.2.5 Intensifikasi Sistem Pembayaran Nontunai

Upaya perluasan penggunaan transaksi digital (QRIS) terus dilakukan pada berbagai sektor dan segmen pengguna. Sebagai upaya mendorong akselerasi implementasi QRIS di Kepri, beberapa strategi yang dilakukan antara lain: (1) Sinergi dan kolaborasi bersama Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan *stakeholders* terkait; (2) Edukasi/sosialisasi, *on boarding*, *showcasing*, dan *QRIS Experience* melalui berbagai kegiatan seperti (a) *QRIS Goes to School/Campus*, (b) Kolaborasi pada kegiatan/ *event* strategis di Kepri, dan (c) Sinergi *event* strategis BI; (3) Sinergi dan kolaborasi bersama media; (4) Mendorong penggunaan *QRIS Cross Border* utamanya dengan Malaysia melalui publikasi, sosialisasi, dan edukasi. Upaya perluasan implementasi QRIS yang dilaksanakan selama triwulan III 2023 antara lain:

- Sinergi, Kolaborasi, dan Koordinasi bersama PJP, Pemda, BP Batam, Media, Pelaku Usaha, Penggiat Pariwisata, Komunitas, dan Instansi Lainnya
- Sosialisasi dan Komunikasi Kebijakan QRIS kepada Pelajar/ Mahasiswa, Pemerintah/ASN, UMKM, Media Sosial, Pengurus Rumah Ibadah, dan Masyarakat Umum (telah terlaksana sebanyak 45 kali)
- Perluasan QRIS pada Sektor Prioritas, seperti: Kawasan Wisata, Kawasan Bandara, Kawasan Pelabuhan, Transaksi Pemerintah (Pajak dan Retribusi), Rumah Ibadah, Sarana Kesehatan, Pasar/ Pusat Perbelanjaan, dan Transportasi Umum

- Pelaksanaan *Event Strategis* melalui kegiatan *Showcasing*, *QRIS Experience*, dan *On Boarding Merchant* dan *User QRIS*. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya:

- Kolaborasi Pekan QRIS Nasional bersama dengan HIPMI FEST dan BRImo FSTVL
- Creative and Innovative Riau Islands Carnival (CERNIVAL) 2023*
- Flagship Event* Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2023
- Kolaborasi *Event* bersama Batam News Festival
- Kolaborasi *Event* Pekan Heboh 10K

Bank Indonesia Kepri akan terus mendorong usaha pada sektor pariwisata serta sektor pendukung lainnya untuk dapat mengimplementasikan QRIS serta mengakselerasi ekosistem pembayaran digital khususnya di sektor pariwisata Kepri melalui intensifikasi sosialisasi QRIS. Saat ini implementasi QRIS sudah dilakukan di beberapa Pelabuhan seperti Pelabuhan Sri Tanjung Gelam Karimun, Sei Tenam Lingga, Pelabuhan Punggur Batam, Pelabuhan Sekupang, Sri Bintan Pura Tanjungpinang, dan Kawasan Pelabuhan Harbour Bay untuk mendukung kawasan wisata di wilayah Kepri. Lebih lanjut, implementasi QRIS di kawasan wisata di Kepri telah dilakukan di berbagai sektor seperti perhotelan (Bintan Resort Cakrawala, Anmon Bintan, Lagoi Bay, Natra Bintan, dsb), kuliner (Kawasan Kuliner Bengkong), Desa Wisata Ekang, Kawasan KEK Nongsa, Nongsa Sensation, dan kawasan rekreasi lainnya (Taman Rusa Batam, Tering Bay Golf & Country Club, dsb).

5.2.6 Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terus dilakukan dalam rangka perluasan *cashless society* dan keuangan inklusif dengan menyediakan saluran pembiayaan nontunai dalam pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah. Implementasi ETPD sepanjang tahun 2022 dan 2023 terus mengalami peningkatan khususnya di wilayah Kepri. Hasil dari pengisian Indeks ETPD Semester I 2023 menunjukkan seluruh wilayah di Provinsi Kepri telah mencapai tahap ETPD Digital. Hal tersebut sejalan dengan penggunaan kanal digital (QRIS dan non QRIS) untuk pendapatan pajak dan retribusi yang semakin meningkat, namun masih dapat terus didorong. Potensi peningkatan realisasi melalui kanal digital cukup tinggi pada pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan mineral bukan logam serta retribusi pelayanan kesehatan dan parkir tepi jalan umum seiring dengan besarnya pangsa terhadap total pajak dan retribusi daerah. Pada tahun 2023, seluruh Pemda di Kepri telah memiliki status IETPD digital.

Adapun strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia Kepri dalam mendorong implementasi ETPD, diantaranya: perluasan kanal pembayaran digital dalam transaksi Pemerintah Daerah, peningkatan transaksi non-tunai melalui QRIS dan Teller untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah, penguatan aspek lingkungan strategis,

khususnya pelaksanaan sosialisasi oleh Pemerintah Daerah, serta koordinasi dan sinergi bersama Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selain itu, beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendorong implementasi ETPD di Kepri sepanjang triwulan III 2023: *Coaching Clinic* dan Pendampingan Pengisian *Championship TP2DD*, *Capacity Building* dan Studi Banding TP2DD Kepri di Bali, dan *Coaching Clinic*, Pendampingan Pengisian IETPD, Rakor bersama Pemda dan BRKS Kota Tanjungpinang, Kab. Natuna, Kab Lingga, dan Kab. Bintan, Rakor terkait Progress Implementasi KKI bersama seluruh Pemda dan BRKS di wilayah Kepri, *Launching Bus pajak Keliling "SI BIJAK"* dan QRIS PBB P2 di Kota Batam, *Launching Integrasi CMS dan SP2D Online SI PANGKAS* (Sistem Pencairan Ringkas) Pemprov. Kepri, HLM bersama Gub. Kepri terkait Sistem Pembayaran di Prov. Kepri, Rapat Koordinasi bersama Dishub Tanjungpinang, dan *Launching E-Pantun* (Pembayaran Parkir Dengan QRIS) Kota Tanjungpinang.

5.2.7 Bantuan Sosial Nontunai

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kepri mendukung akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah melalui program penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) nontunai. Program Bansos yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Program Kartu Pra Kerja. Sampai dengan

triwulan III 2023, tingkat penyerapan sembako pada Triwulan III 2023 sebesar 93,95% atau kepada 115.106 KPM. Persentase penyerapan pada Triwulan III relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Triwulan II 2023 (83%). Tingkat penyerapan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) pada Triwulan III 2023 sebesar 98,33% atau kepada 39.464 KPM. Tingkat penyerapan pada Triwulan III relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yakni 98,82%. Penyaluran bansos pada tahun 2023 dilakukan melalui dua mekanisme yakni: secara non tunai oleh Himbara (BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BSI), serta secara tunai melalui PT Pos Indonesia.

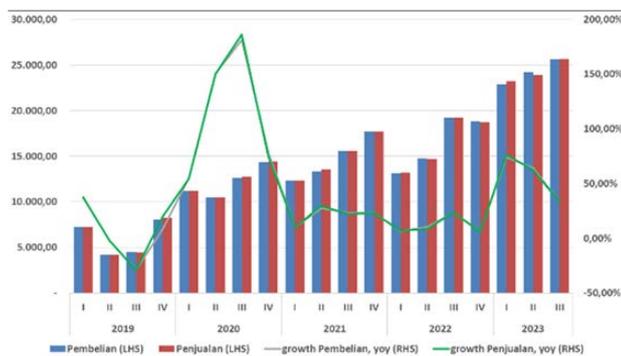
Penanggulangan kemiskinan juga dilakukan melalui Program Sembako yang merupakan program Bansos pangan dari Kementerian Sosial sebagai transformasi dari Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Berdasarkan data hingga September 2023, jumlah penerima Program Sembako di Kepri tercatat sebanyak 145.903 KPM dengan total bantuan sebesar Rp29,18 miliar atau terserap sebesar 83,04%.

5.3 TRANSAKSI KUPVA BB DAN PJP LR

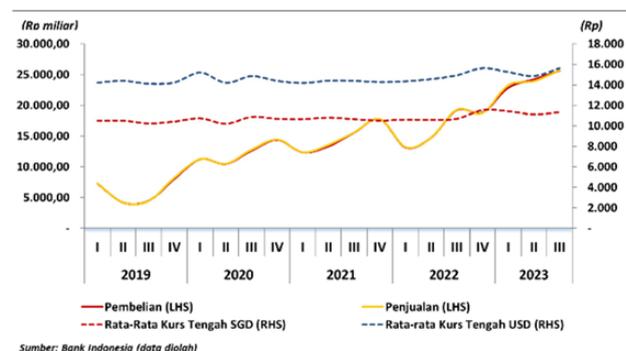
Dalam rangka menjaga kelancaran transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) di Provinsi Kepri, Kantor

Tabel 5.1 Penyaluran PKH Tahap 2 di Wilayah Provinsi Kepri

PROVINSI	KAB/KOTA	Penyalur	SP2D (Jml KPM)	SP2D (Nominal)	Penyaluran (Jml KPM)	Penyaluran (Nominal)	% Penyaluran (Jml KPM)	% Penyaluran (Nominal)	Penyerapan (Jml KPM)	% Penyerapan (Jml KPM)	Mekanisme
KEPULAUAN RIAU	BINTAN	BRI	5.256	Rp 1.051.200.000	5.256	Rp 1.051.200.000	100,00%	100,00%	4.743	90,24%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	BINTAN	POS	560	Rp 112.000.000	535	Rp 107.000.000	96,79%	95,54%	535	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	BNI	8.396	Rp 1.679.200.000	8.396	Rp 1.679.200.000	100,00%	100,00%	7.412	88,28%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	POS	289	Rp 57.800.000	263	Rp 52.600.000	82,57%	91,00%	263	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	BRI	1.230	Rp 246.000.000	1.230	Rp 246.000.000	100,00%	100,00%	1.019	82,85%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	POS	119	Rp 23.800.000	107	Rp 21.400.000	85,95%	89,92%	107	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	BRI	23.187	Rp 4.637.400.000	23.187	Rp 4.637.400.000	100,00%	100,00%	21.516	92,79%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	POS	2.799	Rp 559.800.000	2.396	Rp 479.200.000	89,29%	85,60%	2.396	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG	BNI	5.780	Rp 1.156.000.000	5.780	Rp 1.156.000.000	100,00%	100,00%	5.054	87,44%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG	POS	226	Rp 45.200.000	215	Rp 43.000.000	95,51%	95,13%	215	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	LINGGA	BRI	7.187	Rp 1.437.400.000	7.187	Rp 1.437.400.000	100,00%	100,00%	6.888	95,84%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	LINGGA	POS	1.213	Rp 242.600.000	1.191	Rp 238.200.000	98,77%	98,19%	1.191	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	NATUNA	POS	2.325	Rp 1.732.950.000	2.224	Rp 1.667.025.000	95,66%	96,20%	2.224	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	NATUNA	POS	2.216	Rp 1.855.450.000	2.190	Rp 1.637.150.000	98,83%	98,89%	2.190	100,00%	TUNAI



Grafik 5.14 Perkembangan Transaksi KUPVA



Grafik 5.15 Pergerakan Transaksi KUPVA & Nilai Tukar Rupiah

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan *monitoring* perizinan dan pengawasan terhadap operasional 115 KUPVA Bukan Bank dan 60 PJP Layanan Remitansi yang berada di Provinsi Kepri hingga triwulan III 2023.

5.3.1 Perkembangan Transaksi KUPVA Bukan Bank (KUPVA BB)

Transaksi jual beli valas melalui KUPVA BB selama triwulan III 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dengan jumlah transaksi pembelian Uang Kertas Asing (UKA) tercatat sebesar Rp25,63 triliun atau tumbuh 33,28% (*yoy*), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp24,22 triliun. Di sisi lain, total transaksi penjualan UKA pada triwulan III 2023 berjumlah Rp25,66 triliun atau tumbuh 33,24% (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp23,90 triliun. Adapun mata uang yang mendominasi transaksi penjualan valuta asing pada triwulan III 2023 yakni Dolar Singapura (77,72%), Dolar Amerika Serikat (11,18%), Renminbi Tiongkok (6,26%), dan Ringgit Malaysia (2,01%).

5.3.2 Perkembangan Transaksi Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR)

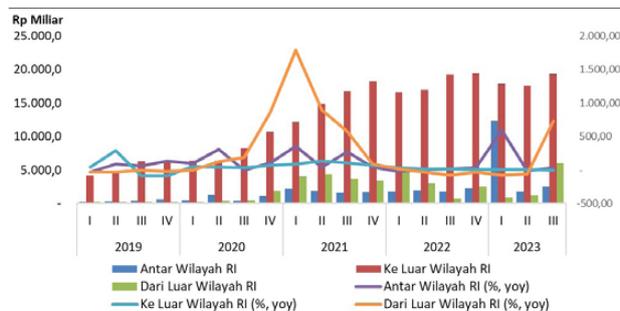
Transaksi transfer dana melalui PJP LR di wilayah Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 tercatat tumbuh sebesar 27,80% (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 5,82% (*yoy*). Peningkatan transaksi terutama terjadi pada jenis transaksi antar wilayah RI dan ke luar wilayah RI sejalan dengan ekonomi Kepri yang tumbuh positif. Lebih lanjut, transaksi dari luar wilayah RI masuk ke RI juga meningkat seiring dengan membaiknya mobilitas masyarakat seiring dengan mereda pandemi Covid-19.

Berdasarkan jenis transaksinya, komposisi transaksi pada PJP LR di Kepri masih didominasi oleh jenis transaksi ke luar wilayah Indonesia dengan pangsa sebesar 69,44%, diikuti transaksi antar wilayah di Republik Indonesia sebesar 8,90% dan transaksi masuk dari luar wilayah Indonesia sebesar 21,66%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa PJP LR di Provinsi Kepri lebih banyak digunakan untuk memfasilitasi pengiriman dana keluar wilayah Indonesia antara lain untuk keperluan pembayaran transaksi pembelian barang impor

maupun transaksi lainnya. Sejalan dengan transaksi pada PJP LR yang meningkat, jumlah PJP LR di Kepri pada triwulan III 2023 masih sama dengan triwulan II 2023 yang berjumlah 59 dengan sebaran 44 PJP LR di Kota Batam, 6 di Kota Tanjungpinang serta 9 di Kabupaten Karimun.

5.3.3 Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Provinsi Kepulauan Riau

Dalam rangka meningkatkan keberdayaan konsumen, KPwBI Provinsi Kepri melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran *Coastal Era: Consumer Protection and Data Security in Digital Era* dengan tema "Empowering Digital Consumer". Sosialisasi bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sosialisasi, dengan pencapaian pemahaman rata-rata peserta sebesar 75% mengenai perlindungan konsumen Bank Indonesia. KPwBI Provinsi Kepri secara aktif melakukan fungsi edukasi Pelindungan Konsumen melalui sosialisasi daring dan luring serta pembuatan konten infografis dan video di media sosial.



Sumber: Bank Indonesia (data diolah)

Sumber: Bank Indonesia (data diolah)

Grafik 5.16 Perkembangan Transaksi Pada PJP LR

BOKS 3

PEKAN QRIS NASIONAL (PQN) 2023

Akselerasi Akseptasi QRIS di Kepulauan Riau

Dalam rangka mendorong ekosistem ekonomi dan keuangan digital melalui akseptasi QRIS di seluruh Indonesia, Bank Indonesia mengadakan kegiatan Pekan QRIS Nasional (PQN) yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 14-20 Agustus 2023 di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023. Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Pekan QRIS Nasional dengan rangkaian kegiatan yang dibagi menjadi Pre PQN dan PQN serta dilanjutkan dengan kegiatan *Creative and Innovative Riau Islands Carnival* (CERNIVAL) untuk dapat lebih memperluas dampak atau manfaat yang diperoleh melalui sinergi dan kolaborasi lintas unit kerja serta PJP dan Pemda.

Pre-PQN di Kepri dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Rapat koordinasi untuk mendorong implementasi non tunai pada transportasi Trans Batam
2. *Training of Trainers* dalam rangka Pemilihan Duta QRIS Kepri
3. Launching Bus Pajak Keliling SI BIJAK dan QRIS PBB P2 Kota Batam

4. Launching Integrasi CMS dan SP2D Online SI PANGKAS
5. Launching Pembelian Tiket Transportasi Kapal ke Singapura melalui Kanal Non Tunai,
6. Sosialisasi QRIS bagi Guru TK-SMA/SMK di Kota Batam.

Selanjutnya, PQN 2023 dilaksanakan melalui sosialisasi kepada pelajar, mahasiswa, dan pengurus rumah ibadah di Kota Batam serta *QRIS Goes to School* kepada SMA Negeri 3 Kota Batam yang disusul dengan pelaksanaan kegiatan *showcasing*, *on boarding*, dan *QRIS experience* di Kab. Natuna. Untuk mendorong penggunaan QRIS pada sektor transportasi, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau berkolaborasi bersama Dishub Kota Batam memberikan insentif berupa *reward* bagi penumpang Trans Batam yang bertransaksi melalui QRIS selama periode PQN. Selain itu, kegiatan PQN juga dilaksanakan melalui kolaborasi dan sinergi bersama HIPMI dan BRImo FSTVL pada kegiatan festival kuliner di Kawasan Harbour Bay. Untuk terus mendorong perluasan QRIS di Kepulauan Riau, Bank Indonesia Kepri melaksanakan *Creative and Innovative Riau Islands Carnival* (CERNIVAL) yang dilaksanakan di One Batam Mall pada 26-27 Agustus 2023. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil



Gambar B3.1 Pre-PQN : Rapat Koordinasi Bersama Dishub Kota Batam, *Training Of Trainers* Pemilihan Duta QRIS Kepri, *Launching* Bus Pajak Keliling SI BIJAK Dan QRIS PBB P2 Kota Batam, *Launching* Integrasi CMS Dan SP2D Online SI PANGKAS, *Launching* Pembelian Tiket Transportasi Kapal Ke Singapura Melalui Kanal Non Tunai, dan Sosialisasi QRIS Bagi Guru TK-SMA Di Kota Batam



Gambar B3.2 Kegiatan PQN: Sosialisasi Kepada Pelajar, Mahasiswa, dan Pengurus Rumah, QRIS Goes To School, Showcasing, On Boarding, dan QRIS Experience Di Kab. Natuna, Kolaborasi Bersama HIPMI Dan Brimo FSTVL

Gubernur Kepulauan Riau – Hj. Marlin Agustina bersama dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri – Suryono yang dihadiri oleh seluruh *stakeholder* seperti PJP, pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, penggiat usaha, dan masyarakat umum. CERNIVAL dilaksanakan melalui beberapa rangkaian kegiatan diantaranya QRIS experience, *showcase* dan *bazaar* UMKM, BI Talks, Fashion Show, Donor Darah, Petualangan BI, Noraebang, Cosplay Competition, E-Sport, K-POP Dance Cover Competition, UMKM Battle, Pemilihan Duta QRIS Kepri, Doorprize, yang ditutup dengan pelaksanaan Konser Musik Band Nidji dengan registrasi melalui QRIS Experience Rp1 bagi masyarakat umum. CERNIVAL berhasil menghadirkan lebih dari 13.000 pengunjung selama dua hari pelaksanaan kegiatan.

Berbagai rangkaian kegiatan mulai dari Pra PQN sampai dengan CERNIVAL dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pendapatan UMKM, meningkatkan literasi masyarakat dalam bertransaksi secara digital, serta membangun komitmen bersama untuk terus mendorong akseptasi digital melalui QRIS sebagai *game changer* yang akan terus diperluas pada sektor prioritas seperti: kawasan wisata, bandara, rumah ibadah, sarana kesehatan, pasar, transportasi umum, dan transaksi pemerintah daerah dalam rangka terbentuknya ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif serta mewujudkan visi *Smart City* di Kepulauan Riau.



Gambar B3.3 Opening Ceremony CERNIVAL



Gambar B3.4 Pemilihan Duta QRIS Kepri



Gambar B3.5 Sosialisasi dan Showcasing QRIS



Gambar B3.6 Opening Ceremony CERNIVAL



BAB VI

Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan

Jumlah Angkatan Kerja



Agustus 2023
1.093.686
 Jiwa



Agustus 2022
1.259.712
 Jiwa

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



Agustus 2023
68,68%



Agustus 2022
68,94%

Tingkat Pengangguran Terbuka



Agustus 2023
6,80%



Agustus 2022
8,23%

Nilai Tukar Petani



Tw III 2023
104,59



Tw II 2023
105,06

Tingkat Kemiskinan



Maret 2023
5,69%



September 2022
6,03%

Indeks Pembangunan Manusia



Tahun 2023
79,08



Tahun 2022
78,48

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perbaikan tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Namun Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami penurunan seiring terjadinya kenaikan indeks yang harus dibayarkan petani.



Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri

Indikator	Periode				Perubahan 1 Tahun	
	Ags'20	Ags'21	Ags'22	Ags'23	Orang	% Perubahan
Angkatan Kerja	1.133.776	1.207.014	1.259.712	1.093.686	(166.026)	-13,18%
Bekerja	1.016.600	1.087.419	1.155.997	1.019.356	(136.641)	-11,82%
Pengangguran	117.176	119.595	103.715	74.330	(29.385)	-28,33%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,34%	9,91%	8,23%	6,80%		-1,43%
- Perdesaan	5,41%	4,43%	5,88%	7,00%		1,12%
- Perkotaan	10,89%	10,45%	8,52%	6,77%		-1,75%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,28%	68,27%	68,94%	68,68%		

Sumber: BPS (data diolah)

6.1 KETENAGAKERJAAN

6.2.1 Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Kepri terus melanjutkan perbaikan tercermin dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)¹ yang menurun. TPT pada Agustus 2023 berada pada level 6,80%, menurun 1,43% poin dibandingkan Agustus 2022 yang tercatat 8,23%. Perbaikan tersebut utamanya terjadi di perkotaan yang mengalami penurunan TPT dari 8,52% pada Agustus 2022 menjadi 6,77% pada Agustus 2023. Hal tersebut sejalan dengan mobilitas masyarakat yang meningkat dan normalisasi aktivitas usaha seiring pandemi Covid-19 yang telah berakhir.

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, secara tahunan hampir seluruh level pendidikan mengalami perbaikan TPT yaitu kelompok pendidikan SMP, SMA, SMK dan Diploma yang membaik dari 10,38%, 11,03%, 11,34% dan 3,51% pada Agustus 2022 menjadi 5,87%, 7,85%, 9,99% dan 2,93% pada Agustus 2023. Sementara kelompok pendidikan ≤SD dan Universitas mengalami peningkatan masing-masing sebesar 3,31% dan 2,50% pada Agustus 2022 menjadi 5,44% dan 3,53% pada Agustus 2023.

Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepri didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan pangsa sebanyak 25,23% dari jumlah tenaga kerja pada Agustus 2023, sedikit menurun dibandingkan Agustus 2022 dengan pangsa 25,77%. Hal ini mencerminkan bahwa LU Industri Pengolahan memiliki peran yang strategis sebagai penyumbang PDRB terbesar dan menyediakan lapangan kerja formal

Tabel 6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Persentase Pengangguran					
		Aug'18	Aug'19	Aug'20	Aug'21	Aug'22	Aug'23
1	≤SD	2,39%	3,89%	4,25%	7,76%	3,31%	5,44%
2	SMP	6,04%	5,33%	9,92%	11,72%	10,38%	5,87%
3	SMA	12,37%	10,49%	11,02%	11,75%	11,03%	7,85%
4	SMK	14,30%	10,22%	16,55%	9,96%	11,34%	9,99%
5	Diploma I/II/III	0,84%	3,77%	9,56%	8,82%	3,51%	2,93%
6	Universitas	1,39%	5,07%	7,75%	7,09%	2,50%	3,53%

Sumber: BPS (diolah)

terbanyak di Provinsi Kepri. LU berikutnya yang banyak menyerap tenaga kerja secara berurutan yakni sektor Perdagangan Besar dan Eceran (16,45%), LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9,01%), LU Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (8,36%) dan LU Konstruksi (7,74%).

Buruh/karyawan merupakan status pekerjaan yang paling dominan di Provinsi Kepri dengan porsi sebesar 62,56%, diikuti kelompok berusaha sendiri (wiraswasta mandiri) sebesar 20,17%. Pangsa kelompok buruh/karyawan mengalami peningkatan sebesar 2,11 persen poin pada bulan Agustus 2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan pangsa jumlah pekerja juga terjadi pada kelompok pekerja yang berusaha sendiri. Sementara itu, penurunan pangsa jumlah tenaga kerja terjadi pada kelompok berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan keluarga/tak dibayar. Kondisi ini terindikasi disebabkan oleh adanya peralihan dari pekerja pada sektor informal ke formal.

Tabel 6.3 Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Agt'18	Agt'19	Agt'20	Agt'21	Agt'22	Agt'23
1	Industri Pengolahan	23,37%	23,80%	22,76%	25,01%	25,77%	25,23%
2	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Spd Motor	19,35%	17,30%	17,32%	17,67%	17,41%	16,45%
3	Administrasi Pemerintahan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan	5,95%	6,41%	6,18%	6,02%	5,15%	5,55%
4	Konstruksi	9,44%	7,92%	6,86%	6,64%	7,14%	7,74%
5	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,06%	7,71%	8,95%	9,00%	7,80%	8,36%
6	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,09%	8,22%	7,92%	7,54%	10,19%	9,01%
7	Transportasi dan Pergudangan	6,44%	6,39%	6,85%	6,05%	6,34%	6,22%
8	Informasi, Komunikasi, jasa keuangan, asuransi, real estat dan perusahaan	1,35%	1,66%	1,26%	1,48%	2,07%	1,72%
9	Jasa Lainnya	7,13%	6,72%	6,57%	5,08%	6,43%	6,24%
10	Tambang, Listrik, Air, dan Gas	2,44%	2,54%	2,34%	1,83%	1,32%	2,11%

Sumber: BPS (data diolah)

¹ Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja

Tabel 6.4 Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri (%)

No	Status Pekerjaan Utama	2019	2020	2021	2022	2023	Perubahan 1 tahun (Poin Persen)
		Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	
1	Berusaha Sendiri	19,29	21,80	20,90	19,80	20,17	0,37
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	4,59	4,32	6,10	5,77	5,63	-0,14
3	Berusaha dibantu buruh tetap	4,04	3,65	3,15	3,23	3,77	0,54
4	Buruh/karyawan	66,39	60,94	64,79	60,45	62,56	2,11
5	Pekerja Bebas	2,51	3,86	4,02	4,12	1,71	-2,41
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	3,19	5,42	5,90	6,63	6,17	-0,46
TOTAL		100	100	100	100	100	

Sumber: BPS (diolah)

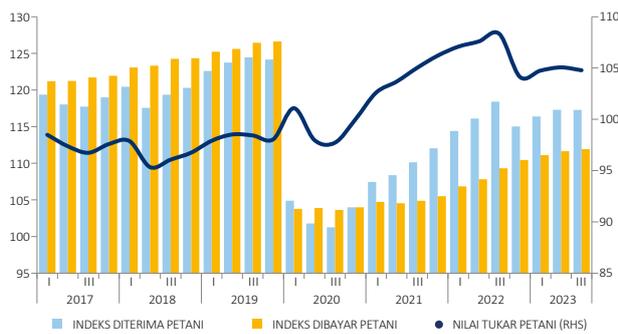
6.2 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

6.2.1 Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Nilai NTP yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan analisis triwulanan, tingkat kesejahteraan petani pada triwulan III 2023 yang merupakan rata-rata bulan Juli-September 2023 mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya (April-Juni 2023). Rata-rata NTP pada triwulan III 2023 tercatat sebesar 104,59, lebih rendah dibandingkan triwulan

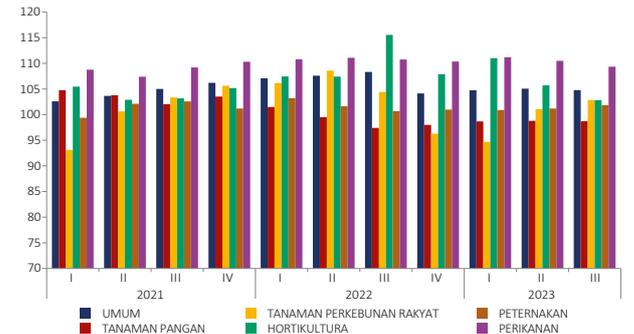
sebelumnya sebesar 105,06. Penurunan tersebut terjadi seiring peningkatan Indeks yang Dibayarkan (It) petani dan penurunan harga jual komoditas khususnya hortikultura.

Berdasarkan subsektor, NTP triwulan tertinggi tercatat pada sub kelompok Perikanan sebesar 109,30 dan NTP terendah tercatat pada sub kelompok Tanaman Pangan sebesar 98,26. Penurunan NTP secara keseluruhan didorong oleh penurunan NTP yang cukup tinggi pada sub kelompok hortikultura. Pada triwulan II 2023, NTP Hortikultura sebesar 105,70, sedangkan pada triwulan III 2023 tercatat 102,55.



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 6.1 Perkembangan NTP



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 6.2 NTP Berdasarkan Subsektor

Tabel 6.5 Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri

Sub Kelompok / Kelompok	2018 = 100											
	2021				2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	
1. Tanaman Pangan												
a. Indeks yang Diterima (It)	110,13	108,80	107,29	109,68	109,13	108,23	107,59	109,04	110,36	110,94	111,08	
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	105,11	104,82	105,15	105,62	107,53	108,77	110,46	111,28	111,84	112,29	113,05	
c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)	104,78	103,79	102,03	103,53	101,49	99,50	97,41	97,99	98,67	98,80	98,26	
2. Hortikultura												
a. Indeks yang Diterima (It)	111,43	107,61	108,20	111,07	115,06	116,38	127,04	119,47	123,41	117,88	115,10	
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	105,01	104,58	104,88	105,60	107,09	108,34	109,95	110,74	111,16	111,52	112,25	
c. Nilai Tukar Petani (NTP-H)	105,45	102,90	103,17	105,17	107,44	107,42	115,55	107,89	111,02	105,70	102,55	
3. Tanaman Perkebunan Rakyat												
a. Indeks yang Diterima (It)	97,93	105,50	108,70	110,97	114,13	117,98	115,11	107,04	105,85	113,62	116,99	
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	105,20	104,84	105,17	105,90	107,49	108,64	110,27	111,19	111,78	112,43	113,08	
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pr)	93,11	100,64	103,36	105,63	106,17	108,59	104,41	96,27	94,69	101,06	103,22	
4. Peternakan												
a. Indeks yang Diterima (It)	103,67	106,51	107,27	106,35	106,85	108,89	109,45	110,35	111,02	112,16	112,97	
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	104,30	104,31	104,57	105,10	106,53	107,40	108,70	109,28	110,04	110,85	111,41	
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pt)	99,39	102,11	102,58	101,18	103,22	101,64	100,69	100,98	100,89	101,19	101,40	
5. Perikanan												
a. Indeks yang Diterima (It)	113,43	112,00	114,30	115,97	117,51	117,96	119,58	121,19	123,07	122,87	122,33	
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	104,29	104,28	104,67	105,12	106,06	106,66	107,98	109,81	110,68	111,21	111,92	
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pi)	108,77	107,40	109,20	110,31	110,79	111,08	110,75	110,36	111,20	110,49	109,30	
Umum												
a. Indeks yang Diterima (It)	107,45	108,38	110,14	112,05	114,41	116,10	118,41	115,02	116,38	117,30	117,49	
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	104,73	104,54	104,87	105,50	106,84	107,82	109,31	110,45	111,11	111,65	112,34	
c. Nilai Tukar Petani (NTP)	102,60	103,66	105,02	106,20	107,08	107,59	108,33	104,14	104,75	105,06	104,59	

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 6.6 Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023
	Mar	Sept	Mar										
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	125.370	128.462	131.676	125.362	128.462	127.758	131.966	142.611	144.462	137.750	151.680	148.890	142.500
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,06	6,13	6,20	5,83	5,90	5,80	5,92	6,13	6,12	5,75	6,24	6,03	5,69
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	513.237	536.027	559.291	567.972	594.059	602.038	614.727	617.532	642.425	653.853	684.070	730.462	742.526
Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1 (%)	0,971	1,183	0,995	0,591	0,690	0,900	1,110	1,213	1,070	0,953	1,047	0,886	0,823
Indeks Keparahan Kemiskinan/ P2 (%)	0,228	0,313	0,243	0,107	0,130	0,18	0,290	0,423	0,280	0,218	0,252	0,186	0,181
Pertumbuhan Penduduk Miskin (yoy)	4,12%	7,82%	5,03%	-2,41%	-2,44%	1,91%	2,73%	11,63%	9,47%	-3,41%	5,00%	8,09%	-6,05%
Pertumbuhan Garis Kemiskinan (yoy)	4,71%	6,64%	8,97%	5,96%	6,22%	6,00%	3,48%	2,57%	4,51%	5,88%	6,48%	11,72%	8,55%

Sumber: BPS (data diolah)

6.2.2 Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri pada Maret 2023 tercatat sebanyak 142.500 orang, menurun dibandingkan periode Maret 2022 yang tercatat sebesar 151.680 orang. Pada periode Maret 2023, garis kemiskinan mengalami peningkatan dari Rp684.070/bulan/kapita pada Maret 2022 menjadi Rp742.526/bulan/kapita pada Maret 2023. Di sisi lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan pada periode Maret 2023 tercatat sebesar 0,823%, lebih rendah dibandingkan dengan periode Maret 2022 sebesar 1,047%. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan pada Maret 2023 juga mengalami penurunan dari periode 0,252% pada Maret 2022 menjadi sebesar 0,181% pada Maret 2023.

6.2.3 Gini Ratio (GR)

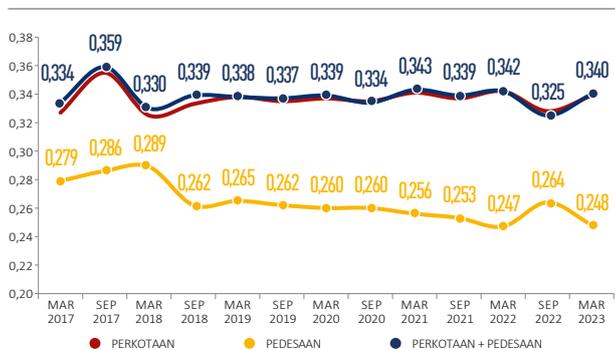
Gini Ratio² Provinsi Kepri pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,340, menurun dibandingkan Maret 2022 sebesar 0,342. Penurunan Gini Ratio mengindikasikan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Kepri menunjukkan perbaikan ditandai dengan kesenjangan yang menyempit pada periode Maret 2022 - Maret 2023. Berdasarkan lokasi, tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan masyarakat di wilayah perdesaan. Gini Ratio di perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,339, menurun dari Maret 2022 tercatat sebesar 0,342, sementara

Gini Ratio di perdesaan tercatat sebesar 0,248, sedikit meningkat dari Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,247. Hal ini menunjukkan secara umum tingkat ketimpangan yang lebih rendah pada Maret 2023 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, Indeks Gini Ratio di Provinsi Kepri berada di urutan pertama atau paling tinggi se-Sumatera, meskipun masih lebih rendah dibandingkan Gini Ratio secara nasional (0,388). Namun demikian, Gini Ratio Provinsi Kepri di wilayah perdesaan relatif cukup rendah (terendah ke-7) dibandingkan provinsi lain di Sumatera dan lebih rendah dari nasional (0,409).

6.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

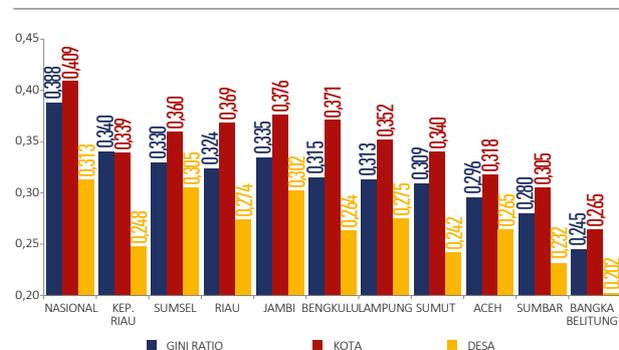
IPM Provinsi Kepri pada tahun 2023 tercatat sebesar 79,08, meningkat 0,6 poin (0,76%) dibandingkan tahun sebelumnya 78,48.

Peningkatan IPM Kepulauan Riau 2023 didukung oleh peningkatan ketiga dimensi penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Dari sisi dimensi umur panjang dan hidup sehat, UHH saat Lahir di Kepulauan Riau sebesar 74,90, artinya bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,90 tahun, lebih lama 0,28 tahun atau mengalami kenaikan 0,38 persen dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2022.



Sumber: BPS (data diolah)

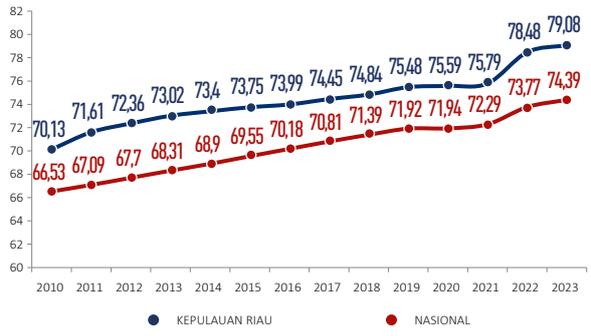
Grafik 6.3 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepri



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 6.4 Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera

2 Gini Ratio merupakan rasio ketimpangan pengeluaran penduduk yang nilainya antara 0 sampai 1. Gini Ratio yang semakin tinggi mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.



Grafik 6.5 Perkembangan IPM Provinsi Kepri

Umur Harapan Hidup penduduk di Provinsi Kepri pada tahun 2023 tercatat 74,90 tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 74,62 tahun yang menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik. Tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) juga

mengalami peningkatan menjadi 13,05 tahun yang diikuti peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi 10,41 tahun. Peningkatan angka harapan sekolah maupun rata-rata lama sekolah memberikan sinyal positif bahwa kualitas SDM di Provinsi Kepri akan semakin baik. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat pengeluaran per kapita juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp14.998.000,-, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.469.000,-.

Secara kewilayahan, seluruh daerah di Provinsi Kepri mengalami peningkatan IPM, dimana IPM Kota Batam termasuk dalam kelompok IPM sangat tinggi dengan skor 81,67. Sementara itu 4 (empat) kota/kabupaten lainnya termasuk dalam kelompok IPM tinggi yang meliputi Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Karimun. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga masuk dalam kategori IPM sedang (nilai IPM 60<IPM<70). Seluruh daerah mencatatkan peningkatan IPM dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 6.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri Menurut Komponen

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	68,42	68,63	68,85	69,05	69,15	69,41	69,45	69,48	69,64	69,80	74,25	74,36	74,62	74,90
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,51	11,61	11,90	12,26	12,51	12,60	12,66	12,81	12,82	12,83	12,87	12,98	12,99	13,05
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,38	9,46	9,58	9,63	9,64	9,65	9,67	9,79	9,81	9,99	10,12	10,18	10,37	10,41
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Rp 0000	12.267	12.513	12.740	12.942	13.019	13.177	13.359	13.566	13.976	14.466	14.209	14.122	14.469	14.998
IPM		71,13	71,61	72,36	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	77,69	77,87	78,48	79,08

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 6.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Karimun	66,40	66,82	67,67	68,52	68,72	69,21	69,84	70,26	70,56	71,10	71,44	71,70	72,65
Bintan	69,87	70,47	71,01	71,31	71,65	71,92	72,38	72,91	73,41	73,98	74,13	74,57	74,99
Natuna	66,29	67,76	68,80	69,39	70,06	70,87	71,23	71,52	72,10	72,63	72,72	73,09	73,47
Lingga	57,36	58,51	59,32	60,13	60,75	61,28	62,44	63,45	64,06	64,98	65,29	65,83	66,57
Kepulauan Anambas	63,03	63,71	64,32	64,86	65,12	65,86	66,30	67,06	67,53	68,48	68,80	69,23	69,61
Batam	76,98	77,82	78,39	78,65	79,13	79,34	79,79	80,26	80,54	81,09	81,11	81,12	81,67
Tanjungpinang	73,76	74,86	75,91	76,70	77,29	77,57	77,77	78,00	78,33	78,73	78,91	78,93	79,64
Kepulauan Riau	71,13	71,61	72,36	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	76,46

Sumber: BPS (data diolah)

BAB VII

Prospek Perekonomian Daerah



Perekonomian global diperkirakan tumbuh melambat dan lebih rendah dari estimasi sebelumnya seiring dengan pelemahan perekonomian Tiongkok dan meningkatnya ketegangan geopolitik yang turut memperlambat perekonomian Uni Eropa. Isu geopolitik tersebut turut mempengaruhi peningkatan harga energi dan pangan sehingga mengakibatkan tetap tingginya inflasi global. Perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara keseluruhan tahun 2023 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya didukung oleh perbaikan pertumbuhan di beberapa sektor dan perkembangan inflasi di daerah yang relatif terkendali. Bahkan, perekonomian Kepri pada tahun 2024 diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan penyelenggaraan pemilihan pemilu.

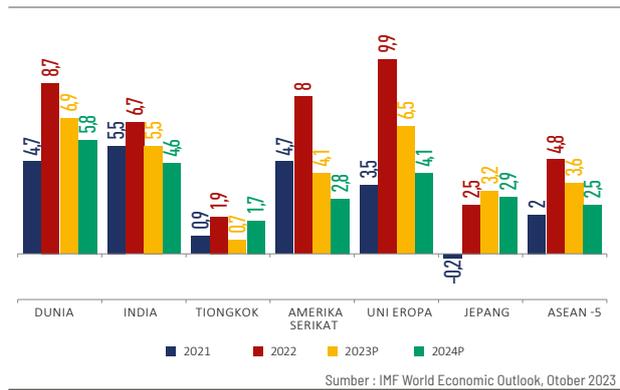
Tekanan inflasi domestik termasuk Provinsi Kepri pada tahun 2023 diperkirakan dapat dijaga direntang sasaran inflasi nasional $3,0\pm 1\%$ (yoy) dan turun pada tahun 2024 dalam rentang sasaran inflasi nasional $2,5\pm 1\%$ (yoy). Hal tersebut didukung oleh perbaikan rantai pasokan, normalisasi harga pangan dan energi global, serta upaya pengendalian inflasi di daerah yang terus diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) khususnya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).



7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian global melambat dengan ketidakpastian yang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi global diprakirakan melemah dan disertai divergensi pertumbuhan antar negara yang semakin melebar. Pelemahan ekonomi Tiongkok dan ketegangan geopolitik yang masih berlangsung juga menjadi faktor penahan perekonomian global. Selain itu, kebijakan suku bunga bank sentral yang masih tinggi untuk menahan tingginya inflasi juga turut menahan konsumsi dan pengeluaran untuk tumbuh lebih tinggi. *Outlook* terbaru dari *International Monetary Fund* (IMF) pada bulan Oktober 2023 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2023 diprakirakan sebesar 2,9% dan melambat menjadi 2,8% pada 2024 dengan kecenderungan risiko yang lebih rendah. Prakiraan tersebut lebih rendah dibandingkan prakiraan IMF sebelumnya sejalan dengan perlambatan pertumbuhan di sejumlah negara seperti Uni Eropa dan ASEAN-5.¹

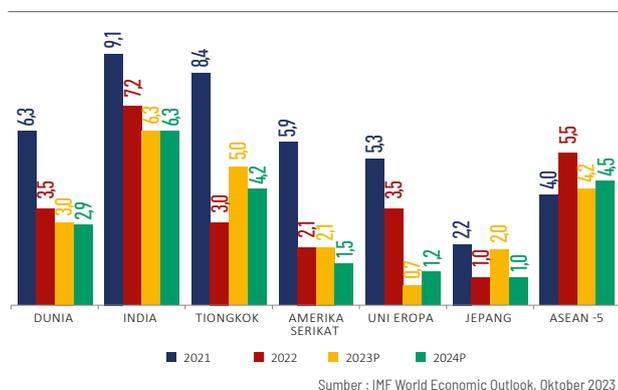
Tekanan inflasi global relatif tinggi sejalan kenaikan harga energi dan pangan. Hal tersebut disebabkan oleh tekanan inflasi sebagai dampak ketegangan geopolitik dalam mendorong harga berbagai komoditas energi dan pangan serta kebijakan larangan ekspor turut mendorong kenaikan harga komoditas global. Dengan berlanjutnya gangguan rantai pasokan dan ketatnya pasar tenaga kerja terutama di Amerika Serikat dan Eropa, diprakirakan akan mendorong kenaikan lebih lanjut suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk *Federal Funds Rate* (FFR). Inflasi yang masih tinggi mendorong kebijakan moneter ketat berlanjut lebih lama di berbagai negara khususnya negara maju. Kebijakan moneter tersebut selanjutnya berpengaruh pada mata uang dolar Amerika Serikat yang tetap kuat dan meningkatkan risiko tekanan inflasi dari komoditas impor bagi perekonomian domestik. Berdasarkan rilis IMF, inflasi global tahun 2023 diproyeksikan sebesar 6,9% (yoy), sementara inflasi negara ASEAN-5 (Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia) diprakirakan sebesar 3,6% (yoy).



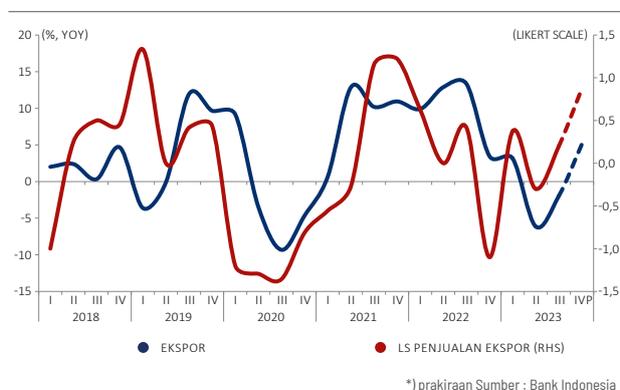
Grafik 7.2 Perkembangan Inflasi Negara Mitra Dagang (% ,yoy)

Perekonomian Indonesia diprakirakan tetap tumbuh membaik dan resisten terhadap dampak rambatan global. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 berada pada kisaran 4,5% s/d 5,3%. Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh konsumsi swasta, termasuk konsumsi generasi muda yang meningkat sejalan peningkatan konsumsi di sektor jasa dan keyakinan konsumen yang masih tinggi. Selain itu, pertumbuhan investasi tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sejalan dengan perbaikan perekonomian domestik, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tahun 2023 diperkirakan menguat. Pertumbuhan tersebut diperkirakan sebagai dampak dari peningkatan penjualan ekspor yang ditunjukkan oleh *Likert Scale* (LS) Prakiraan Penjualan Ekspor sejalan meningkatnya permintaan Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tertahan oleh moderasi jumlah investasi yang sebelumnya cukup tinggi. **Mempertimbangkan hal-hal tersebut, perekonomian Provinsi Kepri tahun 2023 diprakirakan tumbuh pada kisaran 4,94% - 5,74% (yoy).**

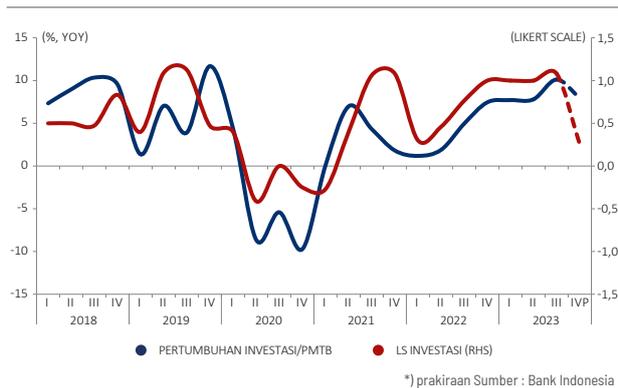


Grafik 7.1 Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang (% ,yoy)



Grafik 7.3 Likert Scale Prakiraan Penjualan Ekspor

1 ASEAN-5: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.



Grafik 7.4 Likert Scale Perkiraan Investasi

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh menguat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari sisi eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang merupakan salah satu mitra dagang utama Provinsi Kepri berdampak pada peningkatan permintaan komoditas hasil industri pengolahan di Provinsi Kepri. Selain itu, peningkatan mobilitas di akhir tahun juga turut meningkatkan kunjungan wisatawan di wilayah Kepri yang turut mendorong sektor perdagangan besar maupun eceran. Di sisi lain, ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, masih ketatnya pasar tenaga kerja di negara maju yang mendorong kebijakan moneter ketat, risiko perubahan iklim global, serta risiko resesi di negara mitra dagang, menjadi faktor yang berisiko menahan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri. Selanjutnya di sisi internal/domestik, ketidakpastian global berpotensi berdampak pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri sisi permintaan yakni kinerja konsumsi rumah tangga dan kinerja

ekspor. Sementara itu, tahun politik menjelang pemilu 2024 berpotensi mendorong konsumsi pemerintah dan Lembaga Non Profit Rumah Tangga.

Dari sisi lapangan usaha, kinerja perekonomian Kepri tahun 2023 diperkirakan bersumber dari lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi serta perdagangan besar dan eceran. Pertumbuhan pada lapangan usaha industri pengolahan didorong membaiknya sistem logistik dan iklim investasi pasca pandemi. Sementara itu, pertumbuhan pada lapangan usaha konstruksi sejalan dengan masifnya pembangunan di Provinsi Kepri, terutama pembangunan jalan di Kota Batam. Selain itu, pembukaan sektor *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE)*, pelaksanaan *sport events* dan atraksi pariwisata yang kembali normal di wilayah Kepri akan mendorong sektor pariwisata untuk tumbuh lebih tinggi serta menghasilkan *multiplier effect* pada sektor lainnya.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 5,13 s/d 5,93%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebagai dampak dari tahun politik yang mendorong kenaikan konsumsi swasta. Dari sisi pengeluaran, ekonomi tahun 2024 akan banyak ditopang konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah yang biasanya meningkat pada akhir tahun. Akselerasi kinerja perekonomian pada tahun depan diperkirakan bersumber dari Lapangan Usaha (LU) utama yaitu LU Perdagangan Besar dan Eceran serta LU Industri Pengolahan. Akselerasi LU Perdagangan diperkirakan bersumber dari meningkatnya permintaan masyarakat dan juga tahun pemilihan umum. Selain itu, kebijakan moneter yang melonggar diprakirakan akan turut mendorong pemulihan permintaan domestik.

Tabel 7.1 Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2023

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan	Arah
Investasi	Iklim investasi yang semakin baik sejalan dengan pembangunan infrastruktur jalan yang masif.	▲
Proyeksi Perekonomian Global	IMF melakukan revisi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 sebesar 3,0% pada Oktober 2023, atau sama dengan periode Juli 2023 yang tumbuh 3,0%.	▲
Pariwisata	Pariwisata yang diperkirakan akan jauh lebih baik sejalan dengan pencabutan aturan PPKM pada akhir Desember 2022 dan pencabutan status darurat COVID-19 oleh WHO pada Mei 2023.	▲
Kebijakan moneter ketat dalam negeri dan di negara maju	Risiko perlambatan investasi akibat suku bunga yang tinggi.	▼
Perlambatan ekonomi Tiongkok	Perlambatan ekonomi Tiongkok seiring dengan pelemahan konsumsi dan penurunan kinerja sektor properti.	▼
Risiko Geopolitik	Risiko geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di semenanjung Taiwan dapat berdampak terhadap harga pangan, energi, dan rantai pasok dunia	▼
Risiko Perubahan Iklim Global	Risiko perubahan iklim global dapat berdampak produktivitas pertanian yang mulai menurun akibat dampak dari pemanasan global. Pada kondisi domestik, penurunan produktivitas pertanian mulai terjadi di beberapa wilayah produsen dan pemasok terutama pada saat memasuki musim kemarau.	▼

Tabel 7.2 Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2024

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan	Arah
Pemulihan permintaan	Perkiraan penurunan kasus dan progres vaksinasi booster mendekati target untuk menciptakan kekebalan komunal.	▲
Kebijakan moneter longgar	Kebijakan moneter yang lebih longgar sejalan dengan penurunan inflasi.	▲
Proteksionisme Pangan	Risiko penerapan kebijakan larangan ekspor komoditas pangan.	▼
Risiko Geopolitik	Risiko geopolitik dapat berdampak terhadap harga pangan dan energi dunia	▼
Proyeksi Perekonomian Global	IMF melakukan revisi pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 menjadi 2,9%, menurun dari tahun 2023 yang tumbuh 3,0%.	▼

7.2. PROSPEK INFLASI

Mencermati realisasi inflasi dan perkembangan terkini baik di global maupun nasional, inflasi Provinsi Kepri tahun 2023 diperkirakan menurun atau lebih rendah dari inflasi tahun 2022 dan berada dalam sasaran inflasi 3,0±1% (yoy). Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas secara global yang turut berdampak pada penurunan harga komoditas pangan. Terkendalnya inflasi juga didukung oleh langkah antisipatif melalui GNPIP dalam menjaga harga komoditas pangan yang rentan terhadap tekanan inflasi.

Kebijakan pengetatan moneter yang terukur dan sinergi TPID melalui GNPIP diperkirakan dapat meredam tekanan inflasi sehingga dapat mencapai target sasaran inflasi. Di samping itu, moderasi tarif angkutan sejalan dengan penambahan jumlah armada/rute penerbangan menahan tekanan inflasi menjadi lebih tinggi. Terjaganya inflasi dalam kisaran sasaran tersebut tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter yang didukung dengan eratnya sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam TPID. Ke depan Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3,0±1% (yoy) pada tahun 2023 dan 2,5±1% pada tahun 2024.

Tekanan inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri pada tahun 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dan berada dalam sasaran inflasi nasional 3,0±1% (yoy). Inflasi pada tahun 2023 diperkirakan bersumber dari kenaikan harga (1) kelompok makanan, minuman dan tembakau; (2) transportasi, dan (3) penyediaan makanan dan minuman. Tekanan inflasi diperkirakan akan menurun sejalan dengan pasokan bahan pangan yang semakin terjaga, penurunan harga komoditas global, dan didukung oleh berbagai upaya pengendalian inflasi melalui GNPIP. Risiko inflasi yang perlu diperhatikan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Potensi kenaikan harga energi dan bahan pangan global sebagai dampak ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga komoditas global seperti gandum dan pupuk serta proteksionisme pangan oleh negara-negara di dunia.
2. Potensi risiko terjadinya *El Nino* yang berdampak di wilayah

utara ekuator termasuk Provinsi Kepri sehingga menyebabkan gangguan cuaca pada kegiatan melaut akibat gelombang tinggi dan penurunan hasil perikanan akibat memanasnya suhu di beberapa titik perairan. Selain itu, terdapat potensi kekeringan ringan yang dapat menekan produktivitas pertanian di beberapa sentra produsen dan pemasok. *El Nino* yang diperkirakan berdampak kuat di wilayah selatan ekuator termasuk sebagian Sumatera dan seluruh Jawa akan berpotensi mengurangi pasokan bahan pangan ke Provinsi Kepri.

3. Kenaikan harga beras nasional akibat berkurangnya pasokan beras dari daerah penghasil maupun penurunan kuota impor.
4. Potensi peningkatan mobilitas masyarakat didorong relaksasi aturan kunjungan untuk wisatawan yang mendorong kenaikan tarif angkutan udara dan harga di sektor jasa seperti penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman.
5. Peningkatan upah minimum provinsi dan pemberian insentif seperti tunjangan hari raya, tunjangan gaji pegawai, dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara berpotensi mendorong daya beli masyarakat secara keseluruhan dan peningkatan permintaan di berbagai produk konsumsi.
6. Peningkatan cukai rokok pada tahun 2023 sebesar 10%.
7. Meningkatnya harga emas perhiasan sejalan dengan peningkatan harga emas global karena penurunan *credit rating* Amerika Serikat.

Upaya pengendalian inflasi selama tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif) sebagai berikut:

- a. Melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan GNPIP untuk mengendalikan inflasi pangan melalui 7 program unggulan GNPIP yakni: (1) Penyelenggaraan Pasar Murah, (2) Perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD), (3) Pemberian subsidi ongkos angkut, (4) Gerakan Tanam dan Replikasi Model Bisnis, (5) Dukungan pengadaan/pemanfaatan alsintan dan saprotan, (6) Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, digitalisasi data dan informasi pangan, (7) Koordinasi dan komunikasi melalui *High Level Meeting* TPID.

Tabel 7.3 Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2023

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan
Upside Risk	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya anomali cuaca <i>El Nino</i> menyebabkan kekeringan mengurangi produksi pertanian • Peningkatan mobilitas masyarakat dengan akselerasi vaksinasi dan terkendalnya kasus penyebaran COVID-19. • Kenaikan harga pupuk dan pestisida yang menyebabkan kenaikan biaya produksi. • Kenaikan harga beras sejalan dengan penurunan produksi beras lokal maupun penurunan kuota impor akibat hasil panen yang lebih rendah di negara penghasil.
	<ul style="list-style-type: none"> • Isu penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak yang masih berlanjut • Kenaikan cukai rokok yang berlaku mulai 1 Januari 2023. • Risiko geopolitik yang dapat mendorong kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada kenaikan harga BBM, avtur, dan bahan bakar RT. • Kenaikan tarif listrik non subsidi mulai bulan April 2023.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pulihnya aktivitas dunia usaha yang meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat sehingga mendorong permintaan/daya beli. • Peningkatan ketidakpastian global mendorong kenaikan harga emas perhiasan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan infrastruktur yang memperlancar logistik bahan pangan. • Pelaksanaan implementasi program GNPIP yang lebih masif mendorong ketersediaan bahan pangan dan normalisasi harga pangan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan jumlah armada, rute, dan frekuensi dari maskapai angkutan udara.
Downside Risk	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan hasil <i>Liaison</i>, rata-rata produsen sudah melakukan <i>price in</i> kenaikan harga pada awal tahun dan tidak akan menaikkan harga jual sampai akhir tahun.

- b. Meningkatkan produksi pangan di Provinsi Kepri dengan mengoptimalkan *urban farming*, penggunaan teknik budidaya yang lebih baik seperti Program Lipat Ganda (Proliga), *digital farming* maupun *integrated farming* untuk mencapai hasil produksi yang optimal dengan biaya yang lebih efisien. Upaya peningkatan produksi pangan juga dapat dilakukan dengan mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui penggunaan Dana Desa untuk pengembangan budidaya komoditas pangan strategis.
- c. Optimalisasi KAD yang didukung dengan ketersediaan data neraca pangan yang akurat, logistik yang efisien, gudang penyimpanan yang memadai, dan pusat distribusi berupa pasar sentral/pasar induk untuk memudahkan pengawasan stok dan lalu lintas barang.
- d. Memperkuat sinergi antar instansi dalam TPID melalui penyesuaian program yang dapat mendukung GNPIP dan kebijakan pengendalian inflasi daerah.
- e. Terus melanjutkan pengawasan penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari pengalihan subsidi BBM secara tepat waktu dan sasaran sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang rentan terhadap inflasi.
- f. Mendorong penggunaan *Smart Green House* untuk mengatasi masalah siklus tanam agar memperoleh produktivitas tanaman yang berkesinambungan sepanjang tahun sehingga jumlah pasokan tetap stabil.

Tekanan inflasi Gabungan 3 Kota/Kab² di Provinsi Kepri pada tahun 2024 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dan berada dalam sasaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Inflasi pada tahun 2024 diperkirakan bersumber dari kenaikan harga (1) kelompok makanan, minuman dan tembakau; (2) transportasi, dan (3) penyediaan makanan dan minuman. Tekanan inflasi diperkirakan akan menurun sejalan dengan normalisasi pasokan, harga komoditas global, dan rantai pasok dunia. Selain itu, peran aktif TPID dan Satgas Pangan dalam menjaga ekspektasi masyarakat terhadap inflasi juga mampu meredam laju inflasi. Risiko inflasi yang perlu diperhatikan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Potensi kenaikan beberapa bahan pangan sebagai dampak ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga gandum dan pupuk.
2. Potensi risiko kenaikan tarif angkutan udara seiring normalisasi mobilitas masyarakat.
3. Peningkatan upah minimum provinsi dan pemberian insentif seperti tunjangan hari raya, tunjangan gaji pegawai, dan gaji ke-13 dapat mendorong daya beli masyarakat secara keseluruhan dan akan mendorong peningkatan permintaan.
4. Peningkatan cukai rokok pada tahun 2024 sebesar 10%.

Sebagai langkah antisipasi dan mitigasi risiko peningkatan inflasi pada tahun depan, semua pihak terutama TPID perlu terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam rangka pengendalian inflasi dan meningkatkan ketahanan pangan diantaranya dengan:

1. Melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan GNPIP untuk mengendalikan inflasi pangan melalui 7 (tujuh) fokus utama yakni dukungan optimalisasi Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah/Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), penguatan KAD, peningkatan pemanfaatan alsintan dan sarana prasarana produksi, penguatan ketahanan komoditas pangan strategis, penguatan koordinasi dan monitoring dalam rangka optimalisasi program fasilitasi distribusi pangan, penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, digitalisasi dan data pangan serta penguatan koordinasi dan komunikasi.
2. Di tengah keterbatasan lahan pertanian yang subur, peningkatan produksi pangan di Kepri dapat dilakukan dengan mengoptimalkan *urban farming*, penggunaan teknik budidaya yang lebih baik seperti Program lipat ganda (Proliga), *digital farming* maupun *integrated farming* untuk mencapai hasil produksi yang optimal dengan biaya yang lebih efisien. Upaya peningkatan produksi pangan juga dapat dilakukan dengan mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui penggunaan Dana Desa untuk pengembangan budidaya komoditas pangan strategis.
3. Selain itu untuk menjaga keberlangsungan pasokan pangan, KAD di dalam maupun dengan daerah di luar Kepri yang telah terjalin perlu terus diperkuat dengan mendorong terlaksananya transaksi perdagangan baik melalui BUMD, koperasi maupun pelaku usaha swasta. Perluasan KAD dengan daerah baru juga diperlukan untuk meminimalkan gejolak harga apabila terjadi gangguan produksi di salah satu sentra pemasok. Pelaksanaan KAD tersebut tentunya membutuhkan dukungan ketersediaan data neraca pangan yang akurat, logistik yang efisien, gudang penyimpanan yang memadai termasuk *cold storage*, dan pusat distribusi berupa pasar sentral/pasar induk yang akan memudahkan pengawasan stok dan lalu lintas barang.

Sinergitas antar instansi dalam TPID juga perlu terus diperkuat melalui penyesuaian program yang dapat mendukung GNPIP dan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, sinergitas untuk mengendalikan inflasi tentunya juga diperlukan dalam mengimplementasikan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).

7.3. REKOMENDASI

Dalam rangka mendorong momentum pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri, sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah dan *stakeholders* lainnya akan terus diperkuat. Sehubungan hal tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengendalikan laju inflasi, antara lain:

1. Menjaga konsumsi rumah tangga sebagai mesin pertumbuhan dengan mengendalikan tingkat inflasi tetap rendah dan stabil.
2. Mengoptimalkan dampak belanja APBN maupun APBD dengan mempercepat penggunaan anggaran yang efisien serta tepat

² Kota/Kab IHK di Kepulauan Riau pada tahun 2024: Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun

sasaran termasuk optimalisasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam upaya memperkuat efektivitas pengendalian inflasi di daerah.

3. Meningkatkan daya saing investasi dengan pemberian insentif yang menarik, kemudahan perizinan, dan konsistensi aturan bagi investor.
4. Mendorong hilirisasi komoditas Sumber Daya Alam (SDA) terutama di bidang maritim.
5. Meningkatkan sinergi antar lembaga untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan, bahan baku pertanian untuk menghadapi risiko potensi kenaikan harga pangan global.
6. Mendorong optimalisasi penyerapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai antisipasi potensi dampak risiko El Nino.
7. Menjaga kestabilan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama untuk beberapa komoditas yang rentan terhadap perubahan harga sehingga tingkat inflasi tetap terkendali dan stabil, tidak mengalami inflasi maupun deflasi secara ekstrim.
8. Mendorong implementasi program GNPIP yang dirumuskan oleh TPID dalam rangka pengendalian inflasi terutama komoditas pangan.
9. Memperkuat *linking and matching* kebutuhan pekerja di dunia usaha dengan lulusan perguruan tinggi, sekolah vokasi, serta balai pelatihan dan sertifikasi profesi.
10. Meningkatkan efisiensi biaya logistik dengan memperkuat interkoneksi antar daerah baik melalui jalur darat maupun jalur laut sehingga dapat mendorong kelancaran arus barang.
11. Mendorong pertumbuhan yang inklusif melalui penguatan kapasitas, akses pasar dan kemudahan pembiayaan bagi UMKM.
12. Mengoptimalkan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan keunggulan *Free Trade Zone* (FTZ) melalui sejumlah paket insentif investasi sebagai daya tarik investasi.
13. Memperkuat pemulihan pariwisata melalui penguatan aspek 3A (Akses, Amenitas, Atraksi) dan 2P (Pelaku dan Promosi).



Lampiran

**Tabel 1 Ringkasan Eksekutif
Indikator Ekonomi Dan Moneter Triwulanan**
Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau

INDIKATOR	2021				2022				2023		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
MAKRO											
Laju Inflasi (yoy)*	1,56	1,52	2,07	2,26	3,24	5,89	6,79	5,83	4,77	2,64	2,05
IHK MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	109,67	109,15	110,11	113,91	115,17	122,6	121,07	122,34	122,64	124,07	124,85
IHK PAKAIAN DAN ALAS KAKI	103,73	104,49	105,07	105,59	106,72	107,0	106,50	107,10	109,05	109,92	110,68
IHK PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	100,55	100,69	100,86	100,98	101,49	101,8	102,39	103,04	103,89	104,11	104,52
IHK PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	103,19	104,04	104,19	104,77	108,04	109,3	109,77	109,94	110,89	111,22	110,62
IHK KESEHATAN	102,22	102,32	102,66	103,09	103,27	103,1	103,23	103,41	103,52	103,66	103,69
IHK TRANSPORTASI	98,42	98,88	97,82	101,81	101,79	106,0	117,08	119,05	114,25	116,10	116,87
IHK INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	99,38	99,39	99,42	99,33	99,05	99,1	99,03	99,03	99,18	99,17	99,25
IHK REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	104,26	105,17	105,20	105,19	105,33	107,2	107,46	107,52	107,73	107,82	108,27
IHK PENDIDIKAN	112,16	112,16	114,18	114,18	114,18	114,2	117,34	117,34	117,40	117,40	120,63
IHK PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	104,11	104,34	104,43	106,14	108,03	109,8	110,07	110,18	110,22	110,25	110,76
IHK PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	110,10	112,19	112,37	113,13	116,65	117,7	117,85	120,28	122,36	122,72	123,31
Pertumbuhan PDRB (yoy)**	-1,19	6,90	2,97	5,27	2,83	5,01	6,03	6,40	6,51	5,04	4,88
Ekspor Non Migas (Juta USD**)	0,67	12,85	10,19	10,94	9,900	12,88	13,34	3,45	3,15	-6,14	-1,96
Impor Non Migas (Juta USD**)	1,73	12,52	9,36	9,09	9,610	12,47	14,33	4,41	3,17	-7,57	-2,10
PERBANKAN											
Giro (Rp miliar)	19.688	19.526	20.291	20.462	20.975	22.098	23.498	25.467	25.220	24.908	27.355
Tabungan (Rp miliar)	26.346	27.823	28.294	29.429	29.538	30.479	30.451	31.850	32.820	32.626	32.832
Deposito (Rp miliar)	15.849	15.817	15.444	16.324	14.022	15.037	12.097	15.554	13.803	14.571	17.086
Total DPK (Rp miliar)	61.883	63.166	64.029	66.214	64.535	67.613	66.046	72.871	71.843	72.106	77.273
Total Asset (Rp miliar)	70.281	72.473	73.816	75.306	77.159	77.367	78.314	83.142	83,29	85,97	90,402
Total Kredit (Rp miliar)	53.331	58.013	56.444	59.691	63.402	61,9	63.127	64.861	65.810	65,81	70,13
Suku Bunga Kredit tertimbang kredit	8,97%	8,85%	10,29%	8,49%	8,48%	8,50%	8,62	8,82	8,92	8,90%	8,83%
Suku Bunga Dep 3 bln tertimbang kredit	3,41%	3,18%	3,02%	2,71%	2,76%	2,43%	2,62%	3,22%	3,55%	3,67%	3,91%
LDR (%)	86,18%	91,84%	88,15%	90,15%	98,24%	94,22%	95,58%	88,73%	93,50%	93%	90,76%
NPL (%)	4,16%	3,71%	3,63%	3,26%	3,27%	2,87%	3,08%	2,18%	2,18%	2,42%	3,66%
SISTEM PEMBAYARAN											
Inflow (miliar Rp)	2.114	2.086	1.084	760	1.540	1.297	1.088	680	1.686	1.561	1.080
Outflow (miliar Rp)	1.267	2.823	1.512	2.658	1.114	2.401	1.668	3.133	1.671	3.117	2.198
Volume Kliring (lembar)	66.718	77.113	68.023	71.673	69.279	70.929	68.779,0	48.087,0	50.215	66.535	67.249
Nominal Kliring (miliar Rp)	3.390.038	3.489.100	2.406.142	2.602.398	3.540.018	3.547.218	3.600.741	2.410.536	3.278.058	3.225.906	3.614.866

Sumber: Bank Indonesia

Ket: *) Mulai Januari 2020 menggunakan tahun dasar 2018 = 100

**) Data Sangat Sementara

**) Data Perbankan dari Bank Umum

Tabel 2 Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan 2 Kota (Kota Batam Dan Kota Tanjungpinang) Mulai Januari 2020, menggunakan Tahun Dasar 2018

No	KELOMPOK	Mar 2022		Juni 2022		Sep 2022		Des 2022		Mar 2023		Jun 2023		Sep 2023	
		Indeks	%mtm												
UMUM		108,07	0,68	111,1	0,84	112,36	1,06	113,29	1,11	113,22	(0,29)	113,99	0,49	114,66	0,16
I. MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU		115,17	1,12	122,59	2,18	121,07	0,29	122,34	2,95	122,64	(1,28)	124,07	1,25	124,85	(0,07)
a.	MAKANAN	113,88	1,18	122,14	2,59	119,17	0,08	119,71	3,40	119,16	(1,78)	120,22	1,35	120,80	(0,23)
b.	MINUMAN YANG TIDAK BERALKOHOL	103,81	0,05	107,45	0,83	108,64	0,08	110,72	0,29	111,14	(0,10)	111,73	0,33	111,76	0,14
c.	MINUMAN BERALKOHOL	99,31	0,54	99,64	0,16	99,75	0,21	100,23	0,07	101,41	0,53	100,93	(0,59)	101,31	0,00
d.	ROKOK DAN TEMBAKAU	132,89	1,43	137,32	0,44	144,14	1,63	149,95	1,96	156,18	0,89	160,84	1,22	163,63	0,63
II. PAKAIAN DAN ALAS KAKI		106,72	0,42	107,03	(0,00)	106,50	(0,26)	107,10	(0,11)	109,05	(0,02)	109,92	0,13	110,68	0,19
a.	PAKAIAN	106,77	0,33	107,58	0,14	106,83	(0,32)	107,35	(0,13)	109,92	0,21	110,77	0,23	111,74	0,25
B.	ALAS KAKI	106,53	0,76	104,92	(0,56)	105,24	0,00	106,13	0,00	105,65	(0,91)	106,63	(0,24)	106,59	(0,04)
III. PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA		101,49	0,21	101,81	0,04	102,39	0,10	103,04	0,02	103,89	0,04	104,11	0,03	104,52	0,11
a.	SEWA RUMAH	101,19	0,00	101,51	(0,00)	102,07	0,00	103,64	0,00	105,50	0,00	105,58	0,00	106,62	0,28
b.	PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, DAN KEAMANAN TEMPAT TINGGAL/PERUMAHAN	102,95	0,20	103,53	0,27	104,31	0,64	104,33	0,03	104,99	0,26	105,48	0,21	105,48	0,00
C.	PENYEDIAAN AIR DAN LAYANAN PERUMAHAN LAINNYA	100,06	0,00	100,06	0,00	100,06	0,00	100,06	0,00	100,06	0,00	100,06	0,00	100,06	0,00
d.	LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	101,73	0,58	102,06	0,00	102,83	0,00	102,89	0,06	102,90	0,00	103,22	0,00	103,22	0,00
IV. PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA		108,04	0,84	109,30	0,48	109,77	0,31	109,94	0,00	110,89	0,07	111,22	0,06	110,62	(0,07)
a.	FURNITUR, PERLENGKAPAN DAN KARPET	102,15	0,09	103,28	0,29	103,64	(0,12)	103,69	0,05	103,96	0,00	103,96	0,00	103,95	0,00
b.	TEKSTIL RUMAH TANGGA	100,87	0,91	102,10	(0,00)	103,50	(0,75)	103,30	0,18	103,31	0,00	103,31	0,00	103,43	0,00
c.	PERALATAN RUMAH TANGGA	106,72	0,04	107,10	(0,00)	107,18	0,00	106,99	(0,19)	107,00	0,00	106,95	0,05	106,94	(0,10)
d.	BARANG PECAH BELAH DAN PERALATAN MAKAN MINUM	101,88	0,35	103,02	(0,00)	97,22	0,00	97,22	0,00	97,32	0,00	97,32	0,00	97,32	0,00
e.	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERUMAHAN DAN KEBUN	101,94	0,08	106,57	(0,00)	105,93	(0,25)	105,60	(0,31)	105,74	0,02	105,93	0,25	106,26	0,00
f.	BARANG DAN LAYANAN UNTUK PEMELIHARAAN RUMAH TANGGA RUTIN	112,74	1,40	114,06	0,85	116,07	0,72	116,52	0,05	118,30	0,12	118,96	0,07	117,73	(0,11)
V. KESEHATAN		103,27	0,10	103,10	0,00	103,23	0,02	103,41	0,03	103,52	0,00	103,66	0,10	103,69	0,04
a.	OBAT-OBATAN DAN PRODUK KESEHATAN	104,50	0,23	104,12	0,00	104,43	0,05	104,84	0,08	105,12	0,00	105,44	0,23	105,48	0,09
b.	JASA RAWAT JALAN	100,49	0,00	100,49	0,00	100,49	0,00	100,49	0,00	100,49	0,00	100,49	0,00	100,49	0,00
c.	JASA RAWAT INAP	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
d.	JASA KESEHATAN LAINNYA	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,61	0,00
VI. TRANSPORTASI		101,79	1,02	106,04	0,93	117,08	6,98	119,05	1,25	114,25	0,40	116,10	0,99	116,87	0,09
a.	PEMBELIAN KENDARAAN	105,93	0,00	106,91	0,00	107,39	0,14	107,88	(0,00)	108,54	0,16	108,79	(0,00)	108,98	0,00
b.	PENGOPERASIAN PERALATAN TRANSPORTASI PRIBADI	101,87	0,22	101,53	(0,00)	116,60	14,11	117,43	0,22	117,01	0,31	115,26	(1,06)	116,45	0,76
c.	JASA ANGKUTAN PENUMPANG	97,28	4,21	115,58	3,79	127,08	(1,08)	133,20	4,53	112,62	0,86	124,55	6,74	124,87	(1,30)
d.	JASA PENGIRIMAN BARANG	124,52	0,00	124,39	0,00	124,39	0,00	124,39	0,00	132,81	0,00	132,81	0,00	132,81	0,00
VII. INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN		99,05	(0,00)	99,15	0,09	99,03	0,14	99,03	(0,00)	99,18	0,00	99,17	0,00	99,25	0,14
a.	PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	96,80	(0,01)	97,23	0,43	96,73	0,63	96,72	(0,01)	97,37	0,00	97,36	0,00	97,02	(0,04)
b.	LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	100,08	0,00	100,08	0,00	100,08	0,00	100,08	0,00	100,08	0,00	100,08	0,00	100,29	0,21
c.	ASURANSI	100,00	(0,00)	100,00	(0,00)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
d.	JASA KEUANGAN	95,75	(0,00)	95,75	(0,00)	95,75	0,00	95,75	0,00	95,75	0,00	95,75	0,00	95,75	0,00
VIII REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA		105,33	(0,00)	107,2	0,09	107,46	0,00	107,52	0,02	107,73	0,08	107,82	0,21	108,27	0,00
a.	BARANG REKREASI LAINNYA DAN OLAHRAGA	102,72	(0,00)	102,7	(0,00)	102,72	0,00	102,72	0,00	102,72	0,00	102,72	0,00	102,72	0,00
b.	LAYANAN REKREASI DAN OLAHRAGA	100,17	0,00	100,2	0,00	100,17	0,00	100,17	0,00	100,17	0,00	100,19	0,00	100,19	0,00
c.	LAYANAN KEBUDAYAAN	105,45	(0,00)	116,2	0,00	111,83	0,00	111,83	0,00	111,83	0,00	116,23	3,93	121,55	0,00
d.	KORAN, BUKU, DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	109,27	(0,01)	111,2	0,18	112,65	0,01	112,76	0,04	113,21	0,17	112,60	(0,28)	112,59	0,00
IX PENDIDIKAN		114,18	(0,00)	114,2	(0,00)	117,34	1,46	117,34	0,00	117,40	0,00	117,40	0,00	120,63	1,54
a.	PENDIDIKAN DASAR DAN ANAK USIA DINI	114,90	0,00	114,9	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	120,89	0,00
b.	PENDIDIKAN MENENGAH	112,28	0,00	112,3	0,00	113,45	0,00	113,45	0,00	113,45	0,00	113,45	0,00	114,75	0,00
c.	PENDIDIKAN TINGGI	117,10	(0,00)	117,1	(0,00)	123,33	5,32	123,33	0,00	123,33	0,00	123,33	0,00	130,07	5,47
d.	PENDIDIKAN LAINNYA	110,00	(0,00)	110,0	(0,00)	110,84	0,00	110,84	0,00	111,32	0,00	111,32	0,00	111,88	0,00
X PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN		108,03	0,11	109,8	0,23	110,07	0,09	110,18	0,00	110,22	0,00	110,25	0,00	110,76	0,32
a.	JASA PELAYANAN MAKANAN DAN MINUMAN	108,03	0,11	109,8	0,23	110,07	0,09	110,18	0,00	110,22	0,00	110,25	0,00	110,76	0,32
XI PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA		116,65	1,75	117,7	0,10	117,85	(0,34)	120,28	1,07	122,36	0,49	122,72	(0,43)	123,31	0,32
a.	PERAWATAN PRIBADI	111,11	1,12	113,0	0,66	114,98	0,23	116,29	0,41	117,62	0,14	117,64	0,14	118,49	0,13
b.	PERAWATAN PRIBADI LAINNYA	128,81	2,98	128,4	(0,82)	124,79	(1,38)	129,68	2,33	133,20	1,14	134,27	(1,40)	134,42	0,66
c.	PERLINDUNGAN SOSIAL	100,00	0,00	100,0	0,00	103,63	0,00	103,63	0,00	107,25	0,00	107,25	0,00	107,25	0,00
d.	JASA LAINNYA	108,19	(0,00)	108,2	(0,00)	108,19	0,00	108,19	0,00	108,19	0,00	108,19	0,00	108,19	0,00

Sumber: BPS (data diolah)

Lampiran

Tabel 3 Perkembangan Inflasi Kota Batam, Tanjungpinang dan Nasional (% , mtm)

KOTA	2020				2021				2022				2023		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
1. Batam	1,06%	0,06%	-0,12%	1,05%	0,15%	0,45%	0,19%	0,58%	0,73%	0,84%	1,08%	1,14%	-0,32%	0,52%	0,12%
2. Tanjungpinang	1,40%	0,09%	-0,32%	0,98%	-0,36%	0,36%	0,33%	0,42%	0,36%	0,80%	0,92%	0,85%	-0,04%	0,29%	0,42%
3. Kepulauan Riau	1,1%	2,4%	-0,15%	1,04%	0,09%	0,43%	0,31%	0,56%	0,68%	0,84%	1,06%	1,11%	0,44%	0,49%	0,16%
4. Nasional	2,96%	0,18%	-0,05%	0,45%	0,13%	0,08%	-0,04%	0,57%	0,66%	0,49%	1,17%	0,66%	4,97%	0,14%	0,19%

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 4 Data Perbankan (Bank Umum) (Dlm. Juta Rp.)
Provinsi Kepulauan Riau

KETERANGAN									2023							
	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
ASET	77.367	77.611	77.601	78.314	80.293	81.338	83.142	80.475	82.451	83.291	83.366	84.376	85.971	87.846	88.576	90.402
DANA PIHAK KETIGA	67.613	67.948	67.949	66.046	70.288	69.137	72.871	72.871	70.023	70.384	71.370	73.135	72.106	72.970	74.955	76.915
a. Giro	22.098	22.239	22.347	23.498	25.328	25.053	25.467	25.467	24.651	25.068	25.089	24.177	24.908	25.490	27.105	27.926
b. Tabungan	30.479	30.469	30.369	30.451	30.694	31.110	31.850	31.850	31.812	31.901	32.450	32.661	32.626	32.906	33.103	33.304
c. Deposito	15.037	15.240	15.233	12.097	14.267	12.974	15.554	15.554	13.560	13.415	13.831	16.297	14.571	14.574	14.747	15.685
KREDIT																
a. Jenis Penggunaan	61.920	61.984	61.628	63.127	63.876	63.562	64.861	64.656	65.373	65.810	65.859	66.481	67.327	68.074	74.655	70.132
Modal Kerja	22.230	22.593	22.273	22.878	22.202	22.028	24.094	22.130	22.552	22.761	22.741	22.955	23.405	23.210	27.181	23.863
Investasi	19.815	19.264	19.100	19.776	21.035	20.702	19.774	21.427	21.624	21.610	21.593	21.883	22.124	22.870	24.123	23.794
Konsumsi	19.875	20.127	20.255	20.473	20.639	20.832	20.993	21.099	21.197	21.439	21.525	21.643	21.798	21.994	23.352	22.474
b. Jenis Kredit	61.920	61.984	61.628	63.127	63.876	63.562	64.861	64.656	65.373	65.810	65.859	66.481	67.327	68.074	74.655	70.132
UMKM	11.067	11.068	11.089	11.222	11.251	11.294	11.596	11.424	11.472	11.540	11.434	11.702	12.031	11.895	13.318	12.449
Non UMKM	50.853	50.916	50.539	51.904	52.625	52.269	53.265	53.232	53.901	54.270	54.425	54.779	55.296	56.179	61.337	57.683
c. Kolektibilitas	61.920	61.984	61.628	63.127	63.562	64.861	64.656	64.656	65.373	65.810	65.859	66.481	67.327	68.074	68.657	70.132
Lancar	56.897	56.604	56.463	57.733	58.670	60.275	59.637	59.637	59.989	60.810	60.638	61.335	61.376	62.354	63.079	65.188
D.P.Khusus	3.447	3.450	3.348	3.450	3.525	3.238	3.612	3.612	3.947	3.567	3.777	3.640	4.324	3.113	2.957	2.378
Kurang Lancar	120	263	216	382	187	217	256	256	233	239	281	326	357	1.284	1.285	214
Diragukan	439	461	488	443	591	434	438	438	492	482	438	455	563	572	532	1.496
Macet	1.217	1.204	1.113	1.118	589	696	713	713	712	712	725	724	706	751	804	856
RATIO																
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	91,58%	91,22%	90,70%	95,58%	90,43%	93,82%	88,73%	88,73%	93,36%	93,50%	92,28%	90,90%	93,37%	93,29%	91,60%	91,18%
b. Non Performing Loans (NPL)	2,87%	3,11%	2,95%	3,08%	2,15%	2,08%	2,18%	2,18%	2,20%	2,18%	2,19%	2,26%	2,42%	3,83%	3,82%	3,66%

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 5 Data Perbankan (Bank Umum) (Dim. Juta Rp.)
Wilayah Kepulauan Riau **)

KETERANGAN								2023								
	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
ASET	18.750	18.827	18.618	18.489	19.318	19.196	19.126	18.328	18.700	18.421	17.926	18.193	18.728	19.682	19.609	19.834
DANA PIHAK KETIGA	16.483	16.716	16.565	14.753	16.981	14.947	16.589	17.883	14.962	13.866	13.664	15.729	14.145	14.045	14.625	16.514
a. Giro	5.591	5.304	5.092	5.557	6.586	6.453	6.073	6.648	5.801	5.600	6.102	4.763	5.113	5.026	6.227	6.284
b. Tabungan	7.063	7.218	7.086	7.071	7.053	7.178	7.390	7.209	6.956	6.601	6.937	7.145	6.945	7.043	7.413	6.570
c. Deposito	3.829	4.194	4.387	2.126	3.342	1.316	3.127	4.026	2.205	1.665	625	3.822	2.087	1.976	985	3.660
KREDIT																
a. Jenis Penggunaan	13.150	13.280	13.212	13.597	13.677	14.043	14.265	15.008	15.172	15.290	15.491	15.483	15.845	15.654	16.918	16.225
Modal Kerja	3.690	3.828	3.840	3.865	3.889	3.884	3.853	3.754	3.778	3.784	3.785	3.809	3.879	3.745	4.081	3.819
Investasi	2.437	2.318	2.204	2.469	2.472	2.783	2.963	3.758	3.873	3.886	4.084	4.213	4.324	4.224	4.799	4.590
Konsumsi	7.024	7.134	7.168	7.263	7.317	7.376	7.448	7.495	7.520	7.621	7.622	7.461	7.643	7.685	8.039	7.817
b. Jenis Kredit	13.150	13.280	13.212	13.597	13.677	14.043	14.265	15.008	15.172	15.290	15.491	15.483	15.845	15.654	16.918	16.225
UMKM	3.674	3.730	3.722	3.766	3.780	3.815	3.825	3.749	3.777	3.819	3.806	3.823	3.884	3.916	4.305	4.124
Non UMKM	9.476	9.550	9.490	9.831	9.897	10.228	10.440	11.258	11.395	11.472	11.685	11.660	11.962	11.738	12.614	12.101
c. Kolektibilitas	13.150	13.280	13.212	13.597	13.364	15.342	14.060	15.008	15.172	15.290	15.491	15.483	15.845	15.654	15.889	16.225
Lancar	11.695	11.717	11.777	12.126	12.459	14.208	12.386	13.596	13.594	13.835	13.966	13.929	14.354	14.293	14.583	14.921
D.P.Khusus	781	787	763	768	784	481	968	735	887	759	842	809	666	567	513	559
Kurang Lancar	27	109	108	134	83	132	132	115	111	137	146	205	194	162	156	112
Diragukan	383	404	381	384	400	227	386	376	387	371	362	362	457	451	407	374
Macet	264	264	184	186	(362)	294	188	185	194	187	174	178	174	180	229	259
RATIO																
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	79,78%	79,45%	79,76%	92,16%	80,55%	93,95%	85,99%	83,92%	101,40%	110,28%	113,37%	98,44%	112,02%	111,46%	115,68%	98,25%
b. Non Performing Loans (NPL)	5,12%	5,85%	5,09%	5,17%	0,90%	4,26%	5,02%	4,51%	4,56%	4,55%	4,41%	4,81%	5,20%	5,07%	4,99%	4,59%

Sumber: Bank Indonesia

***) meliputi Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Natuna

Lampiran

Tabel 6 Data Perbankan (Bank Umum) (Dlm. Juta Rp.)
Kota Batam

KETERANGAN								2023								
	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
ASET	58.617	58.784	58.983	59.824	60.975	62.141	64.016	62.146	63.751	64.870	65.441	66.183	67.243	68.164	68.967	70.569
DANA PIHAK KETIGA	51.130	51.231	51.384	51.293	53.308	54.190	56.282	54.988	55.061	56.519	57.706	57.406	57.961	58.925	60.330	60.759
a. Giro	16.507	16.935	17.255	17.941	18.742	18.600	19.394	18.819	18.850	19.468	18.987	19.414	19.796	20.464	20.878	21.071
b. Tabungan	23.415	23.250	23.283	23.380	23.641	23.932	24.460	24.641	24.856	25.300	25.513	25.516	25.681	25.863	25.689	26.263
c. Deposito	11.207	11.046	10.846	9.972	10.925	11.657	12.427	11.529	11.355	11.750	13.205	12.476	12.484	12.598	13.762	13.425
KREDIT																
a. Jenis Penggunaan	48.770	48.703	48.415	49.530	50.198	49.519	50.596	49.648	50.201	50.519	50.368	50.998	51.482	52.420	57.737	53.907
Modal Kerja	18.541	18.764	18.433	19.013	18.313	18.145	20.241	18.376	18.774	18.977	18.956	19.146	19.526	19.465	23.100	20.045
Investasi	17.379	16.946	16.896	17.306	18.563	17.919	16.810	17.669	17.751	17.724	17.509	17.669	17.800	18.646	19.324	19.204
Konsumsi	12.851	12.993	13.087	13.211	13.322	13.456	13.545	13.604	13.676	13.819	13.903	14.182	14.155	14.309	15.313	14.658
b. Jenis Kredit	48.770	48.703	48.415	49.530	50.198	49.519	50.596	49.648	50.201	50.519	50.368	50.998	51.482	52.420	57.737	53.907
UMKM	7.393	7.338	7.367	7.456	7.471	7.479	7.771	7.675	7.695	7.721	7.628	7.879	8.147	7.979	9.013	8.324
Non UMKM	41.377	41.366	41.049	42.073	42.728	42.041	42.825	41.974	42.506	42.799	42.740	43.119	43.334	44.440	48.724	45.582
c. Kolektibilitas	48.770	48.703	48.415	49.530	50.198	49.519	50.596	49.648	50.201	50.519	50.368	50.998	51.482	52.420	52.769	53.907
Lancar	45.002	44.888	44.685	45.608	46.210	46.067	47.251	46.041	46.395	46.975	46.672	47.406	47.022	48.061	48.496	50.267
D.P.Khusus	2.666	2.663	2.585	2.682	2.741	2.758	2.645	2.878	3.061	2.808	2.935	2.831	3.658	2.546	2.444	1.819
Kurang Lancar	93	154	108	248	105	85	124	140	122	101	135	121	163	1.121	1.129	102
Diragukan	56	58	107	59	192	207	52	62	105	111	75	94	106	120	125	1.122
Macet	954	940	929	932	951	402	525	527	519	524	550	546	532	571	575	597
RATIO																
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	95,38%	95,07%	94,22%	96,56%	94,17%	91,38%	89,90%	90,29%	91,17%	89,39%	87,28%	88,84%	88,82%	88,96%	87,47%	88,72%
b. Non Performing Loans (NPL)	2,26%	2,37%	2,36%	2,50%	2,48%	1,40%	1,38%	1,47%	1,49%	1,46%	1,51%	1,49%	1,56%	3,46%	3,47%	3,38%

Sumber: Bank Indonesia

Ket : Satuan Dalam Miliar Rupiah

Tabel 7 Perputaran Kliring Batam, Tanjungpinang dan Tanjung Balai Karimun

JENIS			2022						2023							
	IV		I		II		III		IV		I		II		III	
	Total	Rata-rata Perhari														
A. WARKAT KLIRING																
1. WARKAT (Lbr)	71.673	1.156	69.279	1.117	70.929	1.144	68.779	1.109	48.087	776	50.215	810	66.535	1.073	67.249	1.085
2. NOMINAL (Jt.Rp)	2.602.398	41.974.161	3.540.018	57.097.067	3.547.218	57.213.187	3.600.741	58.076.461	2.410.536	38.880	3.278.058	52.872	3.225.906	52.031	3.614.866	58.304

Sumber: Bank Indonesia

Daftar Istilah

Istilah	Arti
Akselerasi	Pertumbuhan yang lebih tinggi pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
Andil Inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Capital Adequacy Ratio (CAR)	Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.
Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan daerah untuk memenuhi pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ekspor	Seluruh barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial.
Faktor Fundamental	Faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi pengeluaran lapangan usaha atau output gap, eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat.
Faktor Non Fundamental	Faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (volatile food), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (<i>administered prices</i>).
Impor	Seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial.
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1-100
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi (IKE)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1-100.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Ukuran kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli.
Inflasi	Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (persistent).
Inflasi IHK	Kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.
Inflow	Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Kliring	Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu
Kontraksi	Pertumbuhan yang negatif.
Kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Kualitas kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Istilah	Arti
Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.
Loan to Deposit Ratio (LDR)	Rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang disalurkan dengan dana pihak ke tiga yang dihimpun pada suatu waktu tertentu.
Melambat	Pertumbuhan yang lebih rendah pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
mtm (month to month)	Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya
Net-outflow	Selisih bersih antara jumlah <i>inflow</i> pada periode yang sama terdiri dari <i>net-outflow</i> bila terjadi <i>outflow</i> lebih besar dibandingkan <i>inflow</i> , dan <i>net-inflow</i> bila terjadi sebaliknya
Non Performing Loan (NPL)	Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
Outflow	Jumlah aliran kas keluar dari Kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Perusahaan	Suatu unit usaha yang diselenggarakan/dikelola secara komersial yang menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya terletak pada suatu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja, dan sebagainya yang digunakan dalam proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu. 1. PDRB atas dasar harga berlaku Penjumlahan nilai tambah bruto yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian 2. PDRB atas dasar harga konstan Perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya.
qtq (quarter to quarter)	Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Real Time Gross Settlement (RTGS)	Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (<i>real time</i>) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerima pembayaran.
Saldo Bersih	Selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun" dan mengabaikan jawaban "sama".
Saldo Bersih Tertimbang (SBT)	Nilai yang diperoleh dari hasil perkalian saldo bersih sektor/subsektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/subsektor yang bersangkutan sebagai penimbangannya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)	Survei triwulanan yang bertujuan untuk mendapatkan indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha secara triwulanan.
Survei Konsumen (SK)	Survei bulanan yang bertujuan untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian pada 6 bulan mendatang.
Uang Giral	Uang terdiri atas rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka dan tabungan yang sudah jatuh waktu, yang seluruhnya merupakan simpanan penduduk dalam Rupiah dan sistem moneter.
Uang Kartal	Uang yang terdiri atas uang kertas dan uang logam yang berlaku, tidak termasuk uang kas pada KPN dan bank umum.
yoj (year on year)	Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Tim Perumusan KEKDA Provinsi

Jl. Engku Putri No.1, Tlk. Kering Batam Kota,
Kota Batam, Kepulauan Riau

